



Cakrawala

MEDIA INFORMASI TNI AL DAN KEMARITIMAN

Edisi 468 Tahun 2025

MENYELAMI TRISILA TNI AL

SEBAGAI JEMBATAN FILOSOFIS SAPTA MARGA

MENUJU INTEGRITAS, LOYALITAS, DAN PROFESIONALISME



Salam Jalesveva Jayamahe!

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hasil karya dengan berbagai tema strategis mengenai pembinaan karakter, profesionalisme, serta peran TNI Angkatan Laut dalam menghadapi dinamika nasional maupun global ini dapat tersusun dengan baik.

Melalui pokok bahasan seperti "Kodiklatal sebagai Kawah Candradimuka: Internalisasi Trisila dan Sapta Marga Dalam Membangun Prajurit Pejuang Matra Laut yang Profesional", dan "Meneguhkan Sapta Marga dan Trisila TNI AL di Era Digital", pembaca diajak melihat pentingnya kesinambungan antara nilai-nilai tradisi dan kesiapan adaptif menghadapi perkembangan teknologi serta ancaman maritim yang semakin kompleks.

Di sisi historis perjuangan nasional juga mendapat tempat melalui kajian "Kapten R. Soelian Djosoedarmo, Api Perlawanan dari Pesisir Belawan", yang menjadi pengingat bahwa karakter pejuang matra laut tumbuh dari jejak panjang keberanian penjaga kedaulatan Nusantara. Semangat ini selaras dengan topik strategis lainnya seperti "Reorientasi Gelar Kekuatan Matra Laut: Analisis Tantangan Logistik dan Imperatif 14 Kodaeral", "Para Penjaga Samudra Nusantara Berjiwa Pancasila", serta "Penjaga Kelestarian Laut Nusantara", yang menyoroti dimensi pertahanan, lingkungan, dan geopolitik maritim.

Tidak hanya membahas domain militer, dokumen ini juga menampilkan perspektif sosial dan nasional, termasuk "Strategi Pendidikan TNI AL Menuju Indonesia Emas", "Peran Krusial Media Digital dalam Komunikasi Global Menghadapi Perang Modern", "PPMD Menunjang Program Pemerintah", hingga refleksi global seperti "Saat Doktrin Nasional Berhadapan dengan Mandat Global di Kongo". Pembahasan hukum dan literasi digital juga diangkat melalui topik "Sekilas Mengenai UU ITE, Istilah Hoaks dan Ujaran Kebencian", yang relevan dengan tantangan komunikasi di era informasi.

Sebagai penutup, dimasukkan pula dimensi religius dan kehidupan keluarga melalui tema "Mewujudkan Keluarga Bahagia Menurut Ajaran Islam", sebagai pengingat bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya bertumpu pada kemampuan militernya, tetapi juga pada ketahanan keluarga yang menjadi fondasi moral dan sosial masyarakat.

Dengan semangat Jalesveva Jayamahe, mari kita terus melangkah menuju masa depan maritim Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat. Salam sehat.

Kadispenal,

Laksamana Pertama TNI Tunggul, M.Han.

Cakrawala

PELINDUNG:

Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla

PEMIMPIN UMUM:

Laksamana Pertama TNI Tunggul, M.Han.

WAKIL PEMIMPIN UMUM:

Kolonel Laut (P) Laode M. Holib, S.E., M.Tr.Hanla., M.M.

PEMIMPIN REDAKSI:

Kolonel Laut (S) Didin Wahidin, A.Md.

REDAKTUR:

Kolonel Laut (P) Bambang Budi Raharjo, S.E., M.Tr.Opsla.
Kolonel Laut (P) I Made Ardyan Budi H., S.E., M.Tr.Hanla., CHRMP
Kolonel Laut (KH) Panji Utoro, S.Kom., M.Tr.Opsla., M.M.
Letkol Laut (KH) Sitho Prihambodho Yudhoajie, S.Kom., M.M.
Letkol Laut (S) Febry Sunday Manaman, S.E., M.Tr.Opsla.
Mayor Laut (KH) Eldhira Respati, S.Sos.
Mayor Laut (S) Cahyo Adi Nugroho, S.S.T.Han.

PENATA WAJAH:

Letda Laut (KH) Naufal Hisyam Fadhila, S.Sos.
Serda PDK Julfandika Dwi Siswanto, S.Ds.
Penata Tk. I III/d Irma Kurniawaty, A.Md. Graf.
Penda Tk. I III/b Aroby Pujadi

REDAKTUR FOTO:

Peltu PDK/W Miriyana

TATA USAHA:

Mayor Laut (P) Aria Bravita
Penata Tk. I III/d Basiran

DISTRIBUSI:

Kapten Laut (T) Edis Suhaedi
Kopka TTU Supriyadi

DITERBITKAN OLEH:

Dinas Penerangan Angkatan Laut

ALAMAT REDAKSI:

Dinas Penerangan Angkatan Laut, Gedung B-4 Lt. 2,
Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur-13870,
Telp. (021) 8723314
www.tnial.mil.id.
No. ISSN: 0216-440x,
Radio JJM 107.7 FM dan 1170 AM



Dispen AL



tni_angkatan_laut



@_TNIAL_



TNI ANGKATAN LAUT

ISSN 0216-440x



DAFTAR ISI

TAJUK UTAMA

- 4 **MENGOKOHKAN KARAKTER PRAJURIT JALASENA: MENYELAMI TRISILA TNI AL SEBAGAI JEMBATAN FILOSOFIS SAPTA MARGA MENUJU INTEGRITAS, LOYALITAS, DAN PROFESIONALISME**
- 14 **KODIKLATAL SEBAGAI KAWAH CANDRADIMUKA: INTERNALISASI TRISILA DAN SAPTA MARGA DALAM MEMBANGUN PRAJURIT PEJUANG MATRA LAUT YANG PROFESIONAL**
- 20 **MENEGUHKAN SAPTA MARGA & TRISILA TNI AL DI ERA DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN PRAJURIT MATRA LAUT YANG BERINTEGRITAS, LOYAL DAN PROFESIONAL**
- 26 **DARI TRADISI KE ADAPTASI : KUNCI PRAJURIT SAMUDRA MENJAGA PROFESIONALISME DALAM PUSARAN DINAMIKA DUNIA, MEMBANGUN KARAKTER PRAJURIT MATRA LAUT YANG TANGGUH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MARITIM MASA DEPAN**

HISTORY

- 63 **KAPTEN R. SOELIAN DJOSOEDARSO, API PERLAWANAN DARI PESISIR BELAWAN**

RUBRIK BINTAL

- 72 **MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA MENURUT AJARAN ISLAM**

RAGAM RUBRIK

- 32 **REORIENTASI GELAR KEKUATAN MATRA LAUT: ANALISIS MENDALAM TANTANGAN LOGISTIK DAN IMPERATIF PRIORITAS DALAM IMPLEMENTASI 14 KODAERAL**
- 36 **PENJAGA KELESTARIAN LAUT NUSANTARA**
- 42 **PARA PENJAGA SAMUDRA NUSANTARA BERJIWA PANCASILA**
- 56 **DIPLOMASI KEAMANAN DAN JARINGAN MASA DEPAN**
- 60 **STRATEGI PENDIDIKAN TNI AL MENUJU INDONESIA EMAS**
- 66 **PERAN KRUSIAL MEDIA DIGITAL DALAM KOMUNIKASI GLOBAL MENGHADAPI PERANG MODERN**
- 74 **PPMD MENUNJANG PROGRAM PEMERINTAH**

RAGAM HUKUM

- 46 **SAAT DOKTRIN NASIONAL BERHADAPAN DENGAN MANDAT GLOBAL DI KONGO**
- 50 **SEKILAS MENGENAI UU TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE), ISTILAH HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN**

Redaksi menerima tulisan (maksimal 5 halaman dengan spasi 1,5) beserta foto dari segenap anggota TNI/TNI AL dan masyarakat umum. Naskah dicetak di kertas ukuran A4 serta dilengkapi dengan data digital dalam Compact Disc (CD) atau soft copy dapat dikirim via email redaksi. Naskah yang telah dikirim, menjadi milik redaksi dan redaksi berhak memperbaiki/mengedit tanpa mengubah isi/makna. Naskah yang dimuat akan mendapat imbalan sepantasnya. Redaksi juga menerima kritik, saran dan opini singkat.

Tulisan dikirim ke Redaksi Cakrawala dengan alamat
Dinas Penerangan Angkatan Laut, Gedung B-4 Lt. 2, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur - 13870 atau via email: cakrawala42@gmail.com

MENGOKOHKAN KARAKTER PRAJURIT JALASENA:

MENYELAMI TRISILA TNI AL

**SEBAGAI JEMBATAN
FILOSOFIS SAPTA MARGA
MENUJU INTEGRITAS,
LOYALITAS, DAN
PROFESIONALISME**

Oleh: Kolonel Laut (P) Dr. Dickry Rizanny N, PSC(J), MMDS,





Abstrak

Artikel ini menganalisis peran sentral Trisila TNI AL, yang terdiri dari Disiplin, Hierarki, dan Kehormatan Militer, sebagai mekanisme operasional dan sarana penghayatan (internalisasi) nilai-nilai filosofis Sapta Marga. Tujuan dari analisa artikel ini adalah untuk mewujudkan tiga pilar karakter krusial prajurit matra laut: Integritas, Loyalitas, dan Profesionalisme. Melalui metodologi analisis kualitatif-doktrinal, artikel ini memetakan hubungan hierarkis antara Sapta Marga sebagai doktrin induk etika TNI dan Trisila TNI AL sebagai doktrin pelaksana spesifik matra laut. Analisis ini menguji korelasi kausatif antara setiap pilar Trisila dan tiga karakter tersebut, yang menghasilkan temuan: (1) Disiplin berfungsi sebagai fondasi pembentuk Integritas; (2) Hierarki bertindak sebagai struktur formal yang mengikat Loyalitas; dan (3) Kehormatan Militer merupakan sintesis puncak dari Profesionalisme yang berintegritas. Artikel ini juga mengevaluasi mekanisme implementasi praktis, seperti "Bulan Trisila TNI AL", sebagai upaya organisasi menjembatani kesenjangan antara kepatuhan berbasis pengawasan dan penghayatan berbasis kesadaran. Dalam konteks modern, Trisila TNI AL direkonseptualisasi sebagai kerangka etika yang esensial untuk menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan digital, sekaligus untuk memenuhi tuntutan visi "TNI PRIMA" (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, Adaptif).

KONTEKSTUALISASI DOKTRIN DAN URGENSI KARAKTER PRAJURIT

Latar Belakang: Urgensi Prajurit Jalasena yang Paripurna

Konteks geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menempatkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pada posisi vital dalam penegakan kedaulatan, hukum, dan keamanan maritim. Untuk mengemban tugas tersebut, TNI AL menuntut keberadaan prajurit matra laut, dikenal sebagai Jalasena, yang tidak hanya unggul secara teknis dalam mengawaki Alutsista modern, tetapi juga kokoh secara karakter dan mental. Medan tugas prajurit TNI AL memiliki karakteristik unik, seringkali menuntut tingkat "kebutuhan mandiri" yang tinggi di tengah lautan dan keterbatasan ruang kerja. Oleh karena itu, prajurit dituntut memiliki "kemampuan dan ketrampilan yang dapat diandalkan".

Tuntutan ini dipertegas dalam visi modern TNI yang dicanangkan pimpinan, yakni "TNI PRIMA" (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, Adaptif). Visi ini menetapkan standar profesionalisme yang tinggi, yang tidak hanya diukur dari penguasaan teknologi, tetapi juga dari aspek integritas dan adaptabilitas. Sosok prajurit Jalasena yang paripurna adalah personel TNI AL yang mampu memadukan kecakapan teknis dengan budi pekerti luhur.

Identifikasi Masalah: Ancaman terhadap Etika dan Mental Prajurit

Di tengah tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi, organisasi TNI AL secara internal mengidentifikasi

adanya tantangan kontemporer yang signifikan terhadap etika dan mentalitas prajurit. Pimpinan TNI AL mengakui adanya "fenomena penurunan sikap mental prajurit". Fenomena ini tidak timbul dari ruang hampa, melainkan diidentifikasi bersumber dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

Secara spesifik, sumber ancaman tersebut mencakup "penyalahgunaan gadget", "pengaruh media sosial", "efek negatif game online", hingga "judi online". Dampak dari ancaman-ancaman ini sangat serius, ditandai dengan munculnya perilaku prajurit yang "tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan Trisila TNI AL". Dengan kata lain, disrupsi digital secara langsung mengikis fondasi etika keprajuritan.

Tantangan ini tidak hanya bersifat internal. Studi akademis mengenai dampak globalisasi terhadap institusi pendidikan militer, seperti Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL), menyoroti perlunya transformasi kelembagaan untuk beradaptasi dengan ancaman kontemporer dan menghasilkan "militer profesional" yang mampu berpikir strategis dalam konteks global.

Rumusan Masalah dan Tesis Utama

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama:

1. Bagaimana korelasi konseptual dan hierarki doktrinal antara Sapta Marga sebagai doktrin filosofis induk TNI dan Trisila TNI AL sebagai doktrin aplikatif spesifik matra laut?



TAJUK UTAMA

2. Bagaimana setiap pilar Trisila TNI AL (Disiplin, Hierarki, dan Kehormatan Militer) secara spesifik dan kausatif berkontribusi dalam membentuk tiga karakter inti prajurit: Integritas, Loyalitas, dan Profesionalisme?

3. Bagaimana mekanisme implementasi praktis di lapangan, seperti "Bulan Trisila TNI AL", berupaya menjembatani kesenjangan antara doktrin (yang seharusnya) dan realitas kedinasan (yang terjadi)?

Artikel ini mengajukan tesis bahwa Trisila TNI AL berfungsi sebagai *framework* implementasi yang esensial dan spesifik matra laut untuk menerjemahkan (mengoperasionalkan) nilai-nilai etika luhur yang terkandung dalam Sapta Marga. Penghayatan Trisila secara sistematis bukan hanya sekadar tradisi, melainkan mekanisme utama organisasi untuk memitigasi degradasi moral akibat modernitas dan secara kausatif membentuk tiga pilar karakter prajurit Jalasena. Analisis ini berargumen bahwa Disiplin adalah fondasi bagi Integritas; Hierarki adalah struktur pengikat Loyalitas; dan Kehormatan Militer adalah manifestasi puncak dari Profesionalisme yang berintegritas.

Metodologi dan Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis kualitatif-doktrinal dengan pendekatan studi literatur yang mendalam. Sumber data primer mencakup dokumen doktrin resmi dan publikasi internal TNI AL, seperti Majalah Cakrawala dan telegram Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal). Sumber data sekunder meliputi jurnal akademis bereputasi yang membahas sosiologi militer, etika, dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan TNI serta literatur internasional mengenai etika keprajuritan. Ruang lingkup analisis difokuskan pada prajurit TNI AL, dengan Sapta Marga sebagai konteks filosofis (level TNI) dan Trisila TNI AL sebagai fokus analisis implementasi (level Matra Laut).

FONDASI FILOSOFIS DAN HIERARKI DOKTRIN: KETERKAITAN SAPTA MARGA DAN TRISILA TNI AL

Analisis Sapta Marga sebagai Doktrin Induk Etika TNI

Sapta Marga merupakan landasan filosofis dan "kode etik prajurit TNI" yang fundamental. Sapta Marga terdiri dari tujuh butir sumpah yang menempatkan prajurit sebagai warga negara, patriot, kesatria, dan bhayangkari negara. Sapta Marga, bersama dengan Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, membentuk corpus (badan) doktrin etika yang harus dipegang teguh oleh setiap prajurit, apa pun matranya.

Dalam konteks implementasi di TNI AL, analisis mendalam terhadap butir kelima Sapta Marga menunjukkan keterkaitan yang tidak terpisahkan. Butir kelima berbunyi: "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit".

Butir ini bukanlah sekadar salah satu dari tujuh butir, melainkan dapat diidentifikasi sebagai benih doktrinal yang secara eksplisit melahirkan pilar-pilar Trisila TNI AL. Jika diurai, frasa "memegang teguh disiplin" secara langsung merujuk pada pilar pertama Disiplin. Frasa "patuh dan taat kepada pimpinan" merupakan inti dari pilar kedua Hierarki. Dan frasa "menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" adalah esensi dari pilar ketiga Kehormatan Militer. Hal ini membuktikan bahwa Trisila TNI AL bukanlah doktrin yang terpisah atau baru, melainkan sebuah penjabaran dan kristalisasi yang diperintahkan langsung oleh Sapta Marga untuk diimplementasikan.

TRISILA TNI AL SEBAGAI DOKTRIN PELAKSANA SPESIFIK MATRA LAUT

Secara etimologis, Trisila berasal dari bahasa Sanskerta, "Tri" yang berarti tiga, dan "Sila" yang berarti azas atau dasar. Dengan demikian, Trisila TNI AL bermakna "Tiga Azas atau Pedoman Dasar". Secara formal, doktrin ini ditetapkan sebagai "pola pikir, pola sikap dan pola tindak" bagi setiap prajurit TNI AL dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kasal (contoh: Kep/01/II/2002).

Secara historis, Trisila TNI AL memiliki konteks kelahiran yang sangat pragmatis dan sosiologis. Doktrin ini lahir dari pemikiran di kalangan perwira Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pasca-kebijakan penerimaan dan pengangkatan mantan anggota Koninklijke Marine (KM) atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Trisila lahir sebagai konsepsi yang dibutuhkan untuk "mencegah perpecahan, mengikat mental dan semangat juang, serta menggalang tekad kebersamaan".

Konteks kelahiran ini membuktikan bahwa Trisila, sejak awal, dirancang sebagai alat manajemen identitas dan penempatan loyalitas dalam sebuah organisasi yang heterogen. Ini bukanlah sekadar filosofi abstrak, melainkan solusi sosiologis terhadap potensi krisis identitas organisasi. Relevansinya hari ini menjadi sangat kuat: jika di masa lalu Trisila berhasil mengintegrasikan prajurit eks-KM dan eks-ALRI ke dalam satu identitas Jalasena, maka di masa kini, Trisila ditugaskan untuk mengintegrasikan prajurit dari tarikan etika sekuler dan disrupsi digital ke dalam etika luhur keprajuritan.

Tabel 1: Matriks Korelasi Doktrin Sapta Marga dan Trisila TNI AL

Tabel berikut memvisualisasikan analisis keterkaitan langsung antara butir-butir Sapta Marga (sebagai sumber nilai) dan tiga pilar Trisila TNI AL (sebagai penjabaran aplikatif).

Butir Sapta Marga (Sumber Nilai Filosofis)	Pilar Trisila TNI AL (Penjabaran Aplikatif Matra Laut)	Analisis Korelasi dan Penjabaran
Butir 1: Kami warga negara... bersendikan Pancasila.	Disiplin, Hierarki, Kehormatan Militer	Seluruh pilar Trisila berlandaskan pada ideologi Pancasila. Ketaatan pada negara (Hierarki) adalah wujud pengamalan Pancasila.
Butir 2: Kami patriot Indonesia... pembela ideologi negara... tidak mengenal menyerah.	Disiplin, Kehormatan Militer	Sikap "tidak mengenal menyerah" membutuhkan <i>Disiplin</i> mental yang tinggi. Membela ideologi adalah wujud <i>Kehormatan Militer</i> .
Butir 3: Kami kesatria Indonesia... bertaqwa... serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.	Kehormatan Militer	Pilar ini secara langsung menuntut integritas moral. <i>Kehormatan Militer</i> adalah komitmen untuk membela "kejujuran, kebenaran, dan keadilan".
Butir 4: Kami prajurit... adalah bhayangkari negara dan bangsa.	Kehormatan Militer	Menjadi "perisai Negara" adalah definisi puncak dari <i>Kehormatan Militer</i> .
Butir 5: Kami prajurit... memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.	Disiplin, Hierarki, Kehormatan Militer	KORELASI LANGSUNG. Butir ini adalah <i>benih doktrinal</i> dan mandat eksplisit bagi TNI AL untuk merumuskan dan mengimplementasikan ketiga pilar Trisila.
Butir 6: Kami prajurit... mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas.	Disiplin, Profesionalisme (via Kehormatan Militer)	Keperwiraan (profesionalisme dalam pertempuran) hanya dapat dicapai melalui <i>Disiplin</i> latihan yang keras dan sikap ksatria (<i>Kehormatan</i>).
Butir 7: Kami prajurit... setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.	Loyalitas (via Hierarki), Integritas (via Disiplin)	Kesetiaan pada janji adalah <i>Integritas</i> . Kesetiaan pada Sumpah Prajurit mencakup ketaatan pada atasan, yang merupakan inti dari <i>Hierarki</i> .



TAJUK UTAMA

Memetakan Hierarki Doktrin

Dengan demikian, hierarki doktrin etika di TNI AL dapat dipetakan secara jelas:

1. Dasar Filosofis (Ideologi): Pancasila dan UUD 1945.
2. Doktrin Induk Etika (Level TNI): Sapta Marga.
3. Doktrin Pelaksana (Level Matra Laut): Trisila TNI AL.

Dalam pemetaan ini, Sapta Marga adalah "Dharma" (kewajiban filosofis), sementara Trisila TNI AL adalah "Marga" (jalan atau metode) implementasinya yang spesifik di matra laut. Trisila adalah sebuah *living document* yang harus dipahami, dihayati, dan diaktualisasikan. Doktrin ini juga berfungsi sebagai "landasan budi pekerti yang luhur" yang mendukung pencapaian Doktrin Perjuangan TNI AL Eka Sasana Jaya yang diperbarui dengan Doktrin Jalesveva Jayamahe. Doktrin ini berfokus pada "keunggulan Angkatan Laut di medan perang", sebuah keunggulan yang tidak mungkin tercapai tanpa prajurit yang karakternya ditempa oleh nilai-nilai Trisila.

PILAR PERTAMA (DISIPLIN): FONDASI INTEGRITAS PRAJURIT

Definisi Akademis dan Militer "Disiplin"

Pilar pertama Trisila adalah Disiplin. Secara doktrinal, Disiplin didefinisikan sebagai sikap di mana "anggota TNI AL mentaati segala peraturan dan tata tertib berdasarkan kesadaran pengabdian". Frasa kunci di sini adalah "berdasarkan kesadaran pengabdian", yang membedakan disiplin militer sejati dari sekadar kepatuhan karena takut hukuman.

Secara akademis dan militer, disiplin adalah "syarat mutlak" dalam kehidupan keprajuritan. Ia merupakan "sikap mental" yang dicerminkan melalui perbuatan dan tingkah laku berupa kepatuhan terhadap aturan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Disiplin menuntut ketaatan pada "semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah-perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan".

Analisis Kausal: Hubungan Disiplin dan Integritas

Disiplin dan Integritas memiliki hubungan kausalitas yang kuat. Disiplin adalah manifestasi perilaku yang terlihat dan terukur, sementara Integritas adalah nilai moral internal yang tidak terlihat. Analisis akademis terhadap prajurit TNI AL membuktikan korelasi ini. Sebuah studi di *ResearchGate* secara eksplisit menyatakan bahwa "Disiplin kerja yang tinggi dari prajurit dalam organisasi menunjukkan integritas dan tanggung jawab prajurit terhadap institusinya".

Dengan kata lain, Disiplin adalah inkubator bagi Integritas. Organisasi militer, melalui penegakan disiplin yang konsisten, pada dasarnya sedang melatih dan membangun karakter integritas. Ketika seorang prajurit secara konsisten taat pada aturan (disiplin), ia sedang membiasakan dirinya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai (integritas). Hubungan ini terkonfirmasi lebih lanjut oleh data yang menunjukkan bahwa disiplin memiliki pengaruh "positif dan signifikan" terhadap "semangat pengabdian" dan kinerja secara keseluruhan. Prajurit yang berintegritas adalah prajurit yang memiliki disiplin internal untuk mengabdikan.

Aplikasi Praktis dan Tantangan Internalisasi

Dalam aplikasi sehari-hari, Disiplin diwujudkan melalui ketaatan pada Peraturan Militer Dasar (Permildas), seperti Peraturan Penghormatan Militer (PPM) dan Peraturan Baris Berbaris (PBB). Ketaatan pada hal-hal "kecil yang remeh tetapi penting" ini membentuk pola pikir dan sikap mental.

Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan terbesar, yang dapat disebut sebagai "Kesenjangan Kepatuhan vs. Internalisasi" (*Compliance vs. Internalization Gap*). Sebuah studi kasus mengungkap sebuah realitas kritis: terlaksananya tugas terkadang "bukan dari kesadaran atas semangat pengabdian," melainkan terjadi "karena ada pengawasan dan tekanan dari atasan." Studi tersebut juga menemukan bahwa semangat kerja (disiplin) terkadang baru timbul "apabila ada *reward* atau kompensasi yang akan diperoleh".

Temuan ini sangat penting. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara disiplin yang berbasis ekstrinsik (pengawasan, *reward*/ kompensasi) dan disiplin yang berbasis intrinsik (kesadaran, integritas), padahal doktrin jelas meminta yang kedua. Oleh karena itu, "penghayatan" yang menjadi inti dari kueri ini adalah upaya organisasi untuk menutup kesenjangan tersebut, memindahkan motivasi prajurit dari kepatuhan eksternal ke disiplin internal yang berlandaskan integritas.

PILAR KEDUA (HIERARKI): STRUKTUR LOYALITAS DAN EFEKTIVITAS KOMANDO

Definisi Akademis dan Militer "Hierarki"

Pilar kedua adalah Hierarki. Secara doktrinal, Hierarki didefinisikan sebagai sikap di mana "seorang prajurit TNI AL menempatkan diri dan bertindak sesuai dengan tata aturan kepangkatan, kedudukan dan jabatan di dalam organisasi TNI AL". Ini adalah kesadaran tinggi yang konstan terhadap pangkat dan jabatan dalam setiap interaksi kedinasan.



Secara sosiologis, organisasi militer adalah arketipe dari struktur organisasi hierarkis *top-down*. Hierarki ini menciptakan "rantai komando" (*chain of command*) yang spesifik dan tegas. Dalam struktur ini, perbedaan tingkatan hierarki (pangkat dan jabatan) memiliki konsekuensi langsung pada "perbedaan tingkatan tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan".

Analisis Kausal: Hubungan Hierarki dan Loyalitas

Hubungan antara Hierarki dan Loyalitas bersifat fundamental. Hierarki adalah struktur yang memformalkan dan mengarahkan loyalitas. Tanpa hierarki, loyalitas menjadi abstrak, subjektif, dan tidak fungsional dalam konteks organisasi.

Studi terhadap organisasi Korps Marinir, yang memiliki "struktur hierarki yang kuat", menunjukkan bahwa budaya organisasi ini "memberi penekanan kuat pada loyalitas, dedikasi, prestasi dan proaktif". Dalam sistem ini, sebuah perintah dari atasan dipersepsikan sebagai "perintah yang wajib dilaksanakan". Kepatuhan yang tidak mempertanyakan (*unquestioning obedience*) terhadap rantai komando ini adalah wujud nyata dari loyalitas yang terstruktur. Sebagaimana pilar disiplin, studi juga mengonfirmasi bahwa hierarki (bersama dua pilar lainnya) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja prajurit.

Paradoks Hierarki: Loyalitas vs. Adaptabilitas

Meskipun esensial, pilar Hierarki memunculkan sebuah paradoks sentral bagi organisasi militer modern. Di satu sisi, struktur hierarki yang kaku sangat efektif. Hal ini terbukti unggul untuk pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP) karena mampu menciptakan "rantai komando yang terkontrol, efisien dan terstruktur".

Di sisi lain, penelitian akademis juga mengidentifikasi kelemahannya. Organisasi yang sangat mekanistik dan hierarkis "mengalami kesulitan ketika harus beradaptasi dengan lingkungan" yang dinamis. Lebih jauh lagi, struktur ini "cenderung tidak mendorong karyawan berinisiatif untuk berinovasi" karena anggota organisasi "harus mengikuti aturan secara ketat dan melakukan pekerjaan sesuai perintah".

Ini adalah sebuah kontradiksi doktrinal yang nyata. Pimpinan TNI AL, melalui pilar Hierarki, menuntut Loyalitas dan kepatuhan *top-down*. Namun, pada saat yang sama, pimpinan, melalui visi "TNI PRIMA", menuntut prajurit yang "Responsif", "Modern", dan "Adaptif", serta "inovatif". Padahal, hierarki yang kaku justru menghambat inovasi dan adaptasi.

Oleh karena itu, tantangan kepemimpinan modern di TNI AL bukan lagi sekadar menegakkan hierarki,

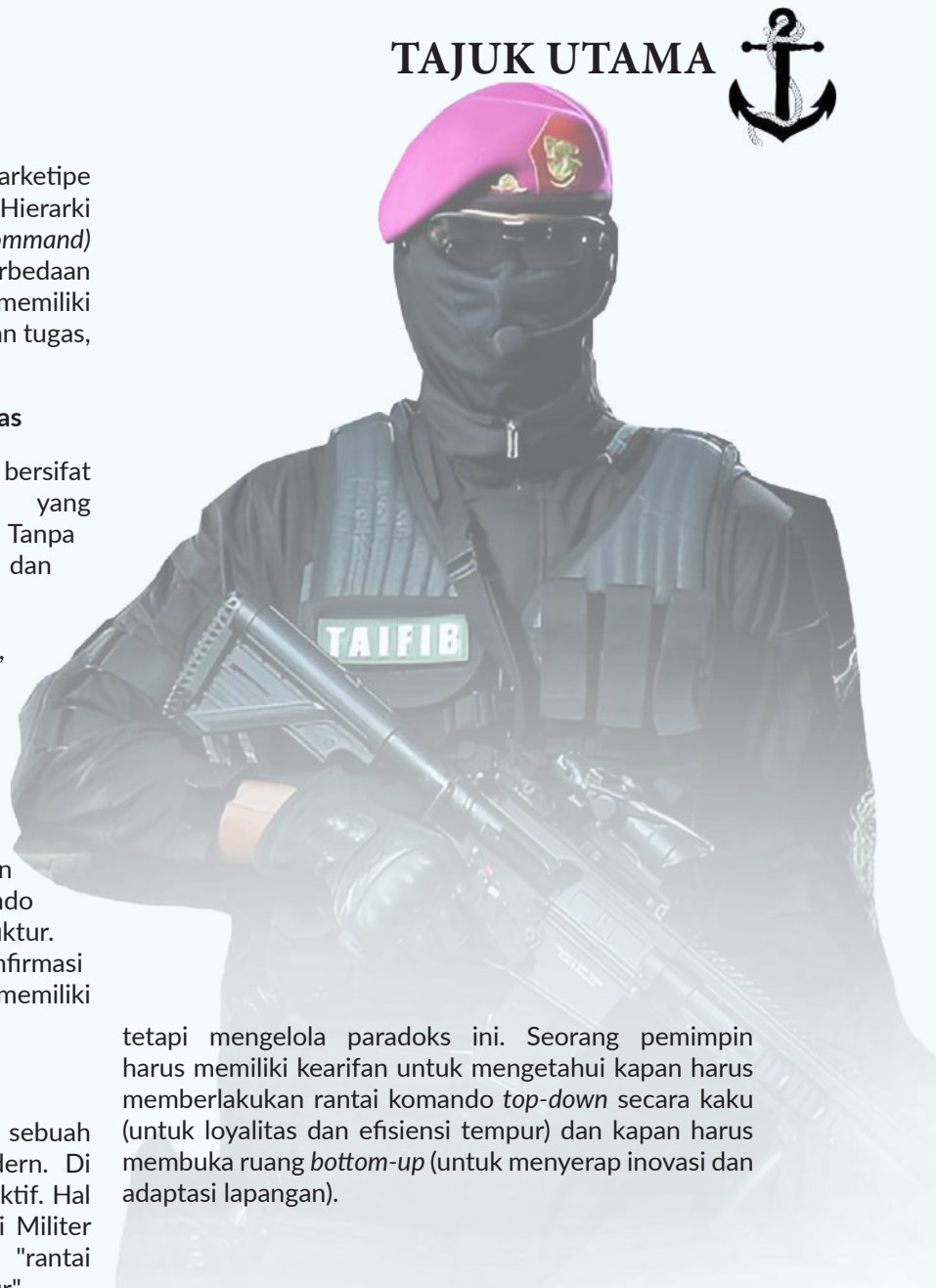
tetapi mengelola paradoks ini. Seorang pemimpin harus memiliki kearifan untuk mengetahui kapan harus memberlakukan rantai komando *top-down* secara kaku (untuk loyalitas dan efisiensi tempur) dan kapan harus membuka ruang *bottom-up* (untuk menyerap inovasi dan adaptasi lapangan).

PILAR KETIGA (KEHORMATAN MILITER): PUNCAK PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS MORAL

Definisi Akademis dan Militer "Kehormatan Militer"

Pilar ketiga dan puncak dari Trisila adalah Kehormatan Militer. Ini adalah konsep yang paling luhur. Secara doktrinal, ia didefinisikan sebagai "predikat tertinggi dan peranan yang dipercayakan kepadanya sebagai perisai Negara". Ini adalah tentang kemuliaan dan kebesaran militer.

Dalam definisi pelaksanaannya, Kehormatan Militer berarti menjaga perbuatan, pengucapan, dan pemikiran agar "tidak menodai nama baik militer", sejalan dengan amanat Peraturan Disiplin Tentara (PP No. 24 tahun 1949). Secara psikologis, prajurit yang menghayati pilar ini akan "memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan" dengan norma dan etika.





TAJUK UTAMA

Analisis Kausal: Sintesis Profesionalisme dan Integritas

Kehormatan Militer adalah titik temu di mana Profesionalisme dan Integritas bersintesis.

1. Hubungan dengan Profesionalisme: Kehormatan Militer adalah manifestasi eksternal dari "jati diri TNI sebagai kekuatan pertahanan negara yang solid, profesional, dan terpercaya". Seorang prajurit tidak dapat disebut profesional jika ia tidak memiliki kehormatan. Profesionalisme teknis, yang didefinisikan sebagai *well trained, well equipment, well managed* dan menguasai iptek, menjadi landasan bagi kehormatan tersebut.

2. Hubungan dengan Integritas: Literatur akademis, baik nasional maupun internasional, menempatkan Integritas (*Integrity*) dan Kehormatan (*Honor*) sebagai "fondasi kepemimpinan militer". Menjaga kehormatan berarti menjaga integritas moral.

Sintesis ini sangat krusial. Profesionalisme teknis tanpa landasan kehormatan (integritas) adalah sebuah konsep

yang berbahaya. Literatur sosiologi militer internasional memberikan peringatan keras mengenai hal ini, salah satunya melalui studi kasus Rudolph Höss, komandan kamp Auschwitz. Höss adalah seorang "profesional" yang "akademis" dalam merancang dan mengeksekusi pembunuhan massal; ia memiliki efisiensi teknis yang tinggi namun sama sekali tidak memiliki integritas dan kehormatan.

Pelajaran ini menunjukkan bahwa TNI AL, yang kini gencar mengejar profesionalisme teknis melalui pengadaan alutsista canggih dan simulator, harus memastikan pengejaran itu diimbangi dengan penghayatan pilar Kehormatan Militer. Kehormatan Militer berfungsi sebagai "rem moral" yang memastikan bahwa Profesionalisme teknis tetap humanis dan sejalan dengan Integritas moral. Kehormatan Militer adalah humanisasi dari profesionalisme militer, yang membedakan seorang prajurit ksatria dari seorang teknisi kekerasan.

Tabel 2: Analisis Kontribusi Trisila terhadap Pembentukan Karakter Prajurit

Tabel menyajikan rangkuman analitis dari seluruh argumen inti, memetakan hubungan kausal antara proses (Trisila) dan hasil (Karakter).

Pilar Trisila TNI AL	Kontribusi Kausatif terhadap Integritas	Kontribusi Kausatif terhadap Loyalitas	Kontribusi Kausatif terhadap Profesionalisme
DISIPLIN	TINGGI. Fondasi utama. Disiplin kerja yang tinggi "menunjukkan integritas" prajurit. Ketaatan pada aturan adalah wujud nyata integritas.	SEDANG. Merupakan prasyarat. Loyalitas tidak mungkin terwujud tanpa disiplin. Namun, disiplin adalah kepatuhan pada <i>aturan</i> , belum tentu pada <i>pimpinan</i> .	TINGGI. Profesionalisme teknis (misal: mengawaki simulator) menuntut disiplin latihan yang ketat dan konsisten.
HIERARKI	SEDANG. Ketaatan pada hierarki adalah bentuk integritas institusional. Namun, fokusnya lebih pada kepatuhan struktural.	TINGGI. Kontribusi utama. Hierarki adalah struktur formal yang "memberi penekanan kuat pada loyalitas" dan dedikasi.	SEDANG. Hierarki menjamin efisiensi profesionalisme dalam OMP. ²¹ Namun, berpotensi menghambat inovasi yang juga dituntut dari profesionalisme modern.
KEHORMATAN MILITER	TINGGI. Fondasi moral. Menuntut "kejujuran, kebenaran, keadilan" (mandat dari Sapta Marga Butir 3) dan menjadi "fondasi kepemimpinan".	TINGGI. Loyalitas tertinggi adalah pada kehormatan, negara, dan konstitusi, melampaui loyalitas buta pada individu.	TINGGI. Manifestasi puncak. Menjadi prajurit "profesional dan terpercaya". Membedakan <i>profesional sejati</i> (beretika) dari <i>teknisi</i> (amoral).



Analisis Hubungan Tiga Pilar dengan Tiga Karakter

Berdasarkan analisis pada Bab 3, 4, dan 5, tesis utama penelitian ini terkonfirmasi melalui pemetaan korelasi kausatif yang jelas antara pilar Trisila (sebagai proses) dan tiga karakter prajurit (sebagai hasil):

1. Disiplin → Integritas: Disiplin adalah ketaatan perilaku yang terukur. Ketika ketaatan ini berhasil diinternalisasi menjadi "kesadaran pengabdian", ia berubah menjadi Integritas. Data empiris mengonfirmasi bahwa disiplin kerja yang tinggi "menunjukkan integritas".
2. Hierarki → Loyalitas: Hierarki adalah struktur organisasi *top-down*. Kepatuhan pada struktur komando ini adalah wujud Loyalitas yang terorganisir dan fungsional. Hierarki adalah "penekanan kuat pada loyalitas".
3. Kehormatan Militer → Profesionalisme (yang Berintegritas): Kehormatan adalah komitmen moral untuk "tidak menodai nama baik". Untuk menjaga nama baik, seorang prajurit harus kompeten (Profesional) dan bermoral (Integritas). Kehormatan Militer adalah puncak dari kedua pilar lainnya; ia adalah profesionalisme yang telah dilandasi oleh disiplin dan integritas.

ANALISIS APLIKATIF: MEKANISME INTERNALISASI TRISILA TNI AL DALAM KEDINASAN

Studi Kasus: "Bulan Trisila TNI AL" sebagai Mekanisme Internalisasi

Penghayatan Trisila TNI AL tidak terjadi secara pasif, melainkan melalui mekanisme aplikatif yang terstruktur dan disengaja oleh pimpinan. Contoh paling komprehensif adalah "Bulan Trisila TNI AL", sebuah agenda rutin tahunan yang dilaksanakan berdasarkan Telegram Kasal. Tujuannya adalah untuk "memantapkan pemahaman dan keyakinan" prajurit terhadap nilai-nilai Trisila.

Selama periode ini, setiap satuan diperintahkan untuk melaksanakan dan meningkatkan "Pembinaan Satuan (Binsat) dan Pembinaan Tradisi (Bintrad)". Metode yang digunakan sangat aplikatif dan mencakup seluruh aspek kedinasan, di antaranya: Jam Komandan, Apel Satuan dan Apel Olahraga, Tugas Divisi Jaga, Pelaksanaan Latihan Peran-peran sesuai PUDD Khas TNI AL, Tradisi Satuan (seperti Yel-yel untuk memupuk kebersamaan) dan Pelaksanaan Peraturan Militer Dasar (Permildas) seperti PPM dan PBB.

Upaya internalisasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga dievaluasi secara serius. Dalam pelaksanaannya, tim penilai dari Mabesal akan mengukur

pemahaman prajurit, salah satunya melalui pengisian kuesioner oleh prajurit dari berbagai strata (Perwira, Bintara, Tamtama).

Implementasi dalam Perintah Harian Sifat Tetap (PHST)

Di luar "Bulan Trisila", nilai-nilai doktrin ini diimplementasikan setiap hari melalui Perintah Harian Sifat Tetap (PHST). Salah satu contoh PHST yang paling jelas adalah Upacara Bendera rutin (setiap hari Senin atau tanggal 17 setiap bulan).

Sebuah Upacara Bendera dapat dianalisis sebagai mikrokosmos dari Trisila yang sedang diaplikasikan secara simultan :

1. Disiplin: Terlihat dari ketaatan pada PBB, ketepatan waktu, kerapian seragam, dan keseragaman gerakan.
2. Hierarki: Terlihat dari struktur barisan yang diatur berdasarkan kepangkatan, prosesi pelaporan komandan upacara kepada inspektur upacara, dan tata cara penghormatan militer.
3. Kehormatan Militer: Terlihat dari sikap khidmat saat penghormatan kepada bendera Merah Putih (simbol negara), pembacaan teks Pancasila dan Sapta Marga. Kegiatan ini secara langsung bertujuan "mempertebal semangat kebangsaan, jiwa nasionalisme dan cinta tanah air", yang merupakan inti dari kehormatan sebagai "perisai Negara".

PHST lain seperti Apel Satuan (pengecekan disiplin personel), Jam Komandan (media komunikasi hierarki), dan Tugas Jaga (manifestasi profesionalisme) adalah bentuk repetisi harian yang dirancang untuk menanamkan ketiga pilar tersebut.

Menjembatani Kesenjangan: Dari Pemahaman ke Penghayatan (Internalisasi)

Analisis ini kembali pada temuan di Bab 3, yakni "Kesenjangan Kepatuhan vs. Internalisasi", di mana prajurit terkadang disiplin hanya karena pengawasan. Mekanisme aplikatif seperti "Bulan Trisila" dan repetisi PHST adalah strategi organisasi yang dapat dianalisis sebagai bentuk *behavioral conditioning* (pembiasaan perilaku).

Tujuan dari pembiasaan ini adalah untuk mengubah kepatuhan yang bersifat ekstrinsik (kepatuhan karena takut hukuman atau mengharap imbalan) menjadi motivasi intrinsik (kepatuhan karena "kesadaran pengabdian"). Penggunaan tradisi seperti yel-yel satuan bukanlah sekadar seremonial, melainkan alat sosiologis untuk membangun jiwa korsa (*esprit de corps*). Jiwa korsa inilah yang mengikat loyalitas prajurit secara emosional, melengkapi ikatan loyalitas struktural (hierarki).

TANTANGAN KONTEMPORER DAN RELEVANSI DOKTRIN DI ERA DIGITAL

Paradoks Modernitas: Tuntutan Profesionalisme vs. Ancaman Disrupsi

Tantangan terbesar implementasi Trisila TNI AL di abad ke-21 adalah paradoks modernitas. Di satu sisi, TNI AL harus modern untuk tetap relevan. Pimpinan tertinggi menuntut penguasaan "ilmu pengetahuan dan teknologi militer terkini". Profesionalisme prajurit diukur dari kemampuannya mengawaki teknologi, seperti *Damage Control Simulator*. Visi "TNI PRIMA" secara eksplisit menuntut prajurit yang "Modern" dan "Adaptif".

Di sisi lain, teknologi yang sama (*internet, gadget, media sosial*) merupakan sumber "dampak negatif" utama yang diidentifikasi pimpinan sebagai penyebab "fenomena penurunan sikap mental" dan pelanggaran etika, seperti judi *online* dan penyalahgunaan medsos. Hal ini adalah paradoks inti (*The Core Paradox*) bagi TNI AL: Keberhasilan di masa depan bergantung pada kemampuan mengadopsi teknologi (untuk Profesionalisme). Namun, adopsi teknologi yang sama secara simultan mengancam pilar Disiplin dan Kehormatan Militer. Oleh karena itu, Trisila TNI AL tidak bisa lagi dimaknai hanya sebagai doktrin tradisional. Ia harus dire-aktualisasi dan difungsikan sebagai *Framework* Etika Digital (*Digital Ethics Framework*) bagi prajurit Jalasena.

Transformasi Pendidikan Militer (SESKOAL)

Sebagai respons terhadap tuntutan globalisasi dan ancaman non-negara (seperti terorisme dan kejahatan lintas negara), TNI AL melakukan transformasi institusi pendidikan militer, khususnya di SESKOAL. Tujuannya adalah untuk menciptakan "militer profesional" dan *scholar soldier* (prajurit cendekia) yang mampu berpikir strategis, bukan hanya taktis.

Dalam konteks ini, SESKOAL dan "Bulan Trisila" dapat dilihat sebagai dua taring dari strategi internalisasi TNI AL. "Bulan Trisila" adalah proses internalisasi *bottom-up* yang menjangkau seluruh prajurit di tingkat satuan. Sementara itu, transformasi SESKOAL adalah proses internalisasi *top-down* yang menjangkau para perwira menengah (calon pemimpin). Mereka dilatih untuk berpikir strategis tentang bagaimana mengimplementasikan dan mengelola doktrin (seperti Trisila) dalam menghadapi konteks globalisasi dan teknologi yang kompleks. Namun, agar efektif, transformasi ini juga harus mengatasi tantangan stigma internal di mana SESKOAL terkadang masih dianggap sebagai tempat bagi perwira *non-job*, sebuah stigma yang menghambat penempatan perwira terbaik di lembaga pendidikan.

Re-aktualisasi Trisila di Era Perang Asimetris dan Digital

Menghadapi tantangan modern, ketiga pilar Trisila menuntut pemaknaan baru yang lebih luas: Pertama, Re-aktualisasi Disiplin: Bukan lagi hanya disiplin PBB atau apel pagi, tetapi berkembang menjadi disiplin informasi (tidak membocorkan rahasia negara di media sosial) dan disiplin finansial (menjauhi jerat pinjaman dan judi *online* yang merusak kehormatan). Kedua, Re-aktualisasi Hierarki: Bukan lagi sekadar ketaatan *top-down* yang kaku, tetapi kemampuan *leadership* untuk mengelola paradoks antara hierarki (untuk loyalitas tempur) dan kebutuhan untuk adaptif serta inovatif (tuntutan TNI PRIMA). Ketiga, Re-aktualisasi Kehormatan Militer: Berfungsi sebagai jangkar moral yang menjaga integritas prajurit saat berinteraksi dengan teknologi canggih dan menghadapi perang informasi (disrupsi).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sintesis dan Proyeksi Prajurit Jalasena yang Paripurna

Analisis akademis dan aplikatif dalam laporan ini telah membuktikan tesis utama. Sapta Marga, sebagai doktrin filosofis induk etika TNI, berhasil di-operasionalkan dan diturunkan secara koheren ke dalam konteks matra laut melalui tiga pilar Trisila TNI AL (Disiplin, Hierarki, Kehormatan Militer). Keterkaitan ini paling eksplisit terlihat pada butir kelima Sapta Marga.

Penelitian ini juga telah memetakan hubungan kausalitas antara proses (Trisila) dan hasil (Karakter) yang dituju:


1. Disiplin terbukti secara empiris berfungsi sebagai fondasi dan inkubator bagi Integritas.
2. Hierarki terbukti secara sosiologis berfungsi sebagai struktur formal yang mengikat dan mengarahkan Loyalitas.
3. Kehormatan Militer terbukti secara doktrinal berfungsi sebagai sintesis puncak, yang memastikan Profesionalisme teknis tetap dilandasi oleh Integritas moral.

Internalisasi doktrin ini tidak terjadi secara pasif, melainkan melalui mekanisme aplikatif yang terstruktur, repetitif, dan terukur, seperti Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) dan program khusus "Bulan Trisila TNI AL".

Rekomendasi Aplikatif dan Proyeksi

Berdasarkan analisis tantangan dan kesenjangan yang ada, berikut adalah tiga rekomendasi aplikatif untuk memperkuat penghayatan Trisila TNI AL di masa depan:

1. Mengintegrasikan Trisila dalam Manajemen Kinerja. Penghayatan Trisila harus bergeser dari fokus seremonial ke integrasi penuh dalam sistem evaluasi kinerja dan



promosi. Pimpinan harus secara aktif mencari dan memberi penghargaan kepada prajurit dan perwira yang mampu mengelola paradoks hierarki-inovasi—yakni mereka yang tetap loyal pada rantai komando namun proaktif memberikan masukan inovatif dan adaptif.

2. Mengajarkan "Etika Digital" dan "Manajemen Paradoks" di Lembaga Pendidikan. Kurikulum pendidikan TNI AL, terutama di tingkat perwira menengah (SESKOAL), harus secara eksplisit mengajarkan manajemen paradoks (Hierarki vs. Adaptabilitas) dan etika digital sebagai penjabaran modern dari Trisila. Ini penting untuk membekali pemimpin masa depan dalam menghadapi ancaman penurunan mental akibat teknologi.

3. Mengatasi Kesenjangan Internalisasi melalui Kepemimpinan Dialogis. Untuk mengatasi kesenjangan antara disiplin-karena-pengawasan dan disiplin-karena-

kesadaran, peran Jam Komandan harus diperkuat. Ia tidak boleh hanya menjadi media instruksi *top-down*, tetapi harus menjadi media komunikasi dialogis untuk memahami masalah prajurit di lapangan, sehingga internalisasi (penghayatan) dapat tumbuh dari pemahaman, bukan paksaan.

Penghayatan Trisila TNI AL, Disiplin, Hierarki, dan Kehormatan Militer, bukan hanya sekadar upaya melestarikan tradisi luhur. Lebih dari itu, ia adalah strategi organisasi yang krusial dan dinamis untuk menjaga relevansi, ketangguhan, dan superioritas prajurit Jasasena di abad ke-21. Prajurit yang berintegritas, loyal, dan profesional, yang jiwanya ditempa oleh Sapta Marga dan raganya dibentuk oleh Trisila, adalah senjata utama (alutsista) yang paling fundamental bagi TNI AL dalam mengawal kedaulatan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia. ©



Kodiklatal sebagai Kawah Candradimuka:

INTERNALISASI TRISILA DAN SAPTA MARGA DALAM MEMBANGUN PRAJURIT PEJUANG MATRA LAUT YANG PROFESIONAL

Oleh: Letkol Laut (K/W) Ririn Lestariningsih, S.E., M.M.

Di tengah dinamika geopolitik dan kompleksitas tugas negeri maritim seperti Indonesia, TNI Angkatan Laut tidak sekadar membutuhkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang modern, tetapi terlebih lagi prajurit yang memiliki karakter kuat, yaitu prajurit yang mempunyai integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Proses pembentukan karakter tersebut berawal dari pendidikan dan latihan yang sistematis, yakni tempat di mana nilai-nilai luhur seperti Trisila TNI AL dan Sapta Marga dapat diinternalisasi secara mendalam.

Kodiklatal (Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut) menempati posisi strategis sebagai kawah candradimuka yang membentuk mental, fisik, dan intelektual prajurit matra laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi TNI AL dengan optimal. Artikel ini menguraikan bagaimana mekanisme internalisasi Trisila dan implementasi Sapta Marga dilaksanakan di lingkungan Kodiklatal, serta bagaimana proses tersebut konkret mendukung tugas pokok Kodiklatal dalam upaya menyediakan prajurit yang tidak hanya cekatan secara teknis, tetapi juga teguh secara moral dan etis. Contoh praktik terbaik, tantangan



implementasi, dan rekomendasi operasional disajikan untuk memberi gambaran yang aplikatif bagi pembaca, khususnya pelaku pendidikan militer dan pembuat kebijakan di lingkungan TNI AL.

KODIKLATAL: FUNGSI, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS PEMBENTUKAN PRAJURIT

Kodiklatal diberi mandat untuk menyelenggarakan pembinaan doktrin, pendidikan, latihan, dan pengkajian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Fungsi ini menjadikan Kodiklatal sebagai pusat rujukan bagi standar kompetensi, sikap, dan perilaku prajurit angkatan laut.

Dari pendidikan dasar hingga pendidikan pengembangan, Kodiklatal merancang kurikulum yang tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan mental dan moral prajurit melalui penanaman nilai-nilai dasar TNI.

Sebagai institusi pendidikan militer terbesar dan terpadu di lingkungan TNI AL, Kodiklatal menanggung beban strategis: memastikan bahwa setiap lulusan yang keluar dari lembaga pendidikan dan pelatihan tidak sekadar mampu mengoperasikan sistem dan menjalankan prosedur, tetapi juga memahami akar filosofis tugas mereka sebagai abdi negara. Hal ini relevan dengan pergeseran ancaman dari tradisional ke non tradisional; prajurit modern dituntut untuk adaptif, kritis, dan tetap berpegang pada norma-norma etika militer.

TRISILA DAN SAPTA MARGA: DUA PILAR BATIN YANG SALING MENGUATKAN

Trisila TNI AL yang mengandung nilai-nilai disiplin, hierarki (sikap ketaatan terhadap rantai komando), dan profesionalisme merupakan pedoman khas matra laut yang melekat pada budaya korps. Trisila berfungsi sebagai nafas prajurit matra laut, menjadi dasar pola pikir dan pola tindak dalam menghadapi medan operasi yang unik dan berisiko.

Sementara itu, Sapta Marga menjadi sumpah dan ikrar yang mengikat setiap prajurit TNI sebagai bagian dari identitas kebangsaan dan pengabdian kepada negara. Nilai-nilai Sapta Marga seperti pengabdian kepada negara, kesetiaan kepada Pancasila, dan menjunjung tinggi kehormatan, meneguhkan dimensi moral dan patriotik yang tidak bisa tergantikan oleh kemampuan teknis semata.

Ketika Trisila menjadi pedoman hidup profesional di lingkungan tugas matra laut, Sapta Marga menempatkan landasan moral yang lebih luas: loyalitas pada negara dan pimpinan, kesanggupan berkorban, dan etika prajurit. Integrasi kedua pilar ini memberi arti bahwa prajurit yang disiplin dan kompeten (Trisila) juga harus berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan sumpah pengabdian (Sapta Marga).

Mekanisme Internalisasi di Kodiklatal: Kurikulum, Praktik, dan Kebiasaan

1. Desain Kurikulum yang Berlapis

Kodiklatal merancang pendidikan secara bertahap dari pendidikan dasar (yang menanamkan disiplin, kebiasaan, dan identitas prajurit) hingga pendidikan pengembangan dan spesialisasi (yang mengasah keterampilan teknis dan *soft skills*). Setiap jenjang pendidikan memasukkan modul-modul nilai (*civic military education*) yang secara eksplisit membahas Trisila dan Sapta Marga, serta studi kasus etika militer. Dengan demikian, internalisasi bukan kegiatan sekali jadi, melainkan proses berulang dan berkembang. kodiklatal.tnial.mil.id

2. Latihan Berbasis Skenario dan Simulasi

Penghayatan nilai diuji melalui latihan yang menempatkan prajurit pada situasi nyata: keputusan sulit di laut, evakuasi massal, operasi SAR, maupun operasi keamanan laut. Dalam kondisi tekanan tinggi, pembiasaan pada disiplin, kepatuhan rantai komando, dan profesionalisme akan tampak nyata dan disaat itulah saat nilai-nilai Trisila dan Sapta Marga diuji dan diperkuat.

3. Kepemimpinan Teladan (*Leadership by Example*)

Di lingkungan pendidikan militer, peran instruktur dan komandan sangat krusial. Kepemimpinan yang memberi contoh integritas, kejujuran, dan loyalitas mempercepat proses internalisasi. Kodiklatal menempatkan instruktur yang tidak hanya kompeten teknis tetapi juga memiliki rekam jejak moral yang kuat sehingga menjadi figur panutan bagi taruna dan siswa.

4. Ritual, Pembacaan Ikrar, dan Pembelajaran Historis

Tradisi seperti pembacaan Sapta Marga, upacara sumpah prajurit, dan pengenalan sejarah korps memperkuat rasa kebersamaan dan identitas. Ritual-ritual ini bukan seremonial kosong terutama bila dikaitkan dengan refleksi kritis (mengapa nilai itu penting hari ini), maka maknanya menjadi hidup dan relevan bagi generasi muda prajurit.





5. Penilaian Sikap dan Evaluasi Berkelanjutan

Selain ujian akademik dan uji keterampilan, Kodiklatal menerapkan evaluasi sikap: bagaimana seorang prajurit menunjukkan integritas, loyalitas pada komandannya, dan profesionalisme dalam tugas sehari-hari. Hasil evaluasi ini menjadi bahan umpan balik dan pengembangan karier, sehingga nilai moral berperan nyata dalam karier prajurit.

Kaitan Langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kodiklatal

Menegaskan kembali fungsi Kodiklatal: menyelenggarakan pembinaan doktrin, pendidikan, latihan, dan pengkajian. Internalisasi Trisila dan Sapta Marga adalah bagian tidak terpisahkan dari pembinaan doktrin dan pendidikan tersebut. Tanpa internalisasi nilai, doktrin hanya akan menjadi teori; latihan hanya melahirkan keterampilan tanpa tanggung jawab moral. Oleh karena itu, Kodiklatal tidak sekadar memproduksi personel yang “mampu”, tetapi juga “layak” yaitu layak memegang amanah negara di laut yang menuntut keputusan cepat dan teguh.

PERAN KODIKLATAL DALAM PEMBINAAN DOKTRIN, PENDIDIKAN, LATIHAN, DAN PENGAJIAN

Kodiklatal memiliki mandat strategis sebagai lembaga pembina doktrin, pendidikan, latihan, dan pengkajian di lingkungan TNI AL. Fungsi tersebut menempatkan Kodiklatal pada posisi sentral dalam memastikan kesinambungan kualitas sumber daya manusia matra laut. Pembinaan doktrin dilaksanakan untuk menetapkan, menyempurnakan, dan menyosialisasikan landasan berpikir, bertindak, serta bertempur bagi seluruh prajurit TNI AL. Doktrin bukan hanya sekumpulan pedoman teknis-operasional, tetapi juga fondasi normatif yang menegaskan identitas prajurit. Dalam konteks inilah, nilai-nilai Sapta Marga dan Trisila TNI AL melekat erat sebagai ruh yang memberi arah moral bagi setiap produk doktrin.

Di sisi lain, fungsi pendidikan yang dijalankan Kodiklatal berorientasi pada pembentukan kompetensi akademik, profesional, dan karakter. Pendidikan tidak hanya menghasilkan kemampuan intelektual dan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan mental dan kepribadian prajurit matra laut. Berbagai program pendidikan di Kodiklatal pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan prajurit yang tidak sekadar menguasai ilmu kelautan, teknologi militer, maupun taktik operasi laut, tetapi juga memiliki keteguhan moral. Ini menegaskan bahwa

proses internalisasi nilai tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan itu sendiri.

INTERNALISASI NILAI SEBAGAI KOMPONEN PEMBINAAN DOKTRIN

Pada dasarnya, internalisasi Trisila dan Sapta Marga merupakan inti dari pembinaan doktrin. Doktrin yang disusun tanpa penguatan nilai moral hanya akan menghasilkan petunjuk teknis yang kering dari dimensi kemanusiaan dan etika keprajuritan. Trisila TNI AL (Disiplin, Hierarki dan Kehormatan Militer) memandu prajurit agar tidak hanya “tahu apa yang harus dilakukan”, tetapi juga “mengapa itu harus dilakukan dengan benar”. Begitu pula Sapta Marga, yang menjadi kompas moral dalam menjunjung kehormatan bangsa, menegakkan disiplin, serta menjaga kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembinaan doktrin, nilai-nilai ini diterjemahkan ke dalam prinsip operasional, konsep kepemimpinan, dan aturan bertindak dalam berbagai situasi dinamis di laut. Doktrin operasi laut, misalnya, tidak hanya mengatur penggunaan kekuatan, tetapi juga memuat spirit kesetiaan terhadap tugas, keberanian dalam menghadapi ancaman, serta tanggung jawab moral dalam melindungi kepentingan negara. Dengan demikian, doktrin yang diterapkan Kodiklatal menjadi perpaduan harmonis antara tuntutan teknis dan substansi etis yang membentuk karakter prajurit.

PENDIDIKAN SEBAGAI MEDIA PENANAMAN NILAI KEPRAJURITAN

Pendidikan di Kodiklatal berfungsi sebagai wahana strategis untuk menanamkan nilai-nilai Trisila dan Sapta Marga secara sistemik dan berkelanjutan. Proses pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui *role model* instruktur, suasana kesatrian, disiplin keseharian, dan kegiatan pembiasaan moral. Pembentukan karakter secara konsisten melalui kurikulum, kegiatan harian, serta pelatihan lapangan menjadikan internalisasi nilai berlangsung secara natural dan tidak dipaksakan.

Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk identitas prajurit matra laut. Keberanian, kesetiaan, integritas, dan profesionalisme dipupuk melalui pengalaman nyata, interaksi dengan instruktur, serta situasi pembelajaran yang menuntut kedisiplinan. Dengan demikian, lulusan Kodiklatal bukan



TAJUK UTAMA

hanya ahli dalam bidang teknis, tetapi juga mewarisi nilai-nilai luhur yang menjadi inti karakter seorang prajurit TNI AL.

LATIHAN SEBAGAI PEMBUKTIAN NILAI DALAM AKSI

Latihan merupakan tahap krusial di mana nilai-nilai yang telah ditanamkan melalui pendidikan diuji dalam situasi mendekati realitas operasi. Tanpa internalisasi nilai, latihan hanya akan menghasilkan keterampilan mekanis tanpa arah moral. Padahal, tugas seorang prajurit TNI AL di laut menuntut ketepatan pengambilan keputusan, keberanian dalam risiko tinggi, serta keteguhan sikap dalam menghadapi ketidakpastian.

Melalui latihan yang dirancang dengan memperhatikan dimensi nilai, prajurit dibiasakan untuk tidak hanya bertindak cepat dan tepat, tetapi juga bertindak benar. Ketika prajurit memegang kendali kapal, mengoperasikan senjata, atau menjalankan misi penyelamatan, nilai-nilai Sapta Marga dan Trisila menjadi landasan mental yang memberi arah. Dengan demikian, Kodiklatal memastikan bahwa latihan tidak hanya menghasilkan kemampuan operasional, tetapi juga meneguhkan karakter dan etika profesional seorang prajurit laut.

IMPLIKASI ETIS: PRAJURIT YANG “MAMPU” DAN “LAYAK”

Kodiklatal tidak hanya berfungsi mencetak prajurit yang “mampu”, tetapi juga “layak”. Prajurit yang mampu adalah mereka yang menguasai pengetahuan dan keterampilan teknis secara memadai. Namun, prajurit yang layak adalah sosok yang memegang amanah moral dan tanggung jawab etis dalam menjalankan tugas negara di laut. Amanah tersebut menuntut kompetensi, integritas, loyalitas, dan keberanian moral, karakter yang hanya terbentuk melalui internalisasi nilai secara konsisten.

Lingkungan laut membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis nilai. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal, baik bagi keselamatan awak, keberhasilan misi, maupun kehormatan institusi. Oleh karena itu, internalisasi Trisila dan Sapta Marga bukan sekadar elemen tambahan, tetapi fondasi esensial yang memastikan setiap prajurit tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki kompas moral yang kuat. Kodiklatal, sebagai “kawah candradimuka”, memiliki tanggung jawab strategis untuk menyiapkan prajurit yang unggul secara menyeluruh—baik secara kemampuan maupun kelayakan etis.

Dampak Positif Internalisasi: Integritas, Loyalitas, Profesionalisme

1. Integritas

Integritas berarti konsistensi antara kata dan perbuatan. Prajurit yang dilatih di Kodiklatal diajarkan bahwa profesionalisme tanpa integritas menjadi berbahaya; keputusan teknis harus dibarengi tanggung jawab moral, termasuk transparansi dalam pelaporan dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya.

2. Loyalitas

Loyalitas bukan sekadar ketaatan kaku, melainkan komitmen pada konstitusi, pimpinan yang sah, dan kode etik militer. Melalui pendidikan moral dan sejarah, prajurit memahami bahwa loyalitas yang benar adalah loyalitas yang berpijak pada Pancasila dan Sapta Marga, bukan sekadar loyalitas pada individu semata.

3. Profesionalisme

Profesionalisme di laut menuntut kesiapan teknis tinggi, kecermatan prosedur, dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan kewajaran. Kodiklatal mengembangkan pelatihan yang memadukan *hard skills* (navigasi, taktik, teknis kapal) dengan *soft skills* (komunikasi, manajemen krisis) agar prajurit mampu bertindak dengan ketepatan dan kehormatan.

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI

Walaupun kerangka sudah jelas, tantangan tak dapat diabaikan, yang dapat terurai sebagai berikut:

- Kejujuran Kurikulum:** Beban materi teknis yang padat kadang membuat modul nilai terasa “di sela-sela” kegiatan. Perlu integrasi nilai ke dalam tiap mata pelajaran sehingga bukan sekadar tambahan.
- Praktik Budaya di Lapangan:** Nilai yang diajarkan di pangkalan bisa terkikis oleh tekanan operasional di lapangan, tekanan politik, atau godaan koruptif. Mekanisme pengawasan dan budaya pelaporan harus selalu hidup.
- Kualitas Instruktur:** Tidak semua instruktur memiliki kemampuan pedagogik untuk menginternalisasikan nilai. Pelatihan instruktur (*Applied Approach, train-the-trainer*) sudah menjadi keharusan.
- Kritik Sosial dan Modernisasi:** Era digital mempercepat arus informasi yang dapat menantang stigma militer tradisional. Kodiklatal harus adaptif dalam membangun nilai yang relevan tanpa kehilangan esensi luhur.



KODIKLATAL BUKAN SEKADAR LEMBAGA PENDIDIKAN, MELAINKAN LEBIH SEBAGAI BENTENG MORAL PRAJURIT MATRA LAUT

Kodiklatal berperan sentral sebagai kawah candradimuka yang membentuk prajurit pejuang matra laut. Ketika doktrin, pendidikan, dan latihan dirancang untuk menginternalisasi Trisila dan Sapta Marga secara konsisten, hasilnya bukan hanya prajurit yang mampu mengoperasikan kapal atau teknologi mutakhir,

tetapi prajurit yang dapat diandalkan: jujur, setia pada konstitusi, dan profesional dalam tugas.

Di era yang menuntut respons cepat dan keteguhan moral, Kodiklatal harus terus menguatkan perannya dengan mengintegrasikan nilai ke dalam setiap detik proses pendidikan sehingga kelak setiap prajurit yang bertugas di laut membawa nama baik bangsa tidak hanya melalui kemampuan, tetapi terutama melalui integritas dan kehormatan.©



MENEGUHKAN SAPTA MARGA DAN TRISILA TNI AL DI ERA DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN PRAJURIT MATRA LAUT YANG BERINTEGRITAS, LOYAL DAN PROFESIONAL

Oleh: Kolonel Mar Kakung Priyambodo, S.T., M.Han.

LAUT TIDAK PERNAH TIDUR, BEGITU JUGA PRAJURITNYA

Dunia berubah lebih cepat daripada pergantian gelombang di Selat Malaka. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, serta ancaman maritim modern menciptakan medan juang baru: sunyi, tak terlihat, dan berlangsung dalam hitungan detik. Di sinilah Prajurit Matra Laut beroperasi di ruang yang tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kecerdasan moral.

Dalam pusaran transformasi global itu, Sapta Marga dan Trisila TNI AL tidak hanya berfungsi sebagai pedoman klasik, tetapi telah berubah menjadi *core values* dan *guiding spirit* yang menjaga arah kompas prajurit agar tidak tersesat oleh derasnya arus digital.

Era digital menawarkan kekuatan luar biasa, tetapi juga godaan besar: manipulasi data, kebocoran informasi, propaganda siber, hingga perang opini publik. Prajurit yang tidak dibentengi nilai akan mudah terombang-ambing. Maka artikel ini hadir untuk menjawab satu kebutuhan strategis:

Bagaimana prajurit matra laut tetap setia pada nilai luhur sapta marga dan Trisila TNI AL namun sekaligus unggul dalam teknologi modern?

SAPTA MARGA: ENERGI MORAL YANG TIDAK PERNAH KADALUARSA

Sapta Marga bukan hanya sumpah, tetapi energi moral yang diwariskan dari satu generasi prajurit ke generasi berikutnya. Ia memadukan unsur cinta tanah air, keberanian, kesetiaan, kehormatan, dan rasa tanggung jawab.

Nilai Strategis Sapta Marga di Era Digital

1. Keteguhan: Di dunia yang penuh disinformasi, prajurit membutuhkan kompas moral agar mampu memilah kebenaran dari kebohongan.
2. Keberanian Non-Fisik: Selain keberanian di medan operasi laut, prajurit kini harus memiliki keberanian menghadapi ancaman siber dan tekanan digital.
3. Kesetiaan Berbasis Pengetahuan: Loyalitas zaman ini bukan hanya emosional, tetapi juga membutuhkan literasi digital agar tidak terseret manipulasi informasi

Sapta Marga tidak berubah, tetapi cara menghayatinya harus disesuaikan dengan ancaman modern.

TRISILA TNI AL: PONDASI KARAKTER PRAJURIT LAUT ERA TEKNOLOGI TINGGI

Trisila adalah tiga nafas kehidupan prajurit Matra Laut: Disiplin, Hierarki, dan Kehormatan Militer. Kini, ketiganya memasuki dimensi baru:

Disiplin Digital: Ini bukan lagi sekadar disiplin barak, tetapi termasuk:

- Disiplin informasi *sensitive*: adalah kemampuan prajurit untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan setiap data penting secara tepat, aman, dan bertanggung jawab. Setiap informasi yang bernilai strategis harus disaring sebelum dibagikan, karena kelalaian sekecil apa pun dapat berdampak pada keamanan satuan maupun negara. Dengan disiplin yang kuat, prajurit mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah kebocoran informasi dan menjaga keunggulan operasional.



- Disiplin bermedia sosial: adalah kemampuan untuk menggunakan platform digital secara bijak, terukur, dan bertanggung jawab tanpa merugikan diri, satuan, maupun institusi. Setiap unggahan, komentar, dan interaksi harus dipertimbangkan dampaknya, karena jejak digital dapat memengaruhi citra dan keamanan. Dengan disiplin yang baik, prajurit mampu menjaga kehormatan jati diri serta menghindari provokasi, hoaks, dan penyalahgunaan informasi.

- Disiplin menjaga jejak digital satuan: adalah komitmen prajurit untuk memastikan setiap aktivitas daring tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan, kehormatan, dan kerahasiaan institusi. Setiap konten, foto, maupun data yang terkait satuan harus melalui pertimbangan keamanan sebelum dipublikasikan agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan disiplin yang kuat, jejak digital satuan tetap bersih, terjaga, dan mencerminkan profesionalisme prajurit Matra Laut.

- Disiplin keamanan siber: adalah kemampuan prajurit untuk melindungi sistem, data, dan jaringan dari ancaman digital melalui perilaku yang aman dan terkontrol. Setiap akses, penggunaan perangkat, maupun pertukaran informasi harus mengikuti prosedur keamanan untuk mencegah peretasan, malware, atau penyusupan. Dengan disiplin yang konsisten, prajurit mampu menjaga keandalan operasi dan melindungi aset strategis satuan di era teknologi yang semakin kompleks.

Kesalahan satu klik dapat membahayakan operasi.

Hierarki dalam Sistem Pertahanan Modern: Hierarki sekarang terintegrasi dalam:

- Sistem komando digital: adalah mekanisme kepemimpinan dan pengendalian operasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat alur komunikasi dan pengambilan keputusan. Melalui integrasi data *real-time*, setiap unsur dapat menerima perintah secara cepat, akurat, dan terukur sehingga efektivitas operasi meningkat signifikan. Dengan sistem komando digital yang andal, satuan mampu bergerak lebih adaptif, responsif, dan unggul dalam menghadapi dinamika medan tugas modern.

- Jaringan sensor laut: adalah sistem pemantauan yang terdiri dari berbagai perangkat deteksi bawah air untuk mengamati pergerakan, kondisi lingkungan, dan ancaman di wilayah maritim. Melalui integrasi sensor akustik, radar, hingga drone laut, informasi penting dapat dikumpulkan secara *real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan operasi. Dengan jaringan sensor laut yang kuat, TNI AL mampu meningkatkan

kewaspadaan, menjaga kedaulatan perairan, dan merespons ancaman secara cepat dan presisi.

- Sistem satelit: adalah infrastruktur teknologi luar angkasa yang menyediakan layanan komunikasi, navigasi, dan penginderaan jauh secara luas dan berkelanjutan. Melalui satelit, data strategis dapat dikirim, diterima, dan dipantau secara *real-time* untuk mendukung operasi maritim, pemetaan, maupun keamanan nasional. Dengan sistem satelit yang andal, prajurit mampu meningkatkan ketepatan informasi, efektivitas komando, serta keunggulan dalam pengawasan wilayah.

- Pusat komando C4ISR: adalah pusat kendali strategis yang mengintegrasikan *command, control, communications, computers, intelligence, surveillance*, dan *reconnaissance* untuk memastikan operasi berjalan terpadu dan presisi. Melalui sistem informasi *real-time*, pusat ini mampu menyajikan gambaran situasi medan secara komprehensif sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan akurat. Dengan Pusat Komando C4ISR yang modern, kekuatan TNI AL menjadi lebih responsif, adaptif, dan unggul dalam menghadapi ancaman multidimensi.

Tanpa mental hierarki yang solid, teknologi secanggih apa pun tidak dapat mengeksekusi misi dengan tepat.

Kehormatan Militer 4.0: Kehormatan bukan hanya urusan parade atau baret, tetapi juga:

- Bagaimana prajurit berperilaku di dunia maya: Prajurit harus berperilaku di dunia maya dengan menjaga etika, kehormatan, dan keamanan informasi sebagaimana mereka menjaga disiplin di dunia nyata. Setiap aktivitas digital, mulai dari unggahan, komentar, hingga interaksi, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap citra pribadi, satuan, dan institusi. Dengan perilaku yang bijak dan terarah, prajurit menjadi teladan digital yang mampu menjaga marwah dan keamanan negara di ruang siber.

- Bagaimana menjaga citra TNI AL: Menjaga citra TNI AL berarti menunjukkan sikap, tindakan, dan profesionalisme yang mencerminkan kehormatan prajurit Matra Laut di setiap kesempatan. Setiap prajurit harus bertutur, bersikap, dan bertindak secara disiplin, bermoral, dan sesuai aturan, baik di lingkungan dinas maupun di ruang publik dan digital. Dengan integritas dan keteladanan, citra TNI AL akan tetap kuat, dipercaya rakyat, dan dihormati di tingkat nasional maupun internasional.

- Bagaimana menghormati warisan maritim Nusantara: Menghormati warisan maritim Nusantara berarti memahami kejayaan leluhur sebagai bangsa



TAJUK UTAMA

pelaut yang tangguh, kemudian menjadikannya inspirasi dalam pengabdian sebagai prajurit Matra Laut. Setiap tradisi, nilai bahari, dan kearifan lokal harus dirawat serta diwariskan untuk memperkuat jati diri maritim Indonesia. Dengan menjaga warisan ini, prajurit turut membangun kebanggaan nasional dan memperkuat visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kehormatan merupakan tameng moral prajurit dari godaan era digital.

REVOLUSI 5.0 DI LAUT: TANTANGAN NYATA PRAJURIT MATRA LAUT

a. *Cyber Maritime Warfare*: Perang kini tidak lagi selalu berbenturan fisik. Ada perang sunyi:

- **Peretasan Pelabuhan:** Peretasan pelabuhan adalah ancaman siber yang menasar sistem navigasi, logistik, atau operasi pelabuhan sehingga dapat mengganggu keamanan dan kelancaran arus maritim. Oleh karena itu, penguatan keamanan digital menjadi kunci untuk mencegah sabotase yang berpotensi melumpuhkan rantai pasok dan aktivitas strategis di kawasan Pelabuhan
- **Manipulasi GPS kapal:** upaya mengubah atau menyesatkan posisi navigasi sehingga kapal dapat diarahkan keluar jalur atau dimanfaatkan untuk tindakan ilegal. Ancaman ini menuntut peningkatan kewaspadaan serta penggunaan sistem navigasi berlapis untuk memastikan akurasi dan keamanan pergerakan kapal.
- **Serangan terhadap radar:** upaya mengganggu atau menyesatkan sistem deteksi dan pemantauan sehingga kemampuan radar dalam membaca objek menjadi tidak akurat. Untuk mencegahnya, diperlukan proteksi elektronik dan perangkat anti-jamming yang mampu menjaga keandalan radar dalam kondisi ancaman.
- **Pencurian data operasi:** tindakan mendapatkan informasi misi, rencana, atau pola pergerakan satuan secara ilegal untuk melemahkan keamanan dan efektivitas operasi. Ancaman ini hanya dapat dicegah melalui pengamanan sistem, disiplin informasi, dan kontrol akses yang ketat.

Ancaman maritim 5.0 adalah ancaman tak kasat mata.

b. *Autonomous Naval Systems*: Dunia maritim memasuki era kapal tanpa awak (USV) dan drone laut. Prajurit harus memahami:

- **Sensor bawah laut:** Prajurit harus mampu mengoperasikan dan memantau sensor bawah laut

yang mendeteksi pergerakan kapal, objek, dan kondisi lingkungan laut. Data yang dihasilkan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam operasi kapal tanpa awak dan drone laut.

- **AI-decision system:** Sistem AI membantu prajurit menganalisis data secara cepat untuk menentukan taktik dan strategi operasi. Pemahaman terhadap *AI-decision system* memungkinkan prajurit memanfaatkan kecerdasan buatan secara efektif dan aman.

- **Data fusion:** Prajurit harus mampu menggabungkan informasi dari berbagai sensor, drone, dan sumber data lain untuk mendapatkan gambaran situasi yang komprehensif. Kemampuan data fusion meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan respons terhadap ancaman secara cepat.

c. *Perang Informasi*: Opini publik kini menjadi arena perang. Prajurit harus melek:

- **Kontra-propaganda:** Prajurit harus mampu mengenali dan menanggapi propaganda yang dapat merusak citra satuan atau memengaruhi opini publik. Tindakan kontra-propaganda yang cepat dan tepat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL.
- **Kontra-disinformasi:** Setiap informasi yang salah atau menyesatkan harus dideteksi dan diluruskan sebelum berdampak negatif. Prajurit yang melek kontra-disinformasi memastikan integritas data dan keamanan operasi tetap terjaga.

- **Keamanan komunikasi:** Komunikasi digital harus terlindungi dari penyadapan, gangguan, atau manipulasi pihak luar. Dengan keamanan komunikasi yang ketat, prajurit dapat menyampaikan perintah dan koordinasi tanpa risiko kebocoran informasi.

d. *Weapon System Integration*: Operasi laut modern membutuhkan kemampuan membaca:

- **Big data sensor:** Prajurit harus mampu menganalisis dan menginterpretasikan data besar dari berbagai sensor untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Pemahaman ini memungkinkan deteksi ancaman lebih cepat dan akurat di medan laut.
- **Radar multi-layer:** Kemampuan membaca radar multi-layer membantu prajurit mengidentifikasi target di berbagai ketinggian dan jarak. Integrasi informasi radar meningkatkan efektivitas pertahanan dan kesiapan taktis satuan.



- Sistem rudal presisi: Prajurit harus memahami operasi sistem rudal yang dapat menyerang target dengan akurasi tinggi. Penguasaan ini penting untuk memastikan penggunaan senjata secara efektif dan aman dalam misi strategis.
- Satelit navigasi: Prajurit memanfaatkan satelit navigasi untuk menentukan posisi, merencanakan rute, dan mendukung operasi maritim secara presisi. Keandalan sistem ini menjadi kunci keberhasilan operasi di perairan luas dan kompleks.

Prajurit tanpa kompetensi digital tidak akan relevan.

IMPLEMENTASI SAPTA MARGA MELALUI TRISILA: STRATEGI PEMBENTUKAN PRAJURIT 4.0

a. Membangun Integritas Digital: Integritas kini mencakup:

- Anti-hoaks: Prajurit wajib memastikan setiap informasi yang diterima dan disebarkan telah diverifikasi agar tidak menjadi bagian dari penyebaran hoaks yang merugikan satuan. Ketelitian dalam memilah informasi menjadi wujud profesionalisme dan tanggung jawab digital.
- Tidak membocorkan data operasi: Setiap data operasi adalah aset strategis yang harus dijaga kerahasiaannya demi keselamatan personel dan keberhasilan misi. Kebocoran sekecil apa pun dapat dimanfaatkan lawan untuk melemahkan kekuatan satuan.
- Tidak menyalahgunakan sistem: Prajurit harus menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan jaringan satuan hanya untuk kepentingan kedinasan sesuai aturan yang berlaku. Penyalahgunaan sistem dapat menimbulkan celah keamanan yang mengancam operasi.
- Mematuhi prosedur digital: Setiap kegiatan digital harus mengikuti standar keamanan, mulai dari penggunaan sandi hingga akses sistem yang terkontrol. Kepatuhan ini menjaga integritas jaringan dan mencegah terjadinya gangguan siber.
- Integritas adalah fondasi kepercayaan satuan: Integritas digital menjadikan prajurit dipercaya untuk memegang informasi penting dan melaksanakan tugas berisiko tinggi. Tanpa integritas, kekuatan teknologi tidak akan pernah memberikan keunggulan operasional bagi satuan.

b. Loyalitas yang Cerdas: Loyalitas kini melibatkan:

- Memahami geopolitik laut: Prajurit harus

memahami dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah maritim untuk mendukung strategi nasional. Pemahaman ini memastikan setiap tindakan loyalitas selaras dengan kepentingan bangsa dan negara.

- Memahami ancaman siber negara lain: Setiap prajurit perlu mengenali potensi serangan siber dari pihak asing yang bisa mengganggu sistem, komunikasi, dan operasi maritim. Wawasan ini memungkinkan langkah pencegahan yang tepat dan respons cepat terhadap ancaman digital.

- Memahami doktrin maritim global: Mengetahui doktrin, taktik, dan standar internasional memperkuat kemampuan prajurit dalam operasi laut, diplomasi maritim, dan kerja sama multinasional. Pemahaman ini menjadikan loyalitas tidak hanya emosional, tetapi juga berbasis pengetahuan strategis.

Prajurit loyal adalah prajurit yang paham konteks. Loyalitas yang cerdas muncul dari kesadaran akan situasi global dan ancaman nyata, bukan sekadar kepatuhan buta. Dengan konteks yang tepat, prajurit dapat bertindak tegas, efektif, dan profesional demi satuan dan negara.

c. Profesionalisme Berbasis Teknologi: Prajurit profesional harus mampu:

- Membaca peta digital: Prajurit harus mampu menafsirkan peta digital dengan akurat untuk navigasi, perencanaan operasi, dan pengambilan keputusan cepat. Keterampilan ini menjadi dasar profesionalisme di era operasi modern berbasis data.
- Mengoperasikan sistem elektronik kapal: Penguasaan sistem elektronik kapal memungkinkan prajurit memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan fungsi kapal secara efisien. Profesionalisme tercermin dari kemampuan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas operasi.
- Memahami AI navigasi: AI navigasi membantu perencanaan rute, prediksi kondisi laut, dan identifikasi potensi ancaman secara otomatis. Prajurit yang memahami teknologi ini dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat dalam medan yang dinamis.
- Mengelola komunikasi taktis: Prajurit harus mampu menggunakan saluran komunikasi taktis untuk koordinasi, pengiriman perintah, dan pertukaran informasi strategis. Profesionalisme ditunjukkan dengan komunikasi yang cepat, aman, dan akurat di semua kondisi operasi.

Profesionalisme tidak lagi cukup dengan fisik kuat, tetapi juga mental digital.

MODEL PEMBINAAN PRAJURIT MATRA LAUT ERA BARU

Untuk membangun prajurit maritim futuristik, dilakukan pembinaan strategis:

a. *Maritime Technology Training*: Pelatihan yang diperkuat pada:

- *Cyber warfare*: Prajurit dilatih mengenali, mencegah, dan menanggulangi serangan siber yang menargetkan sistem maritim. Kemampuan ini penting untuk menjaga keamanan operasi dan menjaga integritas data satuan.
- *Autonomous naval system*: Pelatihan mencakup pengoperasian kapal, drone, dan sistem otomatis lainnya yang dapat bekerja secara mandiri di laut. Penguasaan teknologi ini meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas operasi tanpa mengorbankan keselamatan personel.
- *Sensor maritim*: Prajurit belajar memanfaatkan jaringan sensor laut untuk memantau pergerakan, kondisi lingkungan, dan potensi ancaman secara *real-time*. Kompetensi ini memperkuat kewaspadaan situasional dan ketepatan pengambilan keputusan.
- *Digital chart navigation*: Kemampuan membaca dan mengoperasikan peta digital menjadi kunci navigasi modern yang cepat dan akurat. Dengan keterampilan ini, prajurit dapat merencanakan rute, menghindari risiko, dan meningkatkan efisiensi perjalanan laut.

b. *Character and Ethical Leadership*. Prajurit dibentuk melalui:

- *Keteladanan komandan*: Komandan menjadi contoh perilaku profesional, disiplin, dan bermoral bagi prajurit. Keteladanan ini membentuk budaya kerja yang kuat dan memupuk loyalitas serta integritas di seluruh satuan.
- *Pembinaan tradisi bahari*:
- Prajurit diajarkan menghargai warisan maritim Nusantara melalui praktik, upacara, dan nilai-nilai bahari. Tradisi ini menanamkan rasa bangga, disiplin, dan kecintaan terhadap laut sebagai bagian dari identitas nasional.

- *Pendidikan karakter Sapta Marga*: Sapta Marga menjadi pedoman moral yang diajarkan secara konsisten untuk membentuk prajurit berintegritas, loyal, dan profesional. Pendidikan ini memastikan setiap tindakan prajurit selalu selaras dengan nilai-nilai luhur TNI AL.

- *Integrasi moralitas dan teknologi*: Prajurit belajar memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab dalam setiap operasi dan kegiatan digital. Integrasi ini menyeimbangkan kecanggihan teknis dengan prinsip moral, sehingga keputusan tetap humanis dan profesional.

c. *Oceanic Mindset Development*. Prajurit maritim harus berjiwa:

- *Adaptif*: Prajurit harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cepat di laut, baik kondisi cuaca, medan operasi, maupun situasi taktis. Sikap adaptif memastikan kelincahan dan keberhasilan misi dalam kondisi yang dinamis dan tidak terduga.
- *Cepat membaca situasi*: Kemampuan menganalisis informasi secara cepat memungkinkan prajurit merespons ancaman atau peluang secara tepat. Kecepatan membaca situasi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien di laut.
- *Tangguh dalam tekanan*: Prajurit dibentuk agar mampu tetap fokus, tenang, dan tegas saat menghadapi kondisi ekstrem atau situasi kritis. Ketangguhan mental ini menjadi fondasi profesionalisme dan keberhasilan operasi maritim yang menantang.

d. *Spirit of Blue-Tech Warrior*. Konsep prajurit masa depan:

- *Jiwa pelaut*: Prajurit harus memiliki kecintaan dan ketangguhan sebagai pelaut sejati, memahami laut sebagai medan operasi dan sumber kehidupan bangsa. Jiwa pelaut membentuk disiplin, keberanian, dan ketahanan yang menjadi ciri khas prajurit Matra Laut.
- *Karakter Sapta Marga*: Nilai-nilai Sapta Marga tetap menjadi pedoman moral dan etika prajurit dalam setiap tindakan. Karakter ini memastikan loyalitas, integritas, dan kehormatan tetap terjaga di era modernisasi teknologi.
- *Profesionalisme digital*: Prajurit dituntut mahir menggunakan teknologi, sistem elektronik, dan platform digital untuk mendukung operasi. Profesionalisme digital meningkatkan efektivitas, presisi, dan keamanan misi di lingkungan maritim modern.

- Literasi siber tinggi: Kemampuan memahami, menilai, dan melindungi informasi digital menjadi keterampilan utama prajurit masa depan. Literasi siber yang tinggi memungkinkan prajurit menghadapi ancaman siber dan menjaga keamanan informasi satuan.

PROYEKSI 2030: PRAJURIT MATRA LAUT SEBAGAI “GUARDIAN OF THE DIGITAL SEA”

Di tahun 2030, kekuatan laut Indonesia akan ditopang oleh prajurit yang bekerja berdampingan dengan:

- Drone pengintai laut: Prajurit akan memanfaatkan drone untuk memantau wilayah perairan secara real-time dan mendeteksi ancaman lebih dini. Integrasi teknologi ini meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons cepat di laut.
- Kapal tempur autonomous: Kapal tempur otonom mampu melakukan operasi secara mandiri dengan kontrol manusia minimal, memperluas jangkauan dan fleksibilitas operasi. Prajurit bertugas mengawasi, memandu, dan mengoptimalkan penggunaan kapal ini secara strategis.
- AI *command assistant*: Asisten berbasis AI membantu pengambilan keputusan dengan analisis data cepat dan prediksi situasi. Prajurit dapat fokus pada strategi dan taktik, sementara AI menyajikan

informasi yang akurat dan relevan.

- Sensor bawah laut terintegrasi: Jaringan sensor bawah laut memantau kondisi laut, pergerakan kapal, dan potensi ancaman secara terus-menerus. Integrasi data dari berbagai sensor memungkinkan prajurit melakukan koordinasi dan tindakan yang tepat sasaran.
- Sistem anti-*hack* bertingkat: Sistem keamanan berlapis melindungi seluruh jaringan digital dan *platform* operasional dari serangan siber. Prajurit harus memastikan sistem ini selalu aktif dan efektif, menjaga keunggulan strategis di era maritim digital.

Namun apa yang membuat mereka menang bukanlah teknologi, tetapi nilai. Teknologi adalah besi. Nilai adalah jiwa. Yang menggerakkan kemenangan adalah jiwa.

LAUT BOLEH BERUBAH, NILAI TIDAK

1. Dalam zaman digital, prajurit Matra Laut memegang dua senjata:

- Teknologi modern untuk bertempur.
- Sapta Marga dan Trisila untuk menjaga kehormatan.

Apa pun bentuk ancaman masa depan, prajurit yang unggul adalah prajurit yang:

Kuat dalam karakter, kokoh dalam moral, tinggi dalam teknologi, dan teguh menjaga marwah TNI AL.

2. Ketika dunia digital menjadi arena peperangan, nilai-nilai luhur menjadi perisai utama.

3. Sapta Marga adalah roh, Trisila adalah nafas. Prajurit Matra Laut adalah penjaga kedaulatan NKRI dan kejayaan maritim Indonesia.©



Dari Tradisi Ke Adaptasi :

KUNCI PRAJURIT SAMUDRA MENJAGA PROFESIONALISME DALAM PUSARAN DINAMIKA DUNIA

Membangun Karakter Prajurit Matra Laut
yang Tangguh dalam Menghadapi Tantangan
Maritim Masa Depan.

Oleh : Letkol Laut (S) Mardiyanto Aris P., Mayor Mar Sigit Wirawan

LAUT SEBAGAI ARENA STRATEGIS MARITIM ABAD INI

Dalam dua dekade terakhir, laut kembali menjadi salah satu panggung utama politik dunia. Jalur pelayaran vital, energi bawah laut, mineral strategis, serta jalur komunikasi global menjadikan kawasan maritim khususnya Indo-Pasifik sebagai ruang persaingan yang kian intens. Dokumen dari *Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)* menegaskan bahwa laut adalah salah satu fokus utama kerja sama kawasan, khususnya dalam bidang keamanan maritim, konektivitas dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berada tepat di jantung dinamika ini. Perairan Nusantara bukan hanya ruang ekonomi dan jalur pelayaran,

tetapi juga arena di mana kedaulatan, kehormatan dan kapasitas pertahanan negara diuji setiap hari.

Di tengah perubahan yang begitu cepat, prajurit matra laut memikul dua beban sekaligus beban sejarah sebagai penjaga maritim bangsa dan beban masa depan sebagai aktor utama di kawasan Indo-Pasifik. Untuk menjawabnya, mereka membutuhkan lebih dari sekadar alutsista modern. Sebagai penjaga maritim bangsa yang mewarisi semangat nenek moyang pelaut mereka membutuhkan kompas moral pengembangan arah nilai yang jelas dengan integritas, loyalitas dan profesionalisme sebagai jangkar di tengah arus besar geopolitik.



POSISI INDONESIA DALAM PETA INDO-PASIFIK

Posisi Strategis Indonesia sebagai Jalur pelayaran utama dunia dan kawasan Laut Natuna Utara/Laut Cina Selatan. Indonesia sebagai "penjaga simpul" jalur laut utama dunia.

Secara geopolitik, Indo-Pasifik adalah kawasan di mana kepentingan banyak negara besar bertemu. Dokumen-dokumen strategis ASEAN dan kajian-kajian kawasan menempatkan Indo-Pasifik sebagai ruang di mana kerja sama dan kompetisi berjalan bersamaan, dengan maritim sebagai salah satu poros utama.

Indonesia memilih untuk memperkuat peran maritimnya melalui dua jalur diplomasi dan penguatan kapasitas pertahanan.

- Seperti dilansir dari Suara Kalbar pada Jumat (10/1/2025), Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, sekaligus mendorong finalisasi *Code of Conduct* antara ASEAN dan Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan tetap menekankan peran sentral ASEAN. "Secara geostrategis, Indonesia dekat dengan sumber konflik regional, yaitu Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia tetap mengedepankan penyelesaian konflik yang damai," kata Sugiono seraya menambahkan bahwa Indonesia akan terus mendorong dialog konstruktif mengenai kode etik.
- Dalam sambutannya pada saat menerima kunjungan kehormatan *Chief of Defence Staff (CDS) Indian Armed Forces, General Anil Chauhan*, di Subden



Peta Indo-Pasific Region. Image Source: <https://pbs.twimg.com>



TAJUK UTAMA

Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (28/10/2025) Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki hubungan yang telah lama terjalin, tidak hanya di bidang pertahanan tetapi juga sejarah dan kebudayaan. "Indonesia dan India memiliki ikatan sejarah serta budaya yang kuat. Bagi Indonesia, India bukan sekadar sahabat tetapi saudara. Kami berharap hubungan antara kedua angkatan bersenjata terus ditingkatkan di masa depan untuk bersama-sama berkontribusi menciptakan keamanan di Kawasan", ujarnya.

- Pada April 2025, Indonesia dan Cina menegaskan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama maritim, termasuk peningkatan koordinasi keamanan di Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini muncul ketika tensi kawasan kembali meningkat akibat aktivitas kapal-kapal Cina di sekitar Kepulauan Natuna. *Associated Press* dan *Euronews*, dalam laporan mereka pada 21 April 2025, menyebut bahwa kedua negara sepakat memperluas dialog maritim serta membangun mekanisme keamanan bersama, meski Indonesia tetap menekankan pentingnya stabilitas kawasan dan penegakan hukum internasional. Pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Indonesia dan Cina itu juga membahas isu keamanan perairan, ekonomi biru, serta penegakan hukum maritim sebagai bagian dari upaya menjaga dinamika strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan demikian peluang besar untuk memainkan peran sebagai stabilizing power, namun juga dengan risiko terseret ke dalam dinamika rivalitas kekuatan besar bila tidak dikelola dengan cermat.

KEAMANAN MARITIM: DATA TERKINI DAN ARAH PERUBAHAN

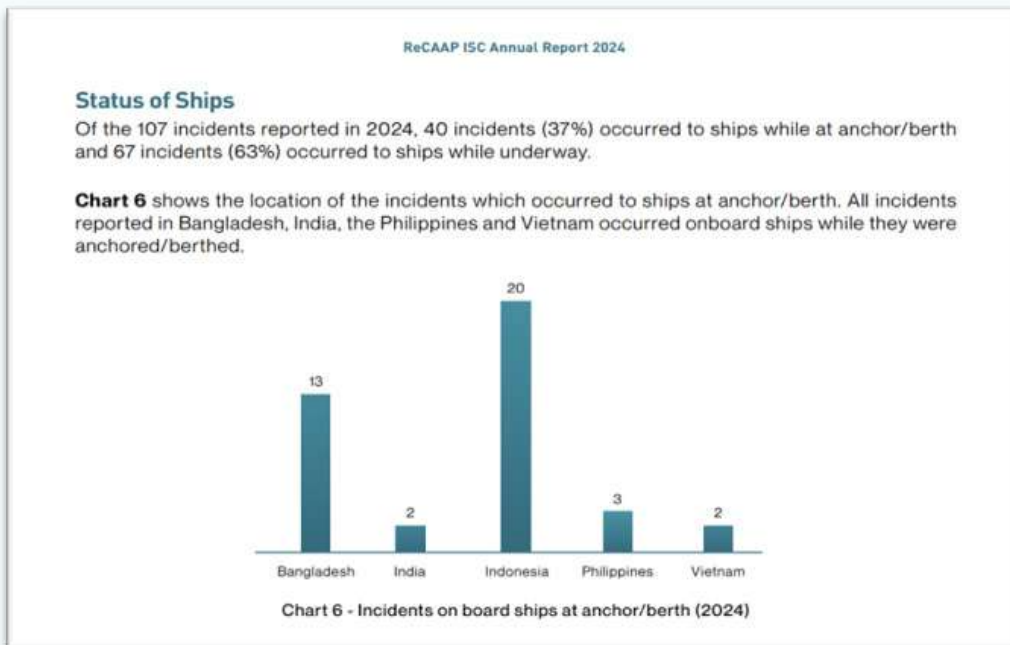
Tantangan maritim hari ini bukan sekadar bayangan tetapi ia hadir dalam angka yang nyata.

Laporan *International Maritime Bureau (IMB) Piracy and Armed Robbery Report* mencatat 116 insiden pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal sepanjang 2024. Angka ini relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi tetap menegaskan bahwa perairan Asia dan Asia Tenggara masih menjadi salah satu kawasan paling rawan. IMB juga mencatat adanya tren peningkatan insiden di beberapa titik perairan Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan maritim tidak hanya berlanjut, tetapi juga menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi.

Secara khusus di Asia, Lembaga pusat informasi regional yang memantau pembajakan dan kejahatan maritim di Asia yaitu *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Information Sharing Center (ReCAAP ISC) Annual Report 2024* yang dipublikasikan pada tanggal 29 Desember 2024 mencatat 107 insiden pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal



Data IMB Piracy Report Januari - Desember 2024. Sumber : icc-ccs.org



Grafik Data ReCAAP ISC Annual Report 2024. Sumber : recaap.org

sepanjang tahun 2024, dengan beberapa insiden terjadi di perairan yang sangat dekat dengan jalur pelayaran penting di kawasan.

Di sisi lain, dinamika di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan terus menambah lapisan kompleksitas bagi pertahanan maritim Indonesia. Sebuah studi strategis tahun 2025 mengenai kebijakan maritim Indonesia di kawasan Natuna selama periode 2019–2024 mencatat adanya peningkatan pada intensitas patroli dan sistem pemantauan, namun juga menyoroti persoalan mendasar terkait kapasitas armada, kesiapan teknologi, serta koordinasi lintas instansi yang masih belum sepenuhnya optimal. Laporan tersebut menekankan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya semakin banyak, tetapi juga semakin berlapis yang meliputi kejahatan laut, sengketa batas wilayah, hingga rivalitas kekuatan besar yang memengaruhi dinamika Indo-Pasifik. Temuan ini diperkuat oleh sejumlah analisis kebijakan maritim yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pemerhati pertahanan kawasan sepanjang 2025. Temuan-temuan ini memberikan gambaran bahwa dinamika maritim kawasan tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga semakin menuntut kesiapan jangka panjang.

TANTANGAN DAN PELUANG KE DEPAN

Ke depan, sejumlah tren strategis dalam domain maritim diperkirakan akan semakin menentukan tugas prajurit matra laut. Berbagai laporan analisis kawasan yang dirilis oleh *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS) Yusof Ishak Institute (2025) yang merupakan lembaga riset

dan *think tank* berbasis di Singapura yang fokus pada kajian Asia Tenggara, geopolitik, dan kebijakan regional, CSIS Asia Maritime Transparency Initiative (2024–2025) adalah program riset dan pemantauan maritim yang dijalankan oleh *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) di Washington, D.C., Amerika Serikat, serta kajian pertahanan maritim BRIN (2025) memproyeksikan meningkatnya aktivitas militer dan sipil di perairan strategis

Indonesia. Hal ini dimulai dari intensitas latihan militer, patroli penegakan hukum maritim, hingga operasi kapal riset dan survei oseanografi. Pada saat yang sama, peran TNI AL dalam misi operasi militer selain perang diprediksi semakin meluas, termasuk dalam pencarian dan pertolongan (SAR), bantuan kemanusiaan saat bencana, perlindungan lingkungan laut, serta pengamanan infrastruktur energi lepas pantai yang semakin krusial.

Keterkaitan antara keamanan maritim dan stabilitas ekonomi nasional juga akan kian menguat. Gangguan di laut baik berupa kejahatan lintas batas, insiden navigasi, atau ketegangan geopolitik dapat berdampak langsung pada pasokan energi, kelancaran perdagangan dan stabilitas harga dalam negeri. Selain itu, kebutuhan akan kerja sama internasional yang lebih erat melalui latihan gabungan, patroli terkoordinasi, serta pertukaran informasi intelijen maritim disebut sebagai elemen penting dalam menjaga keamanan jalur laut vital Indonesia. Dalam keseluruhan dinamika tersebut, prajurit matra laut tidak lagi sekadar menjadi pelaksana teknis, tetapi aktor strategis yang membawa kepentingan dan nama bangsa di panggung regional.

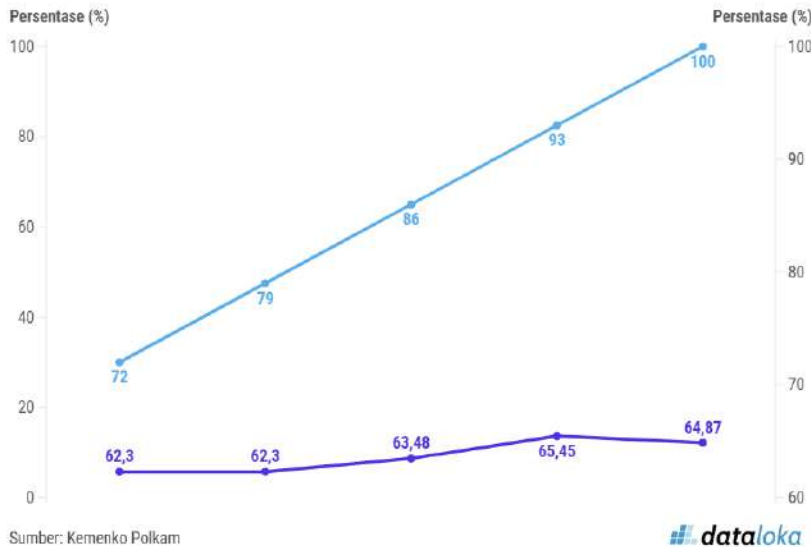
MODERNISASI PERTAHANAN DAN REALITAS KAPASITAS

Modernisasi pada matra laut berjalan dalam konteks yang tidak mudah. Beberapa analisis militer internasional mencatat bahwa pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) dari semua matra belum sepenuhnya tercapai sampai 2024, termasuk TNI AL masih berada di bawah target awal.



TAJUK UTAMA

Target dan Realisasi MEF TNI
(2020-2024)



Target dan Realisasi Minimum Essential Force (MEF). Sumber : dataloka.id

2020–2024 serta Permenhan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pertahanan Negara menegaskan bahwa laut merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Ke depan, doktrin ini perlu terus diselaraskan dengan dinamika terbaru, termasuk meningkatnya operasi di wilayah perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta kebutuhan modernisasi

Kajian terbaru mengenai modernisasi TNI Angkatan Laut sebagaimana disorot dalam berbagai laporan kebijakan pertahanan tahun 2024–2025 dari lembaga seperti BRIN, ISEAS–Yusof Ishak Institute dan CSIS AMTI menunjukkan bahwa pola pengadaan kapal dari beragam negara, mulai dari Eropa, Asia hingga produsen dalam negeri, memang memperkaya opsi alutsista. Namun pola multivendor ini juga meningkatkan kompleksitas pemeliharaan, rantai logistik, pelatihan awak, hingga integrasi sistem senjata lintas platform.

Pada tingkat strategi, sejumlah analis menilai perlunya penyegaran doktrin dan arah pertahanan Indonesia agar lebih realistis merespons perubahan lingkungan keamanan serta tuntutan modernisasi jangka panjang, khususnya di domain maritim.

Temuan-temuan itu menyiratkan pesan yang jelas bagi prajurit akan berhadapan dengan lingkungan operasi yang semakin kompleks dengan ragam teknologi, platform dan tuntutan interoperabilitas yang kian tinggi. Dalam situasi seperti ini, nilai, karakter dan profesionalisme prajurit menjadi pembeda strategis yang tidak tergantikan.

DOKTRIN YANG BERAKAR PADA NILAI DAN BERORIENTASI KE MASA DEPAN

Doktrin Pertahanan Maritim Indonesia sebagaimana tercermin dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara

kemampuan peperangan elektronika dan peperangan ranjau melalui pengadaan perangkat *electronic warfare*, sistem *mine countermeasure* dan peralatan ranjau modern untuk mendukung pengendalian *choke points* strategis. Selain itu, tren kerja sama regional berbasis ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan arsitektur maritim ASEAN sebagaimana dicatat dalam analisis BRIN, ISEAS, dan CSIS-AMTI 2024–2025 menuntut Indonesia memainkan peran yang lebih aktif dalam operasi bersama, latihan gabungan dan berbagi informasi keamanan maritim. Namun demikian, setiap penyesuaian strategis tersebut tetap harus berpijak pada fondasi yang tidak berubah antara lain integritas, loyalitas dan profesionalisme prajurit sebagai kekuatan inti pertahanan negara di laut.

NILAI SEBAGAI FONDASI: INTEGRITAS, LOYALITAS, PROFESIONALISME

1. Integritas sebagai Pondasi Moral di Tengah Disrupsi

Dalam konteks ancaman siber, disinformasi dan operasi informasi yang kian canggih, integritas menjadi filter utama. Tanpa integritas, laporan dapat dimanipulasi, keputusan dapat dibelokkan dan kepercayaan publik runtuh. Dengan integritas, prajurit tetap memegang teguh kebenaran. Bahkan ketika tekanan situasi dan godaan bersifat sangat halus.



2. Loyalitas untuk Menjaga Kohesi di Tengah Rivalitas

Ketika rivalitas kekuatan besar memasuki kawasan, termasuk melalui latihan bersama, alih teknologi, hingga kerja sama industri pertahanan, loyalitas prajurit diuji pada tingkat yang berbeda bukan hanya setia pada satuan, tetapi setia pada nilai dan kepentingan nasional yang lebih besar daripada keuntungan jangka pendek. Loyalitas semacam ini menjadi penting ketika prajurit berinteraksi dalam latihan multinasional, operasi gabungan maupun misi internasional lainnya.

3. Profesionalisme untuk Menjawab Kompleksitas Operasi Masa Depan

Profesionalisme prajurit matra laut akan diuji oleh hadirnya teknologi dan konsep operasi baru seperti kapal permukaan dan bawah permukaan tanpa awak, integrasi sistem senjata serta sensor berbasis kecerdasan buatan, ancaman siber terhadap sistem navigasi dan komando, hingga operasi *joint* dan *combined* yang melibatkan banyak negara. Berbagai laporan pertahanan kawasan menggambarkan bahwa kompetisi kemampuan angkatan laut di Asia-Pasifik memasuki fase baru, dengan peningkatan kapasitas kapal perang, kapal selam dan kemampuan proyeksi kekuatan maritim. Kondisi ini menuntut prajurit untuk tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memahami strategi, mampu berkomunikasi lintas budaya, serta adaptif terhadap evolusi doktrin dan teknologi.

Dalam semua dinamika tersebut, nilai yang melekat dalam diri prajurit tetap menjadi pembeda yaitu karakter yang kuat, komitmen pada bangsa, dan profesionalisme yang tidak tergoyahkan. Nilai-nilai itulah yang menjadi pembeda dalam setiap operasi di masa damai maupun konflik.

ORGANISASI YANG MENUMBUHKAN BUDAYA ETIKA DAN INOVASI

Organisasi pertahanan yang sehat tidak hanya mengandalkan struktur dan prosedur, tetapi juga membangun budaya yang menumbuhkan etika dan inovasi. Hal ini diwujudkan melalui kepemimpinan yang memberi teladan, sistem pelaporan yang jujur, ruang bagi prajurit untuk mengembangkan inovasi taktis maupun teknis, serta penghargaan yang jelas terhadap kinerja dan nilai. Ketika prajurit melihat bahwa nilai yang dijalankan secara konsisten bukan sekadar slogan, maka nilai itu akan menjadi standar perilaku dan bukan formalitas. Budaya semacam inilah yang pada akhirnya menciptakan institusi kuat, adaptif dan dipercaya baik oleh anggota organisasi maupun publik.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEBAGAI RUANG INTERNALISASI NILAI

Pendidikan dan pelatihan menjadi ruang utama untuk menanamkan nilai, membentuk karakter dan menyiapkan prajurit menghadapi realitas operasi maritim masa depan. Mulai dari pendidikan pertama, kursus dan pendidikan lanjutan, hingga program pengembangan perwira menengah dan tinggi, seluruhnya harus dirancang untuk membangun kompetensi sekaligus menguatkan nilai dasar kemiliteran. Kurikulum masa kini menuntut pemahaman mendalam tentang geopolitik Indo-Pasifik, pembelajaran berbasis studi kasus dari insiden nyata serta latihan pengambilan keputusan di bawah tekanan yang mencerminkan kompleksitas operasi sesungguhnya. Penguatan etika militer dan kepemimpinan menjadi fondasi yang memastikan setiap prajurit tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang secara moral dalam setiap penugasan.

MERITOKRASI DAN KESIAPAN GENERASI BARU

Dengan cepatnya perubahan teknologi dan strategi, generasi prajurit berikutnya harus disiapkan lebih awal. Sistem SDM yang berbasis meritokrasi, penempatan yang tepat dan pola karier yang jelas akan menjaga motivasi sekaligus memastikan bahwa posisi strategis diisi oleh mereka yang paling layak.

NILAI SEBAGAI PETUNJUK ARAH YANG TIDAK PERNAH KEDALUWARSA

Perkembangan teknologi mengubah sistem persenjataan dan mendorong pembaruan alutsista. Dinamika strategis global menuntut penyesuaian doktrin dan menggeser peta kekuatan. Namun, satu hal tetap menjadi fondasi, yaitu nilai yang dipegang prajurit.

Integritas membentuk prajurit untuk tetap jujur meski tidak ada yang melihat. Loyalitas menuntun prajurit agar tetap teguh meski arus geopolitik berubah cepat. Profesionalisme menyiapkan prajurit menghadapi tugas bahkan ketika ancaman baru belum pernah muncul sebelumnya. Perubahan dunia yang semakin cepat menjadikan nilai sebagai arah yang tidak pernah hilang.

Selama nilai itu memberikan arah yang jelas, prajurit samudra akan menjaga kehormatan, kedaulatan dan masa depan maritim bangsa dalam kondisi apa pun. ©

REORIENTASI GELAR KEKUATAN MATRA LAUT: ANALISIS MENDALAM TANTANGAN LOGISTIK DAN IMPERATIF PRIORITAS DALAM IMPLEMENTASI 14 KODAERAL

Oleh: Laksma TNI (Purn) G.P. Handoko, M.Si (Han),





Visi besar menghadirkan 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) adalah lompatan doktrinal untuk menegaskan kendali laut (*sea control*) yang merata di seluruh perairan yurisdiksi nasional. Namun, setiap perluasan gelar operasi selalu dibayangi oleh "ekor" logistik yang panjang. Keberhasilan transformasi ini tidak hanya diukur dari jumlah komando yang berdiri, tetapi seberapa tangguh rantai pasok mendukung unsur-unsur SSAT di garis terdepan tanpa jeda.

Takdir geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menuntut kehadiran Angkatan Laut yang tidak hanya memiliki daya pukul mematikan, tetapi juga daya tahan (*endurance*) yang panjang di laut. Pergeseran lanskap geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, yang diwarnai oleh persaingan kekuatan besar (*great power rivalry*) dan dinamika sengketa perbatasan yang terus menghangat, memaksa TNI AL untuk meninjau ulang postur gelar kekuatannya.

Pembentukan 14 Kodaeral merupakan respons strategis untuk mendesentralisasi kekuatan tempur yang selama ini cenderung terpusat. Konsep Kodaeral diproyeksikan memiliki kewenangan komando teritorial laut yang lebih luas dibandingkan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) saat ini, menyerupai peran Kodam di matra darat, namun dengan kompleksitas karakter medan laut yang unik.

Tujuan utamanya jelas: memperpendek response time terhadap krisis di wilayah perbatasan dan mengoptimalkan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) secara mandiri di tiap wilayah. Namun, pepatah klasik dalam sejarah militer selalu relevan: "*Strategy decides where to fight, logistics decides who wins.*" Menggelar kekuatan di 14 titik terpisah di negara kepulauan ini adalah sebuah operasi logistik raksasa yang akan menguji batas kemampuan dukungan administrasi kita.

URGENSI STRATEGIS KODAERAL

Transformasi menuju 14 Kodaeral bukan sekadar perubahan nomenklatur. Ini adalah kebutuhan operasional mendesak karena beberapa faktor kunci:

1. Penyebaran Titik Rawan (*Flashpoints*): Ancaman tidak lagi tunggal. Kita menghadapi dinamika simultan

di Laut Natuna Utara, perbatasan Ambalat, hingga potensi tumpahan konflik di Pasifik. Sentralisasi armada mempersulit respons simultan ini.

2. Pengamanan ALKI: Ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memerlukan pengawasan melekat yang konstan, bukan sekadar patroli terjadwal dari pangkalan yang jauh.

3. Efisiensi Komando Pengendali (Kodal): Kodaeral diharapkan mampu mengambil keputusan taktis operasional di wilayahnya tanpa harus selalu menunggu direktif dari komando atas yang mungkin terkendala jarak dan waktu.

ANALISIS MENDALAM: TANTANGAN MULTIDIMENSI LOGISTIK

Implementasi 14 Kodaeral menghadirkan tantangan yang jika tidak dimitigasi, dapat menciptakan "lubang hitam" anggaran tanpa output kesiapan operasi yang sepadan.

1. Dimensi Infrastruktur: Kesenjangan "*Base Maturity Level*"

Tantangan terbesar bukan sekadar membangun pangkalan, melainkan menstandarisasi Tingkat Kematangan Pangkalan (*Base Maturity Level*) di seluruh Kodaeral.

- Kesenjangan Fasilitas Vital: Saat ini, dukungan logistik cair (BBM/Pelumas) dan amunisi di wilayah Timur masih sangat bergantung pada suplai berkala dari wilayah Barat. Kodaeral baru memerlukan depot bahan bakar standar militer yang tidak hanya besar secara volume, tetapi juga terdispersi dan terlindung (*hardened shelters*) untuk bertahan dari serangan udara presisi lawan.



RAGAM RUBRIK

- Infrastruktur Munisi: Pembangunan gudang amunisi (arsenal) di 14 titik menuntut standar keamanan tinggi (ESQD - *Explosive Safety Quantity Distance*) yang seringkali sulit dipenuhi di area yang berdekatan dengan pemukiman sipil atau pelabuhan umum. Tanpa arsenal memadai di pangkalan aju, KRI harus sering kembali ke pangkalan induk untuk *rearming*, membuang waktu operasional yang berharga.

2. Dimensi Rantai Pasok: Tirani Jarak dan Heterogenitas Alutsista

TNI AL menghadapi mimpi buruk logistik unik yang jarang dihadapi angkatan laut lain:

- *The Tyranny of Distance & SLOC Vulnerability*: Mengirim bekal dari Jakarta ke Biak atau Saumlaki memakan waktu lama dan biaya tinggi. Dalam situasi krisis, jalur logistik laut (SLOC domestik) ini menjadi *soft target* bagi lawan. Ketergantungan pada jalur panjang ini menciptakan *single point of failure*. Jika satu kapal tanker logistik dihancurkan lawan di tengah perjalanan, satu Kodaeral bisa lumpuh.
- Kompleksitas Varian Alutsista (Heterogenitas): TNI AL mengoperasikan berbagai kelas kapal dari berbagai negara (Belanda, Jerman, Korea, Inggris, Rusia, dan produk dalam negeri). Setiap varian menuntut spare parts unik. Mendistribusikan ribuan jenis suku cadang berbeda ke 14 depot Kodaeral adalah tantangan manajemen inventori yang luar biasa rumit. Risiko *dead stock* (barang menumpuk tak terpakai) di satu Kodaeral sementara terjadi *stockout* (kekurangan) di Kodaeral lain sangat tinggi.

3. Dimensi Pemeliharaan (MRO): Krisis Kemandirian Fasharkan

Konsep operasi modern menuntut *Forward Repair Capability*. Kapal yang rusak dalam pertempuran atau patroli harus bisa diperbaiki di dekat area operasi.

- Keterbatasan Fasharkan Wilayah: Saat ini, kapabilitas Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) di luar Jawa mayoritas masih terbatas pada perbaikan tingkat ringan hingga menengah terbatas. Untuk *docking* besar atau *overhaul* sistem senjata canggih (seperti radar atau sonar), kapal masih harus kembali ke PT PAL atau fasilitas utama di Jawa.
- Kekurangan SDM Teknisi Ahli: Mencetak teknisi alutsista modern tidak secepat membangun gedung bengkel. Mendistribusikan tenaga ahli (bintara/perwira teknik senior) ke 14 Kodaeral, terutama di daerah terpencil, menghadapi tantangan kesejahteraan dan rotasi personel.

4. Dimensi Teknologi Informasi: Visibilitas Aset yang Rendah

Di era peperangan modern, logistik adalah perang data.

- Absennya Sistem Logistik Terintegrasi *Real-Time*: Apakah Panglima Kodaeral di Merauke bisa melihat secara *real-time* ketersediaan suku cadang spesifik rudal yang ada di gudang Jakarta? Jika sistem masih mengandalkan laporan manual berjenjang, akan terjadi *information lag*. Akibatnya adalah *over-ordering* (pemesanan berlebih karena panik) atau keterlambatan dukungan yang fatal saat krisis. Diperlukan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) militer yang aman dan tangguh.

5. Dimensi Anggaran: "Sustainment Cost" yang Tersembunyi

Membangun 14 Kodaeral membutuhkan belanja modal (Capex) raksasa, namun ancaman sebenarnya adalah belanja operasional (Opex) atau *sustainment cost*.

- Biaya untuk sekadar "menghidupkan lampu", menjaga landasan tetap operasional, merawat dermaga agar tidak korosi, dan memberi makan ribuan personel tambahan di 14 titik baru akan membebani anggaran rutin TNI AL secara signifikan setiap tahunnya. Jika tidak dihitung cermat, anggaran habis untuk belanja pegawai dan pemeliharaan pangkalan, menyisakan sedikit ruang untuk latihan tempur atau modernisasi alutsista.

IMPERATIF STRATEGIS: MENENTUKAN SKALA PRIORITAS PENGEMBANGAN

Mengingat kompleksitas tantangan logistik dan keterbatasan anggaran pertahanan (dukungan anggaran yang belum mencapai 1.5% PDB), pembangunan 14 Kodaeral secara simultan adalah hal yang mustahil. Diperlukan pendekatan bertahap (*phased approach*) berbasis *threat assessment* (penilaian ancaman) dan nilai strategis wilayah. Skala prioritas pengembangan harus disusun dengan mempertimbangkan *Center of Gravity* (CoG) pertahanan maritim kita saat ini. *Assessment* (penilaian ancaman) untuk menentukan *Center of Gravity* pertahanan kita.

PRIORITAS I: Garda Depan (*Flashpoint Areas*) dan *Choke Point* (jangka pendek Fokus pada wilayah dengan tingkat ancaman tertinggi dan nilai strategis vital. Kodaeral di wilayah ini harus berstatus "Siap Tempur" penuh dengan dukungan logistik prioritas (*War Reserve Material/WRM*).

- Sektor Natuna Utara (Ujung Tombak ALKI-I): Kodaeral yang membawahi wilayah ini adalah prioritas absolut.



Dinamika Laut China Selatan menuntut kehadiran pangkalan aju yang mampu mendukung operasi tempur intensitas sedang hingga tinggi secara mandiri selama periode tertentu sebelum bantuan Armada induk tiba. Logistik di sini bukan hanya soal bekal ulang, tapi kesiapan amunisi dan rudal.

- Sektor Pasifik (Biak/Sorong – ALKI-III): Pergeseran geopolitik ke Indo-Pasifik menjadikan pintu gerbang timur Indonesia vital. Wilayah ini berhadapan langsung dengan proyeksi kekuatan negara besar di Pasifik. Penguatan Kodaeral di sektor ini berfungsi sebagai *deterrence* (penggentar) sekaligus pengamanan jalur perdagangan strategis dari Australia/Oseania ke Asia Timur.

- Pengamanan *Choke Points* Utama: Kodaeral yang mengawasi Selat Sunda dan Selat Lombok. Ini adalah jalur pelayaran internasional kritis. Kegagalan mengamankan titik ini berdampak global dan langsung mencoreng kredibilitas maritim Indonesia.

PRIORITAS II: Penguatan Jalur Konektivitas dan Sumber Daya (Jangka Menengah) Setelah garda depan aman, fokus bergeser pada wilayah yang kaya sumber daya dan menjadi jalur penghubung logistik antar pulau utama.

- Pengembangan Kodaeral di wilayah seperti Sulawesi bagian tengah atau jalur selatan Jawa. Tujuannya adalah memastikan keamanan navigasi domestik dan menjamin bahwa jalur suplai logistik dari pusat (Jawa) ke Kodaeral terdepan (Prioritas I) tidak terputus oleh ancaman asimetris (perompakan, terorisme maritim)..

PRIORITAS III: Konsolidasi Wilayah Dalam (Jangka Panjang). Wilayah dengan tingkat ancaman langsung yang relatif rendah. Kodaeral di sektor ini dapat difokuskan lebih berat pada fungsi Binpotmar, dukungan administrasi, dan sebagai pangkalan pelatihan, sehingga tidak memerlukan kesiapan logistik tempur setinggi Prioritas Tahap I.

Konsekuensi Logistik dari Penetapan Prioritas. Penetapan prioritas ini harus tercermin langsung dalam alokasi sumber daya logistik. Kodaeral Prioritas I wajib mendapatkan alutsista terbaru, personel terbaik (predikat *combat ready*), dan yang terpenting: stok logistik "*War Reserve Material*" (WRM) yang lebih besar dibandingkan Kodaeral lainnya. Kita tidak bisa membagi rata logistik; prinsip *equitable* (adil sesuai kebutuhan operasional) harus menggantikan prinsip *equal* (sama rata) dalam distribusi bekal ke 14 Kodaeral ini nantinya.

ARAH SOLUSI DAN REKOMENDASI

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan terobosan doktrin dan teknologi logistik:

1. Standarisasi Paket Logistik Kodaeral: Tetapkan "Paket Minimum" logistik berdasarkan tipe Kodaeral (Tipe A, B, C). Jangan pukul rata.

2. Implementasi Total *Integrated Logistics Support* (ILS): Pengadaan alutsista baru wajib menyertakan paket dukungan logistik daur hidup (*lifecycle support*) yang terdesentralisasi. Suku cadang kritis harus sudah terdistribusi di depot-depot Kodaeral sebelum alutsista tersebut tiba.

3. *Pre-positioned War Reserve Stocks*: Untuk Kodaeral prioritas (Garda Depan), wajib memiliki stok bekal tempur (amunisi dan BBM) untuk mandiri minimal 30-60 hari operasi tanpa suplai ulang dari pusat.

4. Transformasi Logistik 4.0: Pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk manajemen aset secara *real-time*. Mabesal harus memiliki dasbor digital yang mampu memantau posisi stok BBM dan amunisi di Kodaeral terjauh detik demi detik, memungkinkan *predictive replenishment* sebelum stok habis.

5. Kolaborasi Sipil-Militer (*Dual-Use Infrastructure*): Bersinergi dengan strategi Poros Maritim Dunia pemerintah. Pembangunan infrastruktur Kodaeral dapat diintegrasikan dengan pelabuhan niaga strategis (program Tol Laut) untuk efisiensi biaya pembangunan dan pemanfaatan rantai pasok sipil untuk bekal non-kombatan.

6. *Mobile Logistics Support*: Daripada menunggu Fasharkan permanen siap 100%, kembangkan unit "Fasharkan Mobile" dalam bentuk kontainer taktis yang bisa digeser cepat ke Kodaeral yang membutuhkan dukungan teknis darurat.

Pembentukan 14 Kodaeral adalah sebuah keniscayaan sejarah bagi TNI Angkatan Laut yang modern dan berdaya gentar. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan saat upacara peresmian, melainkan pada kemampuan kita menjamin aliran logistik yang tiada henti ke setiap pos terdepan. Hanya dengan logistik yang tangguh, Kodaeral akan benar-benar menjadi benteng pengawal kedaulatan, bukan sekadar pos administratif.©



**Penjaga
Kelestarian
Laut
Nusantara
— TNI AL —**

Oleh: Asep Solihudin S.Sos., M.E.



Indonesia, bangsa yang besar ini memiliki keanekaragaman yang tidak dipunyai seluruh bangsa manapun. Itu mutlak! Indonesia merupakan bangsa yang semenjak dahulu memiliki nilai dan kearifan untuk melestarikan alam.

Bangsa ini bukanlah bangsa yang serakah, karena jika kita berkaca pada zaman dulu, orang-orang tua kita mengajarkan arti keberlanjutan dengan kata kata "Lestari".

Pun jika kakek nenek kita menanam pohon, maka kerap disematkan doa agar pohon tersebut bisa tumbuh besar dan manfaat untuk anak dan cucu.

Upacara adat kelestarian pun dilakukan oleh para leluhur kita yang kini berbuah dalam bentuk tradisi yang kerap dilakukan.

Upacara penghormatan alam seperti dan lingkungan seperti di Bali dengan nama Tumpek Bubuh, yang bertujuan agar tanah dan tanaman yang ditanam subur. Di Sleman ada Dandan Kali, upacara ini melibatkan penanaman pohon sebagai simbol doa keselamatan bagi lingkungan sekitar. Serta ada juga budaya penanaman kembali pohon beringin di Gunung Kidul sebagai peninggalan leluhur dan simbol kelestarian.

Buat masyarakat laut dan pesisir ada upacara Sedekah Laut, seperti di Trenggalek biasa disebut dengan Larung Sembonyo.

Dalam prosesi sedekah laut, terkandung doa dan harapan yang dirapalkan masyarakat kepada Sang Pencipta. Makna dari berbagai prosesi itu tidak lain tidak bukan adalah memohon kesehatan, keselamatan, serta keberkahan hidup di masa yang akan datang.

Sedekah laut ini bentuk syukur kita kepada Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, Selain untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar para nelayan senantiasa diberikan keselamatan dan perlindungan ketika mencari nafkah, upacara sedekah laut ini juga digunakan sebagai ajang silaturahmi.

Digaris bawah ini berkaitan dengan budaya, yang mengedepankan filsafat kelestarian dan rasa syukur atas karunia yang tuhan anugerahkan kepada bangsa ini yang sangat kaya.

Kata "lestari" berasal dari bahasa Melayu yang berarti "abadi," "kekal," atau "tahan lama". Dalam bahasa Jawa, "lestari" juga memiliki arti yang sama, yaitu "abadi" atau "langgeng". Kata ini menggambarkan kondisi yang tetap seperti

keadaan semula, tidak berubah, dan bertahan untuk selamanya.

Dari sejumlah bukti ini maka hakikatnya, bangsa ini luhur dalam menjaga alam dan mahir, bukan bangsa yang rakyatnya serakah yang ingin mengeruk seluruh kekayaan alam baik di darat dan di laut yang kini semakin terkikis dan berpotensi habis terlebih apa yang terjadi di laut-laut yang ada di Nusantara.

PERAN KETAHANAN LAUT

Laut perlu ada yang menjaga dan wajib. TNI AL merupakan ujung tombak dari penjagaan laut Indonesia dan kelestarian yang ada didalamnya.

Kasus-kasus pencurian merupakan hal yang menjadi prioritas dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh presiden Prabowo Subianto. Di sejumlah buku yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo menyatakan bahwa rakyat menjadi miskin karena dicuri oleh para rampok-rampok yang selama ini berkeliaran di Indonesia.

Oleh karenanya komitmen ini akan dilaksanakan agar laut Indonesia tidak dicuri dari para pencuri ikan, pencuri mineral, pencuri lobster serta kekayaan alam di laut Indonesia yang belum tereksplor secara baik untuk kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo pun berjanji akan melakukan tindakan tegas, didasari pasal 33 UUD 1945, dasar ini merupakan pondasi yang kuat untuk melawan para koruptor dan pencuri dimanapun.

Ketahanan laut sendiri adalah kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan, mengelola, dan melindungi sumber daya lautnya secara berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan, kesejahteraan, dan keamanan nasional.

Dapat dijabarkan bahwa ada tiga aspek ketahanan laut, yakni aspek keamanan, aspek ekonomi dan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Terkait dengan aspek Aspek Keamanan (*Security*) maka peran TNI AL menjadi ujung tombak dan memang diakui memiliki kemampuan menjaga wilayah laut dari ancaman militer, perompakan, penyelundupan dan pelanggaran hukum.

Ketahanan laut TNI AL dalam sektor-sektor utama mencakup peran dan fungsi TNI Angkatan Laut dalam menjaga, mengelola dan memperkuat ketahanan nasional di bidang kemaritiman. Secara



garis besar, TNI AL berperan dalam empat sektor utama ketahanan laut, yaitu:

1. Sektor Pertahanan dan Keamanan Laut

a. Melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut sesuai yurisdiksi nasional (Laut Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen).

b. Melakukan operasi keamanan laut seperti patroli, pengawasan perbatasan, pencegahan penyelundupan, IUU Fishing dan perompakan.

c. Mengembangkan sistem pertahanan maritim terpadu melalui kerjasama antarinstansi maritim (Bakamla, KKP, Polairud, Bea Cukai, dsb).

d. Menjaga stabilitas kawasan dan mendukung diplomasi pertahanan melalui operasi gabungan dan latihan bersama negara lain.

2. Sektor Ekonomi Maritim

a. Mendukung terciptanya keamanan jalur laut (*sea lines of communication*) agar perdagangan nasional dan internasional aman dan lancar.



b. Membantu pengawasan sumber daya laut, khususnya perikanan dan energi, agar tidak dieksploitasi secara ilegal oleh pihak asing.

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi biru (*blue economy*) melalui stabilitas kawasan pesisir dan pelabuhan.

3. Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Laut

a. Berperan dalam pelestarian ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut.

b. Melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana laut, termasuk tumpahan minyak atau pencemaran laut.

c. Mengedukasi masyarakat pesisir agar memiliki kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian laut.

4. Sektor Pendidikan, Teknologi, dan Kemandirian Maritim

a. Mencetak personel TNI AL yang profesional dan tangguh melalui lembaga pendidikan dan



RAGAM RUBRIK

latihan seperti Akademi Angkatan Laut dan Puspenerbal.

b. Mengembangkan teknologi pertahanan laut (kapal, drone maritim, sistem radar, pesawat udara maritim, dan lain-lain).

c. Membangun budaya bahari nasional, menumbuhkan rasa cinta laut, dan kesadaran akan pentingnya Indonesia sebagai negara maritim.

Ketahanan laut TNI AL merupakan kemampuan terpadu dalam menjaga keamanan, mendukung ekonomi, melestarikan lingkungan, serta mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi maritim untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

PENDIDIKAN PILAR KELESTARIAN LAUT

Melalui empat sektor itu, ada dua sektor yang bisa menjadi titik berat dan perhatian penting, yakni sektor lingkungan dan sumber daya laut serta sektor pendidikan, teknologi, dan kemandirian maritim.

Dua sektor ini berkaitan dengan pembentukan sumber daya manusia yang kini tengah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program yang terkait adalah Program Makan Bergizi Gratis, Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Pancasila, Program Transmigrasi Patriot.

Dengan menciptakan SDM unggul maka akan tercipta manusia yang berkualitas, manusia yang sadar akan pelestarian laut dan tahu cara memanfaatkan secara benar dan keberlanjutan.

Perbedaan bangsa lain dengan bangsa Indonesia bukan karena kepintaran, bukan karena postur, karena hingga kini banyak orang pintar dan jenius yang lahir dari rahim ibu pertiwi, tapi angka kemiskinan di Indonesia tetaplah tinggi, begitupun angka kriminalitasnya.

Perbedaan bangsa maju, kelas menengah dan bawah adalah terkait kesadaran dan tidak mau untuk melakukan pelanggaran serta pengrusakan. Kita jumpai di negara maju selain tindakan hukum yang tegas namun ada kesadaran tidak mau melanggar. Sebab, di era kekinian, ilmu pengetahuan mudah diperoleh dengan teknologi, namun kesadaran dan jiwa mesti digembleng dan dibina agar dicetak manusia cerdas atau dalam dunia keislaman disebut "soleh".

Melahirkan SDM unggul atau "soleh" berarti bersaksi keberadaan tuhan yang maha esa, memiliki kesadaran dan keilmuan dan bertindak dan berbuat berdasarkan peraturan yang berlaku, lalu disiplin dalam menjalankannya.

Maka dari ini Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia emas 2045, akan mencetak generasi emas, Indonesia menjadi negara *super power* di dunia, seperti yang pernah tercatat dalam sejarah dimana para pelaut ulung lahir dari darah Nusantara.

Itu bukan isapan jempol, sebab dahulu, hanya para kerajaan besar yang mampu mengarungi samudra dengan kapal-kapal laut yang perkasa, jika dibandingkan, maka kerajaan-kerajaan nusantara memiliki kapal laut yang nilainya sejajar dengan kapal ruang angkasa pada era saat ini dan manfaatnya sama juga untuk melakukan penjelajahan.

Dari catatan pun kita ketahui orang yang pertama kali mengelilingi dunia adalah dari nusantara bernama "Enrique Maluku".

Dari catatan sejarah pun kita tahu kerajaan maritim terbesar yang tercatat adalah Gowa Tallo, para pelaut yang gagah berani dan tidak tertandingi oleh bangsa penjajah.

Kerajaan Gowa Tallo juga merupakan kerajaan maritim di Sulawesi Selatan yang menjadi pusat perdagangan internasional di timur nusantara karena letaknya yang strategis.

Kerajaan ini memiliki keahlian dalam pelayaran dengan armada kapal seperti Igal Siga, Lambo, dan Palari, yang menopang ekonomi mereka.

Pun dengan Sriwijaya pada abad ke 7, kerajaan maritim ini sudah menaklukkan Asia Tenggara dan mendominasi perdagangan jalur laut.

Majapahit yang masyur pun sama di abad ke 14 dengan armada lautnya dan berhasil menyatukan Nusantara. Kerajaan maritim besar lainnya adalah Tidore yang mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Nuku pada abad ke-18, serta Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia.

Dari bekal ini seluruh bangsa Indonesia ber DNA sebagai pelaut yang mengedepankan arti kata lestari. Sebab mereka berlayar untuk berdagang, bukan mengeksplorasi kekayaan laut.



TNI AL DAN PROGRAM KELESTARIAN ALAM

Sebagai penjaga ketahanan laut Nusantara TNI AL tidak melulu melakukan program berkelas perang laut dan dari udara ke laut, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Hal ini sejalan dengan fungsi TNI AL dalam Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar), yang mencakup upaya pelestarian ekosistem laut, pembinaan masyarakat pesisir, dan peningkatan kesadaran cinta laut.

Beberapa program yang dilaksanakan seperti:

Program Penanaman Mangrove

Program ini dilaksanakan secara rutin dan teratur di seluruh pangkalan TNI AL di Indonesia dengan tujuan mencegah abrasi pantai, menjaga ekosistem pesisir, serta menciptakan lingkungan yang hijau dan lestari. beberapa contoh kegiatannya yakni Gerakan Nasional Penanaman Mangrove bersama Presiden RI (TNI AL menanam jutaan bibit di pesisir pantai utara dan timur Indonesia) dan Program “*Mangrove for Future*” di bawah Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) yang melibatkan masyarakat dan pelajar pesisir.

Rehabilitasi Terumbu Karang

Melalui kerja sama dengan berbagai instansi, TNI AL melakukan transplantasi dan konservasi terumbu karang di sejumlah wilayah laut seperti Pulau Seribu, Bali, dan Sulawesi. Tujuannya adalah memulihkan habitat biota laut dan mendukung pariwisata bahari berkelanjutan. Dalam hal ini satuan-satuan penyelam TNI AL (Dislambair, Kopaska, Taifib) sering dilibatkan dalam kegiatan ini.

Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Program rutin ini diadakan di pangkalan-pangkalan TNI AL dan kampung bahari binaan. Dengan tujuan menjaga kebersihan laut dan pantai dari tumpukan sampah dan merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini sering digelar serentak secara nasional dalam rangka Hari Maritim Nasional atau HUT TNI AL.

Program Kampung Bahari Nusantara (KBN)

Program unggulan TNI AL di bawah Dispotmar ini memiliki 5 klaster pengembangan:

- a. Pertahanan (kesadaran bela negara dan keamanan laut)
- b. Pendidikan (peningkatan wawasan bahari dan ekoliterasi)
- c. Kesehatan
- d. Ekonomi (pemberdayaan nelayan dan UMKM pesisir)
- e. Pariwisata dan Lingkungan

KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI MARITIM

Melalui program Pembinaan Potensi Maritim, TNI AL mengedukasi masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Bentuk kegiatan: seminar bahari, lomba kebersihan pantai, kampanye “Laut Bersih, Laut Sehat, Indonesia Kuat”.

Kolaborasi Nasional dan Internasional

Melalui kegiatan ini TNI AL bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KKP, Bakamla, dan LSM lingkungan, selain itu dalam beberapa kesempatan, TNI AL juga berpartisipasi dalam program global seperti *International Coastal Cleanup* dan kegiatan konservasi laut dunia.

Dalam program-program ini menyakinkan di mata dunia, kekuatan TNI AL yang perkasa bukan hanya mengedepankan alutsista yang kuat dan tangguh, namun juga mengedepankan kebijaksanaan dalam menjaga kelestarian alam.

Sebab, alam lestari didasari atas kesadaran dan pertahanan yang disiplin dan penegakan hukum yang tidak berpihak.

Program kelestarian alam TNI AL merupakan kepedulian terhadap kelestarian ekosistem maritim. Melalui berbagai program penghijauan, konservasi, dan edukasi, TNI AL berperan penting dalam menjaga laut Indonesia tetap bersih, sehat, dan lestari untuk generasi mendatang.©



PARA PENJAGA SAMUDERA NUSANTARA BERJIWA PANCASILA

Oleh: Nining Susanti S.Sos

“Implementasi Sapta Marga Melalui Penghayatan Trisila TNI AL Dalam Mewujudkan Prajurit Matra Laut yang Integritas, Loyalitas dan Profesionalisme”

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi yang melekat di seluruh insan di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, bersatu padu dalam ikatan yang paripurna, setia hingga akhir, menjaga kedaulatan bangsa di darat laut dan di udara.

Pancasila selalu diuji dengan zaman, sejumlah pergerakan politik dulu pernah mengemuka, gerakan politik yang ingin mengubah dasar negara.

Falsafah bangsa yang berasal dari bahasa sansekerta ini dipilih dari saripati kehidupan masyarakat Indonesia yang luhur.

Bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, bangsa yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang adil beradab, bangsa yang bersatu, bangsa yang selalu melahirkan pemimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, Maka dengan itu, mewakilkannya dengan keyakinan pasti mereka-mereka yang terpilih bisa memberikan kontribusi dan jalan keluar dari problematika yang dialami melalui musyawarah mufakat, dari semua itu, hal ini dilakukan guna mencapai kondisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang bermukim didalamnya.

Adil dalam kedudukan hukum, adil perlakuan, adil dalam kesetaraan, adil dalam kesejahteraan, adil berkehidupan

sosial dan adil atas seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kehidupan yang selaras dan seimbang ini sudah terbentuk semenjak dahulu kala. Buktinya, di Jawa di abad ke 8 jika ada perhiasan emas yang terjatuh, di jalan, maka selama sehari-hari emas tersebut tidak akan ada yang mengambilnya, karena memang rakyat kala itu paham bahwa mereka tidak akan mengambil apa pun yang bukan hak dan milik mereka. Pernyataan ini seperti yang diungkapkan oleh pencinta sejarah klasik Indonesia Asisi Suhariyanto.

Luhurnya nilai-nilai bangsa Indonesia ini pun tak lepas peradaban dan pendidikan lembaga-lembaga pendidikan era klasik yang ada. Salah satu yang terbesar adalah komplek pendidikan Budha, Candi Muaro Jambi. Candi yang memiliki luas 3.981 hektar yang dikabarkannya luasnya lebih dari itu, hingga kini masih menyimpan banyak misteri, terkait potret peradaban yang berlangsung kala itu.

Di Candi Muaro Jambi, dikabarkan pula sebagai tempat para leluhur bangsa menimba berbagai macam ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu agama, arsitektur, bahasa, astronomi dan kesehatan. Seluruh kegiatan pendidikan ini tumbuh semenjak abad 7 hingga 13, seperti yang dikutip Kompas yang disampaikan oleh Kepala



Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah V, Agus Widiatmoko 7 Februari 2024.

Candi yang merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini pun berafiliasi dan di bawah kendali kerajaan Sriwijaya, yakni kerajaan maritim terbesar di Asia, penguasa samudra di Nusantara.

PANCASILA LAHIRKAN PRAJURIT PELAUT YANG UNGGUL DALAM BERTARUNG

Kaitan Pancasila dengan terbentuknya para penjaga keutuhan negara sangat erat dan melekat. Pancasila sebagai dasar negara harus terus dijaga dan lestari.

Melalui Pancasila maka terbentuk prajurit laut yang memiliki moral serta etika, tidak hanya memiliki kualitas fisik yang prima, namun prajurit pelaut petarung juga, kuat secara mental, setia pada bangsa dan berjuang demi kepentingan rakyat. Dari lima sila Pancasila pun bisa diimplementasikan dan diuraikan sebagai cerminan para Prajurit Pelaut Petarung Nusantara.

Dalam Sila Pertama: **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Prajurit petarung lahir dari:

- Keimanan yang kuat, menjadi sumber keteguhan hati.
- Moralitas tinggi, menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan.
- Keyakinan bahwa setiap tugas adalah ibadah dan bentuk pengabdian.

Hasilnya: prajurit yang berani karena yakin pada kebenaran dan keadilan tugasnya.

Dalam Sila Kedua: **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Nilai ini membentuk:

- Kehumanisan dalam operasi militer, menghormati hak masyarakat.
- Disiplin dan kesadaran bahwa kekuatan harus digunakan dengan beradab.

Hasilnya: prajurit petarung yang tidak brutal, tetapi profesional dan menjunjung etika tempur.

Dalam Sila Ketiga: **Persatuan Indonesia**

Sila ini menanamkan:

- Identitas tunggal sebagai prajurit bangsa, bukan golongan.
- Semangat menjaga keutuhan NKRI sampai titik darah penghabisan.
- Kekuatan kolektif dalam satu komando.

Hasilnya: prajurit petarung yang solid, loyal, dan rela berkorban demi persatuan.

Dalam Sila Keempat: **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan**

Nilai ini melahirkan prajurit yang:

- Taat pada komando, tetapi tetap rasional dan bijaksana.
- Dapat berkomunikasi dengan masyarakat dalam operasi non-tempur.

Hasilnya: prajurit petarung yang cerdas, adaptif, dan mampu bertindak tepat di lapangan.

Dalam Sila Kelima: **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Sila ini menumbuhkan:

- Kesadaran bahwa perjuangan prajurit adalah demi kemakmuran rakyat.
- Komitmen untuk melindungi yang lemah dan menjaga kepentingan nasional.

Hasilnya: prajurit petarung yang memihak rakyat, bukan kekuasaan.

Melalui penelaahan ini maka Pancasila melahirkan prajurit petarung karena nilai-nilainya membentuk prajurit yang:

- Tangguh secara fisik
- Kuat secara mental dan spiritual
- Beretika dalam bertempur
- Loyal pada negara dan rakyat
- Profesional dalam setiap tugas

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi sumber kekuatan moral yang menghidupkan jiwa keprajuritan TNI.

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM SAPTA MARGA DAN PENGHAYATAN TRISILA TNI AL

Pancasila merupakan pondasi awal, pondasi yang kokoh, melahirkan bangunan yang berada di atasnya, diantara elemen yang mempererat bangunan rumah NKRI adalah Sapta Marga dan Penghayatan Trisila TNI AL

Lantas bagaimana dalam mewujudkan Prajurit Matra Laut yang Integritas, Loyalitas dan Profesionalisme?

Trisila TNI AL mengemuka melalui pernyataan dari Komodor Yos Sudarso, Trisila TNI AL adalah pedoman



nilai-nilai yang menjadi landasan bagi prajurit TNI Angkatan Laut, yang terdiri dari tiga nilai yakni disiplin, hierarki dan kehormatan militer. Kini Trisila menjadi pedoman dalam pola pikir, sikap, dan perilaku prajurit di kedinasan maupun di masyarakat. Selain itu, istilah "Trisila" juga merujuk pada nama sebuah operasi militer yang dilakukan oleh TNI AL untuk menjaga kedaulatan perairan dan potensi maritim.

Trisila sebagai pedoman nilai

- Disiplin: Menjunjung tinggi kedisiplinan dalam segala aspek kehidupan prajurit.
- Hierarki: Mematuhi dan menghormati jenjang kepangkatan yang berlaku.
- Kehormatan militer: Menjunjung tinggi nama baik angkatan, negara, dan diri sendiri dengan selalu berbuat tanpa cela.

TRISILA SEBAGAI NAMA OPERASI

- Tujuan: Menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia serta menggali potensi maritim di wilayah yang disinggahi.
- Kegiatan: Operasi ini sering kali menggabungkan misi pertahanan dengan kegiatan kemanusiaan, seperti memberikan edukasi maritim kepada masyarakat, membuka kapal untuk umum (*open ship*), dan melakukan aksi sosial seperti pembersihan pantai atau bakti kesehatan.
- Pelaksanaan: Operasi ini dilakukan di berbagai wilayah perbatasan dan kepulauan Indonesia oleh Satuan Tugas (Satgas) Trisila.

Sementara itu Sapta Marga sendiri merupakan induk dari Trisila, Sapta Marga adalah jiwa dan identitas seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ia menjadi



kompas moral, sumber kekuatan, dan dasar pengabdian dalam setiap langkah pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam Sapta Marga tertanam tekad untuk setia kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila, menjadi patriot pembela ideologi, serta berpegang teguh pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Prajurit TNI adalah Bhayangkari negara, penjaga kedaulatan, yang memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan, serta setia menepati janji dan sumpah prajurit.

Nilai-nilai luhur ini kemudian dihidupkan dalam Penghayatan Trisila. Disiplin, hierarki, dan kehormatan.

Disiplin menuntun prajurit untuk taat aturan, patuh pada komando, serta melaksanakan setiap tugas dengan ketepatan dan keteguhan.

Hierarki menegaskan bahwa kekuatan TNI lahir dari keteraturan dan loyalitas dalam satu garis komando.

Sementara kehormatan adalah mahkota seorang ksatria; nilai yang menjaga martabat prajurit, satuan, dan seluruh institusi Tentara Nasional Indonesia.

Ketika Sapta Marga dan Trisila dipadukan, lahirlah prajurit petarung sejati.

Prajurit yang tangguh fisik, kuat mental, berintegritas tinggi, dan siap berkorban demi bangsa. Prajurit yang bekerja bukan untuk pujian, melainkan untuk kehormatan, tanggung jawab, dan amanah rakyat Indonesia.

Inilah wujud prajurit Indonesia yang setia kepada negara, profesional dalam tugas, dan tak pernah surut dalam menjaga persatuan serta keutuhan NKRI.©



BENTURAN DUA DUNIA: SAAT DOKTRIN NASIONAL BERHADAPAN DENGAN MANDAT GLOBAL DI KONGO

(Studi Kasus Repatriasi Personel Satgas BGC TNI Konga XXXIX-F MONUSCO TA 2024-2025 dan Ketegangan Hukum di Medan Misi)

Oleh: Kolonel Laut (H) R. Deni Nugraha Ramdani, S.H., M.H., M.Tr. Hanla., M.M.

Misi *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) merupakan operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping operation*) yang bekerja berdasarkan Chapter VII Piagam PBB. Resolusi UNSCR 2765 (2024) menugaskan pasukan PBB untuk:

- *Protection of Civilians* (POC) di bawah ancaman kekerasan fisik;
- mendukung *Disarmament, Demobilisation, Reintegration* (DDR);
- membantu reformasi sektor keamanan (*Security Sector Reform / SSR*); dan
- serta mengambil "*all necessary measures*" untuk melindungi warga sipil dan memastikan stabilitas wilayah. *Frasa all necessary measures* menandakan bahwa misi ini berbasis Chapter VII Piagam PBB yang berarti bahwa pasukan berwenang menggunakan kekuatan bersenjata dalam kondisi tertentu untuk melindungi warga sipil dan melaksanakan mandat PBB tanpa perlu persetujuan.

Dua perwira TNI yang merupakan personel Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI Konga XXXIX-F MONUSCO TA 2024-2025, direpatriasi oleh MONUSCO karena dinilai tidak menjalankan mandat POC secara efektif ketika terjadinya aksi penyerangan kelompok milisi bersenjata *Allied Democratic Forces* (ADF) pada tanggal 27 Juli 2025 di Komanda yang mengakibatkan 43 warga sipil meninggal dunia. Peristiwa tragis ini memicu kritik keras dari berbagai pihak karena dinilai sebagai kegagalan dalam melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan fisik (*protection of civilians under*

threat of physical violence). Keputusan MONUSCO tersebut didasarkan pada *administrative grounds*, yakni penilaian kepemimpinan lapangan yang dianggap tidak sesuai dengan mandat berdasarkan UNSCR 2765 (2024) yang berlandaskan Chapter VII Piagam PBB.

PEACEKEEPING VS PEACE ENFORCEMENT: DUA DUNIA YANG BERBEDA ARAH

Tindakan *blocking position* yang diambil Tim Patroli (berhenti pada radius ± 750 m dari *Post Operational Base* (POB) Komanda dinilai MONUSCO sebagai kelalaian operasional (*operational negligence*) karena tidak melanjutkan pencarian korban dan tidak mengambil langkah proaktif sesuai prinsip *robust peacekeeping* di bawah Chapter VII Piagam PBB. *Rule of Engagement* (RoE) berdasarkan Chapter VII Piagam PBB memberikan kewenangan kepada Komandan Lapangan untuk menggunakan kekuatan secara proporsional guna melindungi warga sipil dari ancaman nyata. Kegagalan menindaklanjuti tembakan dan membiarkan situasi berkembang hingga jatuhnya korban sipil dapat ditafsirkan sebagai *failure to act* yaitu suatu pelanggaran terhadap mandat operasional PBB. Repatriasi atas dasar *administrative grounds* bukanlah pelanggaran hukum internasional, melainkan bentuk pertanggungjawaban administratif terhadap pelanggaran standar mandat dan kepemimpinan lapangan dalam misi di bawah Chapter VII Piagam PBB.

Berdasarkan konstitusional Indonesia (Pemukaan UUD RI Tahun 1945 alenia ke-4, Pasal 10 ayat (3) huruf d UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Pasal



7 ayat (2) huruf b angka 6 UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI; Keputusan Panglima TNI Nomor 713/VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019 tentang Doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI, menyebutkan bahwa prajurit TNI dikirim dalam misi PBB dengan semangat *peacekeeping* berdasarkan Chapter VI Piagam PBB, yakni operasi penjaga perdamaian bersifat netral dan defensif, bukan penegakan perdamaian dengan koersif, proaktif, dan ofensif (*peace enforcement*) sebagaimana yang terdapat dalam Chapter VII Piagam PBB. Dalam praktiknya, ditegaskan bahwa pasukan bertindak sesuai RoE PBB, tetapi tetap dalam koridor mandat nasional, yaitu tidak melakukan tindakan ofensif tanpa perintah jelas. Oleh karena itu, ketika PBB menilai tindakan lapangan di bawah Chapter VII Piagam PBB menuntut *proactive engagement*, maka secara normatif terjadi perbedaan paradigma hukum dan doktrin operasi antara PBB dan Indonesia.

AKIBAT DARI “DOCTRINAL GAP”

Secara konseptual, terdapat ketegangan normatif (*doctrinal gap*) antara hukum nasional dan hukum

internasional di mana terdapat perbedaan fundamental antara Chapter VI Piagam PBB yang menjadi dasar doktrin OMSP TNI dan Chapter VII Piagam PBB yang menjadi dasar mandat MONUSCO:

- Chapter VI Piagam PBB (*Peacekeeping*) menekankan penjagaan perdamaian yang bersifat netral dan defensif, hanya menggunakan kekuatan untuk pertahanan diri (*self-defence*) dan atas persetujuan pihak bertikai (*consent-based*); dan
- Chapter VII Piagam PBB (*Peace Enforcement*) menuntut tindakan koersif, proaktif, dan ofensif terbatas untuk memaksa pihak yang mengancam perdamaian agar mematuhi mandat Dewan Keamanan, termasuk perlindungan aktif terhadap warga sipil (*Protection of Civilians/POC*).

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, misi perdamaian dunia merupakan bagian dari OMSP yang berkarakter *peacekeeping* berdasarkan Chapter VI Piagam PBB, sehingga belum mengakomodasi operasi berbasis Chapter VII Piagam PBB, yang mengizinkan penggunaan kekuatan ofensif secara terbatas untuk penegakan perdamaian (*peace enforcement*).





RAGAM HUKUM



- Aksi pembakaran oleh ADF NALU



- ADF NALU

Dengan demikian, ketika mandat internasional menuntut pasukan bertindak cepat dan ofensif, tetapi doktrin nasional hanya memberi ruang defensif, maka prajurit TNI di lapangan berada dalam zona abu-abu hukum. Setiap keputusan taktis dapat memiliki dua makna: sah secara nasional, tapi dianggap lalai oleh PBB.

IMPLIKASI STRATEGIS BAGI HUKUM DAN OPERASI TNI

Kasus Komanda adalah suatu peringatan dini, bahwa kita harus segera bergerak. Perlu adanya reformasi hukum dan doktrin pertahanan nasional agar Indonesia mampu beradaptasi dengan dinamika misi PBB modern yang semakin berorientasi pada *peace enforcement* berdasarkan Chapter VII Piagam PBB. Dengan demikian

Indonesia mampu mempertahankan reputasi sebagai *peacekeeping contributor nation* yang profesional, sekaligus melindungi kepastian hukum bagi setiap prajurit yang bertugas di bawah bendera PBB, kemudian perlu adanya sinkronisasi RoE nasional dengan RoE PBB agar komandan lapangan memiliki kepastian hukum dalam bertindak serta diplomasi hukum di forum internasional, sehingga TNI memiliki kepastian hukum, legitimasi internasional, dan perlindungan institusional dalam melaksanakan tugas menjaga dan menegakkan perdamaian dunia serta dapat menempatkan perwira hukum militer (*Legal Adviser*) pada setiap kontingen TNI dalam misi PBB, guna memberikan saran masukan hukum kepada komandan secara langsung di lapangan dalam pengambilan keputusan taktis yang dapat berpotensi menimbulkan dampak hukum (misalnya penangkapan, penggeledahan, dan penggunaan kekuatan senjata).



Kesimpulannya, TNI tidak hanya harus tangguh secara militer, tetapi juga harus adaptif secara hukum dan diplomasi internasional. Jika celah hukum antara nasional dan internasional terus dibiarkan, maka

perwira-perwira terbaik kita berisiko menjadi korban “perang doktrin”. Reformasi hukum pertahanan dan sinkronisasi doktrin bukan sekadar pilihan, tetapi suatu kebutuhan strategis.©



QUOTE:

“Ketika mandat internasional menuntut pasukan bertindak cepat dan ofensif, tetapi doktrin nasional hanya memberi ruang defensif, maka prajurit TNI di lapangan berada dalam zona abu-abu hukum.”



Sekilas Mengenai

UU TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE), ISTILAH HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN

Oleh: Kolonel Laut (KH) Alim Gunawan, S.H.

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini telah diadakan perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa pengertian yang penting dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.



6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di jaman era keterbukaan dilaksanakan dengan tujuan untuk:



a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Hal-hal penting dalam Undang-undang ini, yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya prajurit TNI Angkatan Laut yaitu:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

PELANGGARAN UU ITE



2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut undang-undang ITE tersebar dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35 yaitu:

A. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 27 adalah:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

B. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 28 adalah:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa



kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

3. Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

C. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 29 adalah:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.

D. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 30 adalah:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

E. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 31 adalah:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

3. Intersepsi yang dikecualikan yaitu intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

F. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 32 adalah

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

G. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 33 adalah:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

H. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 34 adalah:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus sesuai dengan undang-undang ini.

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses, sesuai dengan undang-undang ini.

2. Tindakan yang dikecualikan dan bukan tindak pidana sesuai undang-undang ini adalah jika tindakan ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk



RAGAM HUKUM

perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

1. Perbuatan yang dilarang, yang tercantum dalam pasal 35 adalah:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Penyidik dalam tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

ISTILAH HOAKS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber, informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi "dijual" sebagai kebenaran. Hoaks bukan hanya menyesatkan tetapi merupakan informasi yang tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.

Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang berita bohong yaitu:

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan yang mengatur tentang berita bohong terdapat dalam pasal 390 yaitu:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan".

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa orang yang diancam pidana apabila dalam menyiarkan kabar bohong tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain secara materi. Bahkan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap, menerangkan

bahwa terdakwa dapat dihukum dengan pasal 390 KUHP apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

2. Dalam Undang-undang ITE (UU Nomor 11 tahun 2008) diantaranya dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Ancaman pidana dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam undang-undang ITE ini juga menjelaskan bahwa berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang dapat dipidana bukan saja yang menyebabkan kerugian konsumen, akan tetapi berita bohong yang bermuatan kesucilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, ancaman kekerasan atau menakutkan, itu semua dapat dijerat oleh undang-undang ITE.

UJARAN KEBENCIAN

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut.

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan ujaran kebencian terhadap seseorang terdapat di dalam Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP.



Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
2. Penghinaan terhadap golongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)

Referensi :

1. R. Soesilo "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" Politeia Bogor 2013
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

-----oOo-----



DIPLOMASI, KEAMANAN, DAN JARINGAN MASA DEPAN

CATATAN PERJALANAN DARI NEGERI KANGURU

Oleh: Kolonel Laut (H/W) Tuti Marwati, S.H., M.H., M. Tr. Hanla

Kawasan Indo-Pasifik, dengan dinamika geopolitik yang kompleks dan potensi ekonomi yang tak tertandingi, telah menjadi pusat gravitasi strategis dunia abad ini. Di tengah persaingan kekuatan besar dan tantangan keamanan tradisional maupun non-tradisional, kebutuhan akan dialog yang konstruktif dan kerja sama yang erat antarnegara menjadi semakin mendesak. Dalam konteks inilah, Pemerintah Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) secara konsisten meluncurkan inisiatif strategis untuk memperkuat hubungan people-to-people dan membangun pemahaman bersama di antara para pemimpin masa depan kawasan. Salah satu inisiatif paling bergengsi adalah *Canberra Fellowships Program* (CFP).

Pada tahun 2025, Canberra Fellowships Program (CFP) kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema strategis *"Indo-Pacific Security: Promoting Peace, Stability and Prosperity"*. Program ini bukan sekadar forum pertukaran informasi atau kunjungan kerja, tetapi sebuah *platform* intensif yang mempertemukan para pemimpin dan profesional di bidang pertahanan dan keamanan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dengan para pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi keamanan terkemuka di Australia.

CFP dirancang untuk memperluas perspektif dan memperkuat jejaring kolaboratif dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Melalui rangkaian dialog, lokakarya, dan kunjungan institusional, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu-isu strategis yang mempengaruhi stabilitas kawasan, sekaligus membuka peluang sinergi dalam kerja sama pertahanan dan keamanan regional.

Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam program ini memiliki makna strategis. Tahun ini, TNI menugaskan

Kabidjankerma Puskersin TNI, Kolonel Laut (H/W) Tuti Marwati, S.H., M.H., M.Tr.Hanla., sebagai delegasi yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berlangsung di Sydney, Canberra, dan Adelaide. Kehadiran perwakilan TNI mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat peran konstruktif dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan Indo-Pasifik.

Program ini secara fundamental bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama masa depan antara Australia dan negara-negara peserta, serta memperluas pemahaman kawasan Indo-Pasifik terhadap perspektif, kepentingan, dan prioritas Australia. Melalui tiga aspek utama—pengenalan sistem pemerintahan, penelitian dan pengembangan, serta pengenalan sejarah dan budaya—CFP 2025 menawarkan sebuah lensa komprehensif untuk memahami arsitektur keamanan dan diplomasi di kawasan yang sangat vital ini.

ASPEK PEMERINTAHAN

Menggal Kedalaman Diplomasi dan Keamanan

Inti dari CFP 2025 terletak pada serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan para pejabat kunci di Canberra, yang memberikan wawasan langsung mengenai mekanisme *statecraft* Australia. Kunjungan ke DFAT menjadi titik awal yang krusial, di mana para *fellows* berdiskusi mendalam tentang pencegahan konflik dan peran kolaboratif *middle powers* dalam meredam potensi krisis.

Diskusi bertema *"Deep Dive on Conflict Prevention"* yang dipimpin oleh *First Assistant Secretary, Defence and National Security Policy Division*, DFAT, menyoroti pentingnya pendekatan *integrated statecraft*. Konsep ini merujuk pada penggunaan terpadu seluruh



instrumen kekuatan nasional, dengan menitikberatkan pada diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Dalam konteks Indo-Pasifik, *integrated statecraft* menuntut koordinasi kebijakan yang mulus antara berbagai kementerian dan lembaga, serta sinergi yang erat dengan mitra regional. DFAT secara tegas menekankan bahwa kerja sama yang erat dengan ASEAN adalah kunci untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan kawasan.

Sentralitas ASEAN dan Peran Middle Powers

Dalam arsitektur keamanan kawasan, ASEAN Centrality tetap menjadi prinsip yang tak tergoyahkan. Diskusi di DFAT menegaskan bahwa upaya pencegahan konflik di Indo-Pasifik harus selaras dengan mekanisme ASEAN seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus), dan East Asia Summit (EAS). Australia, sebagai *middle power*, secara aktif mendorong kolaborasi yang memperkuat kapasitas ASEAN dalam mencegah insiden dan salah perhitungan (*miscalculation*).

Konsep *Middle Power* sendiri merujuk pada negara yang, meskipun bukan *superpower* atau *great power*, memiliki pengaruh signifikan dan memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Australia, bersama dengan negara-negara seperti Indonesia, dipandang memiliki peran stabilisator. Mereka tidak hanya menjaga keseimbangan kekuatan, tetapi juga mempromosikan tatanan berbasis aturan (*rules-based order*). Dalam konteks CFP, Australia menunjukkan komitmennya untuk mendukung prioritas ASEAN di bidang keamanan maritim, penanggulangan bencana, pembangunan kapasitas siber, dan kerja sama penegakan hukum sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik jangka panjang.

Tantangan dan Peluang Strategis

Pertemuan dengan *Deputy Secretary on Strategic Planning and Coordination Group and South and Southeast Asia Group*, serta *Working Lunch Discussion* dengan topik "*Strategic Context: Challenges and Opportunities*", menyoroti lanskap geopolitik yang dinamis. Para *fellows* membahas *flashpoints* regional yang berpotensi memengaruhi stabilitas, dinamika hubungan USA-Tiongkok yang membentuk arsitektur keamanan, serta peran sentral ASEAN.

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah meningkatnya penggunaan wilayah pada "*grey zone*" di perbatasan negara. Aktivitas *grey zone*, yang dianggap sebagai tindakan koersif di bawah ambang batas konflik

bersenjata, menuntut respons adaptif, koordinasi kebijakan, dan penguatan kerja sama keamanan yang lebih terintegrasi.

Selain itu, para *fellows* juga mendapatkan wawasan tentang mekanisme penanganan krisis Australia melalui kunjungan ke DFAT's *Crisis Centre and Global Watch Office (GWO)*. Sistem terpadu ini, yang beroperasi 24/7, menunjukkan bagaimana Australia mengelola krisis luar negeri, mulai dari pemantauan ancaman global, penyusunan analisis situasional, hingga koordinasi respons lintas kementerian seperti evakuasi dan bantuan konsuler. Mekanisme *surge staff team* DFAT memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan terukur dalam menghadapi berbagai krisis internasional.

Kekuatan Pertahanan dan Intelijen

Aspek keamanan diperdalam melalui kunjungan ke *International Policy Division, Department of Defence* dan *Office of National Intelligence (ONI)*. Diskusi di Departemen Pertahanan berfokus pada gambaran umum *Australia's National Defence Strategy* dan arah investasi kapabilitas pertahanan yang diprioritaskan. Australia menekankan pentingnya memperkuat kemitraan keamanan dengan negara-negara di kawasan untuk menjaga stabilitas strategis di Indo-Pasifik.

Sementara itu, *briefing* di ONI menyoroti peran lembaga tersebut sebagai koordinator intelijen nasional dan penyedia analisis strategis. ONI memaparkan tantangan keamanan maritim dan kompleksitas *foreign interference*. Dalam konteks kerja sama regional, ONI menekankan komitmen Australia untuk memperkuat *information sharing* dengan negara-negara ASEAN guna meningkatkan situasional *awareness* dan membangun respons kolektif terhadap ancaman maritim dan siber.

ASPEK PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN WAWASAN AKADEMIK

CFP 2025 juga memberikan porsi signifikan pada aspek penelitian dan pengembangan, yang mempertemukan para *fellows* dengan lembaga think tank dan akademisi terkemuka Australia. Tujuannya adalah untuk menganalisis tantangan strategis dari perspektif non-pemerintah dan berbasis data.

Analisis Geopolitik dari Lowy Institute

Kunjungan ke *The Lowy Institute* di Sydney, salah satu *think tank* terkemuka di Australia, menjadi sorotan.



RAGAM RUBRIK

Diskusi meja bundar dengan para pakar *Lowy Institute* membahas *Asia Power Index* dan pengaruhnya terhadap Asia Tenggara. Hasil diskusi menunjukkan adanya kecenderungan *hedging* di kalangan negara-negara Asia Tenggara, yaitu menjaga hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok sambil tetap memperkuat hubungan keamanan dan diplomasi dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya, termasuk Australia. Strategi *hedging* ini mencerminkan upaya negara-negara kawasan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan tetap menjaga dan memitigasi risiko keamanan di tengah persaingan geopolitik.

Pergeseran Kekuatan dan Ketahanan Rantai Pasok

Diskusi akademik di University of Sydney (USYD) dan Australian National University (ANU) memperkaya pemahaman para *fellows* tentang dinamika kawasan. Di USYD, topik diskusi mencakup kemampuan militer, diplomasi, dan pergeseran kekuasaan di Indo-Pasifik, serta pemanfaatan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis dan ketahanan rantai pasokan (*supply chain resilience*). Para akademisi menyimpulkan bahwa ASEAN memiliki peran sentral untuk mencegah eskalasi konflik melalui penguatan norma, mekanisme diplomasi, dan kerja sama yang inklusif.

Futures Workshop di National Security College (NSC), Australian National University, menjadi ruang refleksi kritis mengenai masa depan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) oleh generasi muda dalam periode 2026–2036. Dengan pendekatan analisis SWOT, para peserta menggarisbawahi bahwa AI menawarkan peluang besar untuk mendorong inovasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Indo-Pasifik. Namun, seiring dengan itu, muncul pula ancaman yang tidak dapat diabaikan—mulai dari penyebaran misinformasi, meningkatnya kerentanan siber, hingga kompetisi geopolitik teknologi yang semakin kompleks.

Dalam diskusi tersebut, para peserta menegaskan bahwa pemanfaatan AI tidak semata-mata bergantung pada kecerdasan teknologi, tetapi juga pada kecerdasan moral (*moral intelligence*) penggunaannya. Indikator moral seperti tanggung jawab, transparansi, kejujuran informasi, dan penghormatan terhadap privasi menjadi fondasi utama untuk memastikan penggunaan AI yang etis. Tanpa landasan nilai-nilai tersebut, kemajuan teknologi justru berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan dan kepercayaan publik.

Workshop ini akhirnya merumuskan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan literasi digital berbasis etika, serta perluasan kolaborasi regional dalam

membangun standar moral dan kode etik penggunaan AI. Rangkaian rekomendasi ini menegaskan bahwa masa depan AI bukan hanya persoalan algoritma dan kapasitas komputasi, melainkan juga komitmen kolektif untuk menjadikan teknologi sebagai kekuatan yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi generasi mendatang..

Keamanan Maritim dan Hukum Laut

Fokus pada keamanan maritim diperdalam melalui diskusi dengan akademisi Adelaide University. Pembahasan menyoroti isu perbatasan maritim antara Australia dan negara-negara ASEAN, termasuk dinamika strategis di Laut China Selatan. Para akademisi menegaskan bahwa kepastian delimitasi wilayah, penegakan hukum laut, dan penguatan kerja sama kawasan berdasarkan prinsip UNCLOS 1982 adalah elemen kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim regional. Diskusi ini menegaskan kembali pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Australia dan ASEAN guna menjaga tatanan maritim yang stabil, terbuka, serta berlandaskan aturan.

ASPEK PEMAHAMAN SEJARAH, BUDAYA, DAN KEPIMPINAN INKLUSIF

CFP 2025 menyadari bahwa diplomasi yang efektif tidak hanya dibangun di atas kebijakandan strategi, tetapi juga dengan memahami budaya dan hubungan antarmanusia. Aspek ketiga program ini berfokus pada pengenalan sejarah, budaya, dan nilai-nilai Australia.

Pengakuan Masyarakat Adat dan Multikulturalisme

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pengakuan mendalam terhadap masyarakat adat Australia. Sambutan “*Welcome to Country from Gadigal Country*” oleh Ketua Lembaga Pemilik Adat Koori, menegaskan penghormatan Australia terhadap Pemilik Adat yang telah merawat dan mendiami tanah tersebut selama ribuan tahun.

Para *fellows* juga diajak menelusuri jejak sejarah tiga kota utama: Sydney, Canberra, dan Adelaide, yang semuanya merefleksikan perjalanan panjang Australia dari area yang awalnya merupakan koloni “*interniran*” hingga menjadi negara multikultural yang terbuka dan progresif. Adelaide, misalnya, lahir sebagai permukiman bebas yang dirancang dengan visi kota terencana. Kini, kota yang akrab dijuluki “*City of Churches*” itu tampil sebagai destinasi yang tenang namun penuh energi kreatif, dengan denyut seni dan kuliner yang terus tumbuh dan memikat.



Kepemimpinan Perempuan dan Keamanan Inklusif

Salah satu sesi paling inspiratif adalah *Breakfast Discussion* dengan *Her Excellency Frances Adamson AC, Gubernur South Australia*, yang membahas "*Women's leadership in a gender perspective and Woman Peace and Security in Australia*". Gubernur Adamson menekankan bahwa kesetaraan gender adalah komponen penting bagi ketahanan nasional. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama di sektor pemerintahan, diplomasi, dan keamanan, adalah faktor kunci dalam mendorong stabilitas dan tata kelola yang inklusif.

Diskusi saat sarapan itu, sejalan dengan agenda *Women, Peace and Security (WPS) PBB*, yang diimplementasikan Australia melalui kerja sama regional dengan negara-negara ASEAN. Peningkatan kapasitas perempuan di sektor keamanan regional dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat kepercayaan, memperluas dialog, dan membangun keamanan kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Kekuatan Maritim dan Konservasi

Kunjungan ke *Royal Australian Air Force (RAAF) Base Edinburgh* di Adelaide memberikan gambaran nyata tentang kapabilitas pertahanan maritim Australia. Para *fellows* mendapatkan paparan mengenai operasi *Australian Defence Force (ADF)* di Indo-Pasifik dan pentingnya kemitraan regional. *Flight tour P-8A Poseidon*, pesawat patroli maritim canggih, menunjukkan peran strategis *Wing 92 Edinburgh* dalam pengawasan jarak jauh, *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)*, dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*), yang secara signifikan meningkatkan kesadaran situasional di kawasan.

Di sisi lain, kunjungan ke *Adelaide Zoo* dan *Art Gallery of South Australia (AGSA)* memberikan perspektif tentang konservasi dan budaya. Di Kebun Binatang Adelaide, para *fellows* melihat upaya konservasi satwa khas Australia seperti kanguru dan koala, yang didukung oleh undang-undang perlindungan hewan yang ketat. Sementara itu, pameran seni "*Too Deadly: Ten Years of Tarnanthi*" di AGSA merayakan seni kontemporer *First Nations (Aborigin dan Torres Strait Islander)*, menegaskan kontribusi signifikan mereka dalam memperluas apresiasi nasional dan internasional terhadap budaya Australia.

Kuliner dan Identitas Australia

Aspek budaya ditutup dengan kunjungan ke Adelaide Botanic Garden dan pengalaman kuliner yang otentik. Restoran di kebun raya tersebut memanfaatkan bahan

dasar asli Australia seperti daging kanguru dan burung emu yang dimasak dengan rempah khas (*bush tucker*) seperti *wattle seed, davidson plum, dan finger lime*. Pendekatan kuliner ini tidak hanya menghadirkan cita rasa unik, tetapi juga menceritakan tentang kisah tanah, musim, dan sejarah Australia, sekaligus mengakui masyarakat Kurna sebagai Penjaga Tanah Adat sejak jaman dahulu.

Lesson Learned: Membangun Jaringan Strategis

Canberra Fellowships Program 2025 adalah inisiatif strategis yang melampaui batas-batas diplomasi konvensional. Dengan memadukan diskusi kebijakan tingkat tinggi, wawasan akademik mendalam, dan pengalaman budaya yang kaya, program ini berhasil menciptakan jaringan *people-to-people* yang kuat antara Australia dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik.

Bagi Indonesia, khususnya TNI, partisipasi dalam CFP 2025 memberikan manfaat ganda: memperluas jaringan kerja sama militer, memfasilitasi komunikasi melalui *people-to-people links*, pertukaran informasi, serta koordinasi teknis dengan negara peserta. Program ini memperkuat kapasitas institusional dan mendukung pengembangan kerja sama militer regional yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, Program ini menegaskan kembali bahwa mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di Indo-Pasifik membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan militer atau ekonomi. Ia membutuhkan pemahaman bersama, kepercayaan strategis, dan komitmen kolektif untuk menjunjung tinggi tatanan berbasis aturan. Melalui investasi pada hubungan antarmanusia dan dialog yang inklusif, Australia dan mitra-mitranya di kawasan, termasuk Indonesia, sedang meletakkan fondasi yang kokoh untuk masa depan Indo-Pasifik yang lebih aman dan sejahtera. ©



STRATEGI PENDIDIKAN TNI AL MENUJU INDONESIA EMAS

Oleh: Letkol Laut (S) Mz Lerry Frendiana, Mtr.Opsla

Perubahan merupakan suatu hal tidak bisa dihindari, begitu pula dengan program pendidikan yang diselenggarakan oleh TNI AL harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesiapan siswa sebagai generasi penerus yang akan mengawaki dan menjalankan organisasi TNI AL di masa yang akan datang sesuai dengan tantangan yang akan dihadapinya nanti. Dalam satu dekade terakhir kita semua telah menyaksikan dahsyatnya teknologi dalam mempengaruhi tatanan kehidupan mulai dari individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dari mulai sistem birokrasi sampai dengan sistem pendidikan semuanya mengalami tranformasi ke era digital dan berbagai aspek dilihat *by data*. Fenomena ini masih terus berkembang sampai sekarang memasuki ke era AI (*Artificial Intellegent*) yang diramalkan akan mengganti produktifitas sumber daya manusia secara *masive* dan global. Penulis tidak akan membahas secara mendalam terkait teknologi akan tetapi akan membahas dari sudut

pandang pendidikan untuk mempersiapkan pengawak yang akan berhadapan langsung dengan era teknologi digital dan AI supaya tidak tersingkir tetapi justru mampu berkolaborasi dengan teknologi dan AI tersebut untuk mencapai generasi Indonesia emas pada tahun 2045.

Program pembinaan mental dan fisik yang dilaksanakan di TNI AL merupakan program yang bersumber dari tradisi, senioritas turun temurun yang mempunyai kekurangan dari fungsi control atau pengendalian. Sudah berbagai upaya dilaksanakan untuk mengurangi kegiatan yang “ngarang-ngarang” yang sesungguhnya kegiatan tersebut merugikan dan tidak bermanfaat. Namun demikian hal tersebut dilakukan untuk membina mental dan fisik serta loyalitas seorang prajurit. Memang kenyataan dilapangan ketika menghadapi siswa dengan berbagai macam karakter, sifat serta kultur daerah asal yang berbeda tidak semudah ungkapan kata-kata motivasi sehingga seringkali terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan.





Penulisan essay ini menggunakan metode literasi yang bersumber dari artikel, website, media sosial dan sumber lainnya yang bisa diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 3 poin yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan didalam merubah pendidikan di lingkungan TNI AL untuk mewujudkan target Indonesia emas tahun 2045.

MENERAPKAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP) DAN ALGORITMA (ALGORITHMIC LEADERSHIP).

Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali jenis dan kategori tentang Kepemimpinan. Beberapa diantaranya yaitu Kepemimpinan Demokratis, Visioner, Multikultural, Strategis, Suportif, Otokratis, Laissez Faire, Transaksional, Delegatif, Liberal dan Transformasional. Penulis tidak akan membahas satu persatu tentang jenis kepemimpinan tersebut akan tetapi akan mengambil salah satu contoh yang mungkin dapat di aplikasikan didalam pendidikan di lingkungan TNI AL.

Kepemimpinan yang pertama yaitu gaya Kepemimpinan Transformasional, pertama kali muncul di akhir tahun 1970-an yang dikenalkan oleh James Macgregor Burn dalam bukunya yang berjudul “Leadership” pada tahun 1978. Kemudian Kepemimpinan Transformasional ini di perkenalkan kembali oleh Agus Harimurti Yudhoyono dalam Desertasinya yang berjudul “Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber daya Manusia”, yang menuangkan pemikirannya terhadap bagaimana seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi berbagai tantangan dengan latar belakang kelompok Sumber Daya Manusia yang berbeda diorkestrasi menjadi satu *team work* untuk mewujudkan satu visi. Kemudian baru-baru ini muncul sebuah konsep kepemimpinan algoritma yang terlahir dari zaman digital saat ini.

Konsep yang baru saja mendapat perhatian lebih dari pemerintahan Jawa timur yang kemudian diusung dalam acara *Leadership Update Forum (LUF)* Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya 7 Maret 2025 dengan tema “Kepemimpinan Algoritma: strategi Peningkatan Kinerja di Era Efisiensi. Rhenald Kasali menjelaskan bahwa kepemimpinan algoritma adalah sebuah konsep yang tidak bisa dihindari di era digital seperti sekarang. Algoritma, yang awalnya hanya dikenal sebagai serangkaian instruksi dalam dunia teknologi, kini telah berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Algoritma tidak hanya mengatur bagaimana mesin bekerja, tetapi juga memengaruhi cara manusia berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan.

Dengan demikian kepemimpinan Transformasional dan algoritma patut dicoba untuk diterapkan mulai dari jajaran paling atas sampai dengan ke tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan siswa. Penerapan kepemimpinan transformasional yaitu untuk memberikan solusi-solusi yang adaptif terhadap permasalahan siswa generasi sekarang dengan metode yang flexibel tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya dengan menerapkan kepemimpinan algoritma dimana tujuan algoritma didalam tren media sosial tujuannya adalah untuk membuat nyaman para pengguna media sosial sehingga menghabiskan waktu di media sosial tersebut, begitu juga kepemimpinan algoritma ini bertujuan untuk membuat siswa menjadi nyaman dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sehingga tujuan pendidikan yang ingin diraih tercapai dengan optimal oleh siswa generasi z sekarang.

Dengan menerapkan duo kepemimpinan ini harapannya mampu membangun sistem dan *team work* yang sesuai dengan karakter siswa gen Z yang secara umum mempunyai ciri-ciri dan sifat yang kritis, banyak bertanya, dan rentan terhadap sesuatu.

PEMBUATAN APLIKASI SMARTPHONE DAN PELATIH SEBAGAI PERSONAL TRAINER UNTUK PEMBINAAN FISIK YANG TERUKUR DAN TERARAH.

Didalam melaksanakan program pembinaan fisik yang dilaksanakan merupakan program sama rata untuk semua siswa tidak memperhatikan kemampuan dasar yang dimiliki masing-masing siswa. sebagai contoh siswa yang mampu melaksanakan lari 7 keliling dengan 6 keliling sama-sama melaksanakan olah raga pagi yang sama. sehingga apabila mau meningkatkan kemampuan siswa secara personal harus melaksanakan pembinaan fisik secara mandiri, hal ini kurang efektif karena motivasi dan kondisi kelelahan siswa yang berbeda serta waktu siswa yang sangat padat.

Solusi yang bisa dijadikan pertimbangan adalah dengan menentukan program dan materi yang diberikan terhadap siswa berbasis kepada data awal hasil tes samapta yang diambil setiap siswa. Program yang diberikan kepada setiap siswa berbeda antara satu dengan siswa yang lainnya. Sebagai contoh pengalaman dari seorang yang akan melaksanakan pendidikan lanjutan berkonsultasi terhadap pelatih olah raga diluar (*Personal Trainer*) dengan memberikan hasil data kemampuan yang dimiliki kemudian di komparasikan dengan target waktu yang akan dicapai, kondisi badan serta dengan konsumsi makanan yang harus dipedomani selama melaksanakan program sehingga pelatihan berjalan efektif dan efisien. Untuk teknis dilapangan diperlukan pembagian pelatih



RAGAM RUBRIK

yang melekat khusus terhadap siswa berperan sebagai *Personal Trainer* sekaligus mentor dari siswa.

Hal lain yang bisa dijadikan penunjang adalah dibuat aplikasi untuk program Binjas TNI AL. Sebelumnya sudah ada aplikasi Binjas TNI namun hanya berisi input data untuk mengetahui nilai Garjas saja. Memang banyak aplikasi Garjas atau istilah umumnya *Workout Apps* di *Appstore* atau *Playstore*, akan tetapi alangkah baiknya TNI AL mempunyai aplikasi ini lebih berkembang dimana kita bisa input data kemampuan kita, target yang akan di capai baik waktu ataupun peningkatan kemampuan yang sesuai dengan ketentuan Garjas di TNI AL kemudian keluar program yang harus dilaksanakan. Hal ini juga sangat menguntungkan juga bagi personel TNI AL yang sedang persiapan sekolah tetapi sedang melaksanakan operasi pelayaran di KRI ataupun Satgas darat lainnya.

PERUBAHAN *MINDSET* PEMBERIAN HUKUMAN DARI HUMAN *RESOURCE* MENJADI HUMAN CAPITAL SESUAI DENGAN ILMU PROFESI Masing-masing.


"*Humen are not the resources to be used, but the capitals to be invested in*", barangkali ungkapan ini yang cocok untuk digunakan pada poin ini. Hukuman yang sesuai dengan bidangnya sebetulnya sudah dilaksanakan di lingkungan TNI AL, contohnya meniup terompet semalaman, membatik, hukuman fisik serta hukuman lainnya yang mempunyai tujuan untuk membina siswa

dan memberikan pelatihan terhadap materi yang telah diberikan sehingga tidak lupa terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Namun paradigma yang dimaksud disini adalah tentang *mindset* yang kadang-kadang pemberian hukuman menjadi berlebihan atau terkesan 'ngarang-ngarang' karena menganggap bahwa siswa itu merupakan human *resource* yang bisa dieksploitasi kapan saja seperti halnya *national resource* atau sumber daya alam. *Mindset* ini harus kita rubah menjadi *Human Capital* atau menganggap bahwa manusia atau dalam hal ini siswa merupakan investasi yang mana harus benar-benar di jaga supaya menjadi aset yang sangat berharga untuk masa depan kejayaan TNI Angkatan Laut.

Dengan perubahan *mindset* ini pemberian hukuman menjadi lebih mendidik, bermanfaat karena siswa merupakan aset bukan sumber daya yang bisa dieksploitasi sehingga tidak terjadi hukuman yang diluar batas, tidak mendidik dan membuat cedera atau cacat seumur hidup. Hukuman juga alangkah lebih baik yang sesuai dengan profesinya sehingga hukuman bukan hanya sekedar hukuman tetapi menjadi pelatihan yang berguna untuk profesinya dikedinasan.

Sebagai penutup, ketiga poin diatas merupakan kerangka yang harus dikembangkan baik metode dan teknisnya berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan supaya bisa diterapkan dan dijalankan di dalam program pelaksanaan pendidikan TNI Angkatan Laut.©





KAPTEN R. SOELIAN DJOSOSOUEDARSO API PERLAWANAN DARI PESISIR BELAWAN

Oleh: Lettu Laut (KH) Fahrul Firdaus, S.Hum

MONUMEN TUGU PAHLAWAN YANG
DIBUAT DALAM RANGKA MEMPERINGATI
PERJUANGAN ALRI DI BELAWAN



RAGAM RUBRIK

Dibalik hiruk-pikuk Pelabuhan Belawan salah satu simpul pelayaran terpenting di Sumatra Timur terdapat jejak perjuangan yang tak banyak tercatat dalam sejarah nasional. Jejak itu milik seorang pemuda pesisir yang berani menentang upaya kembalinya kolonialisme pada awal masa kemerdekaan. Dialah Kapten R. Soelian Djosoedardo, sosok yang hingga kini hidup dalam ingatan masyarakat Belawan sebagai pahlawan maritim republik. Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda berupaya menancapkan kembali kekuasaan melalui NICA yang datang bersama pasukan Sekutu. Belawan, sebagai pelabuhan bertaraf internasional sejak era kolonial, menjadi salah satu titik pertama yang merasakan ketegangan bersenjata. Di kawasan pesisir inilah, para pemuda dengan keberanian luar biasa membangun episentrum perlawanan maritim yang kelak berperan penting dalam mempertahankan republik yang baru lahir.

Sebelum Proklamasi, banyak pemuda Indonesia memperoleh pelatihan militer dari Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang). Setelah Jepang menyerah pada 1945, sebagian dari mereka melarikan diri dari Singapura (Shonanto) dan menetap di Belawan. Berbekal keahlian navigasi, komunikasi laut, dan kedisiplinan militer,



Makam Kapten R. Soelian yang berada di Taman Makam Bahagia

mereka membentuk BKR Laut Belawan, sebuah cikal bakal kekuatan maritim republik. Di antara para pemuda itu diantaranya Raden Soelian Djosoedardo yang menonjol sebagai seorang yang berpendidikan, disiplin, dan disegani ini segera tampil sebagai pemimpin yang

mempersatukan kekuatan-kekuatan pemuda pesisir untuk menjaga Belawan dari ancaman Sekutu/NICA.

Pada 1944, jauh sebelum hiruk-pikuk revolusi melanda Sumatra Timur, Raden Soelian telah dipercaya Kaigun sebagai nakhoda kapal Tachibana Maru, kapal logistik militer Jepang. Ia merupakan lulusan Angkatan Pertama Sekolah Tinggi Pelayaran Semarang (1943), dan bertugas bersama sahabat satu angkatannya, Nugrohadji, serta 25 anak buah kapal. Dari Semarang, Tachibana Maru berlayar menuju Belawan sebagai pangkalan operasi. Kapal ini mengangkut perlengkapan militer ke Kepulauan Nikobar sekaligus memulangkan tentara Jepang yang sakit. Namun perjalanan pulang menuju Belawan berakhir dramatis: Tachibana Maru diserang pesawat Sekutu di Selat Malaka, menyebabkan kerusakan dan korban luka. Meski demikian, berkat kepiawaian navigasi Soelian dan awaknya, kapal itu berhasil selamat dan kembali memperbaiki diri di Belawan. Pengalaman ini menempa kemampuan maritim dan kepemimpinan Soelian modal penting yang kemudian ia bawa ke medan pertempuran mempertahankan kemerdekaan.

Proklamasi Menggema, dari Laut ke Medan Juang Darat. Rencana pelayaran berikutnya menuju Nikobar terhenti ketika kabar Proklamasi 17 Agustus 1945 terdengar melalui radio. Suara kemerdekaan menggetarkan hati Soelian dan para awak muda itu. Mereka memutuskan turun ke darat, bergabung dengan rakyat, dan menyiapkan diri membela republik. Bersama Nugrohadji, Supangat, dan Sopar Sinaga, Soelian berperan dalam membentuk dan memimpin BKR Laut Belawan. Di bawah komandonya, para pemuda melakukan aksi perebutan senjata dari gudang Jepang yang masih dijaga tentara Gurkha di bawah kontrol Sekutu. Keberhasilan ini membuat posisi TRI Laut Belawan semakin kuat namun sekaligus membuat mereka menjadi sasaran utama NICA. Ultimatum sekutu dan meningkatnya ketegangan pada Desember 1945, Sekutu melayangkan ultimatum agar pemuda Belawan menyerahkan senjata rampasan tersebut. Ketegangan meningkat tajam. Markas TRI Laut di Jalan Sumatera (kini Jalan Raden Soelian) menjadi pusat persiapan para pemuda dalam menghadapi ancaman. Markas itu berdampingan dengan lokasi yang kini menjadi Monumen Raden Soelian, menghubungkan masa lalu dan masa kini Belawan.

Malam 12 Desember 1945, pasukan Sekutu mengepung dan menyerang markas TRI Laut. Pertempuran sengit terjadi. Soelian, dengan keberanian seorang nakhoda yang terbiasa menghadapi badai laut, memimpin langsung pertahanan. Meski dibombardir tembakan Stand Gun, para pemuda berhasil menahan gelombang serangan pertama, menyelamatkan dokumen, dan mengamankan sebagian senjata. Namun kemenangan sesaat itu membuat NICA semakin bernafsu menangkap



sosok pemimpin yang dianggap paling berbahaya bagi rencana mereka.

Beberapa jam setelah pertempuran, saat Soelian sedang berkomunikasi melalui telepon dengan seorang perwira di Medan, pasukan NICA tiba-tiba menyerbu. Ia ditodong dan dipaksa naik ke jeep. Namun keberanian Soelian tidak padam. Dengan keris yang terselip di pinggang senjata kecil, tapi sarat kehormatan ia menyerang dua tentara Belanda dan menewaskan keduanya. Kejadian itu membuat keadaan semakin kacau. Sopir jeep kabur dan melepaskan tembakan, sementara Soelian bersama seorang pengawal setianya berusaha meloloskan diri di tengah gelapnya malam Belawan. Pelarian itu berakhir tragis. Rentetan tembakan Sekutu menghantam tubuh Soelian dan pengawalnya di dekat rel kereta api Simpang

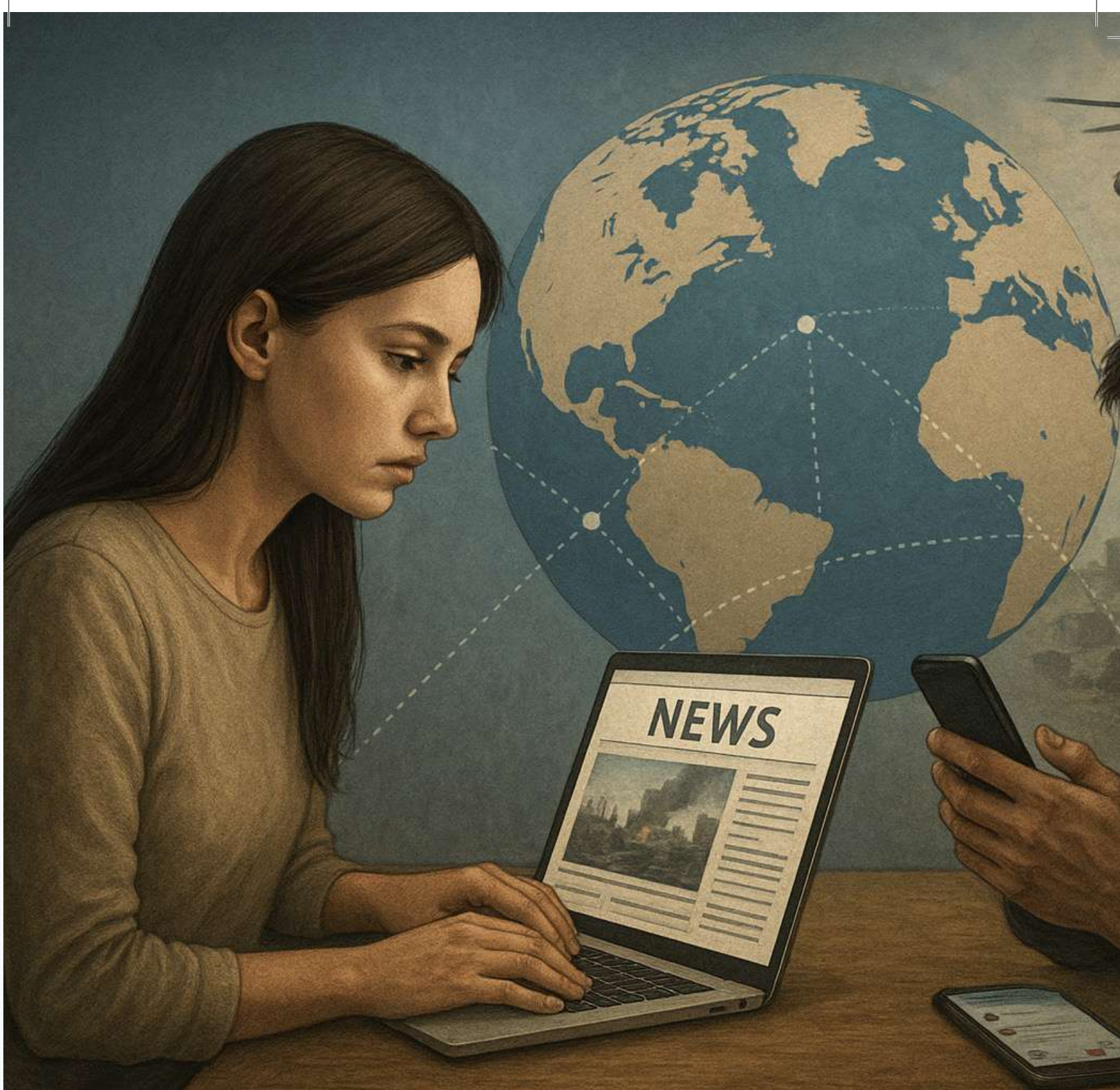
Singkong, tak jauh dari markas perjuangan yang ia lindungi. Kapten Raden Soelian gugur sebagai perwira muda yang mempertaruhkan hidup bagi kemerdekaan. Jenazahnya dibawa dan disemayamkan di rumah Asisten Wedana Belawan, Raden Subari, sebelum dimakamkan pada 13 Desember 1945. Belakangan, jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Belawan Bahagia tempat istirahat abadi sang kusuma bangsa.

Kisah Kapten Raden Soelian menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak pernah turun dari langit. Ia lahir dari perjuangan anak bangsa, termasuk dari sudut-sudut Nusantara yang jarang disorot sejarah arus utama. Dari dermaga Belawan, dari lorong-lorong kampung nelayan, dari markas kecil di Jalan Sumatera, berdiri para pemuda yang mempertahankan republik dengan senjata seadanya, namun dengan keyakinan dan keberanian yang tak tertandingi. Riwayat ini menjadi pengingat bahwa Belawan pernah berdiri di garis depan mempertahankan Indonesia. Sudah sepatutnya Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan TNI Angkatan Laut terus menjaga dan merawat situs-situs sejarah perjuangan ini, agar semangat para pahlawan tidak memudar ditelan zaman. ©



Prasasti perjuangan Kapten R. Soelian





PERAN KRUSIAL MEDIA DIGITAL DALAM KOMUNIKASI GLOBAL MENGHADAPI PERANG MODERN

Oleh : Letkol Laut (KH) Sitho P . Yudhoajie, S.Kom., M.M.



Peran krusial media gital sangat penting sebagai sarana alat interaksi komunikasi global, hal tersebut pengaruh dari kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan canggih dalam menghadapi perang modern.

Penyebaran informasi (*amplifikasi*) mencakup berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, audio, dan video melalui platform elektronik seperti internet, komputer, smartphone dan perangkat digital lainnya, dengan cepat dan luas tanpa batas ruang dan waktu yang menciptakan jaringan global yang menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia.

Di dunia saat ini, orang-orang terhubung secara global lebih dari sebelumnya, dala hal ini, komunikasi global memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional. Memahami penerapannya dapat membantu individu dan organisasi berkembang di dunia yang saling terhubung saat ini. Komunikasi global adalah kemampuan untuk berbagi informasi dan ide dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya. Komunikasi global melibatkan berbicara, menulis, dan memahami pesan satu sama lain, bahkan ketika terdapat hambatan bahasa atau perbedaan budaya.

Perang modern adalah perang yang sangat berbeda dengan konsep, metode dan teknologi militer sebelumnya, menekankan bagaimana kombatan harus dimodernisasi untuk menjaga kelayakan dalam pertempuran. Perang modern nyata juga menekankan pada penggunaan taktik dan strategi baru dalam pertempuran, seperti perang gerilya, perang asimetris, dan perang siber.

Penggunaan teknologi canggih, seperti internet dan media sosial, untuk mempengaruhi opini publik dan memenangkan pertempuran merupakan perang modern yang terselubung yang dilakukan secara rahasia dan tidak terbuka.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peran media digital dalam konteks perang modern:

1. Penyebaran informasi yang cepat dan luas:
 - a. Media digital, terutama media sosial, memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, melampaui batas geografis dan waktu.
 - b. Hal ini dapat digunakan untuk menyebarkan narasi, propaganda, atau bahkan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik secara global.
2. Medan Pertempuran Informasi (*Information Warfare*):

Perkembangan teknologi digital dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat sebuah bangsa dengan melahirkan masyarakat digital (*digital society*), dan sebagai penyeimbang dari kemajuan teknologi media digital. Media gital yang merupakan media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan serta menerima informasi yang terdigitalisasi atau media yang informasinya ditransmisikan sebagai data digital.



RAGAM RUBRIK

a. Perang informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari konflik modern, di mana negara atau kelompok tertentu menggunakan media digital untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan mereka dan melemahkan lawan.

b. Disinformasi, propaganda, dan kampanye pencemaran nama baik menjadi senjata dalam perang informasi ini, yang dapat merusak reputasi, stabilitas politik, dan bahkan memicu konflik.

3. Pembentukan Opini Publik:

a. Media digital memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik, baik melalui penyebaran informasi faktual maupun melalui narasi yang dikendalikan.

b. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang suatu peristiwa, isu, atau bahkan negara tertentu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan.

4. Tantangan Etika dan Hukum:

a. Peran media digital dalam perang informasi menimbulkan tantangan etika dan hukum yang kompleks.

b. Penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian dapat melanggar hak asasi manusia dan mengancam kebebasan berekspresi.

c. Perlu adanya regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatasi penyalahgunaan media digital dalam perang informasi, tanpa mengorbankan kebebasan pers dan berekspresi.

5. Peran Komandan dalam Penggunaan Teknologi:

a. Dalam konteks militer, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut peran komandan yang lebih bijak dalam penggunaan teknologi.

b. Komandan tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembimbing dan pengawas dalam penggunaan teknologi oleh personel.

c. Tujuan utama adalah memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan secara bijaksana dan etis untuk kepentingan dinas dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan.

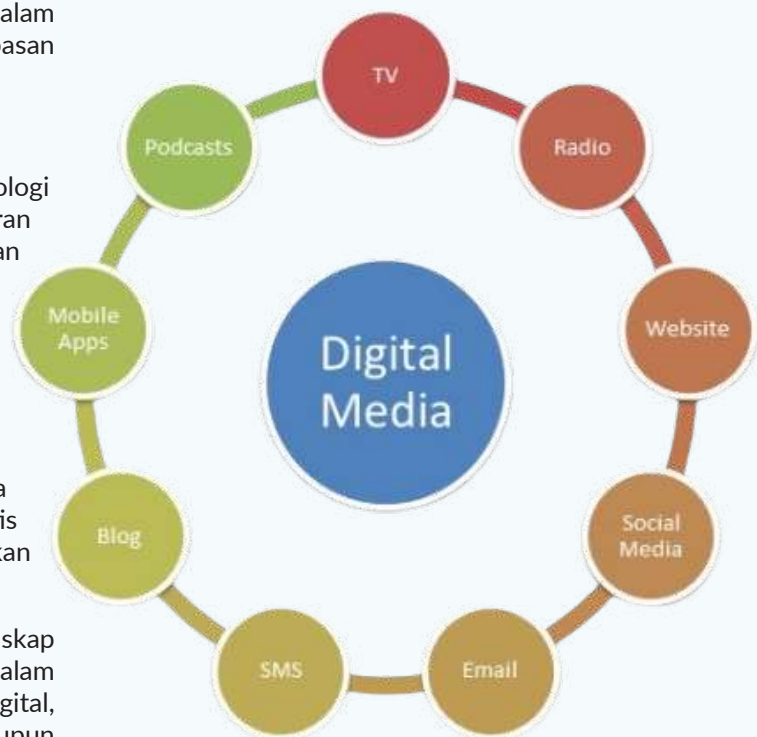
Dalam hal ini, media digital telah mengubah lanskap komunikasi global dan menjadi alat yang ampuh dalam perang modern. Memahami peran ganda media digital, baik sebagai sarana penyebaran informasi maupun

medan pertempuran informasi, adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya. Diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan regulasi yang efektif, meningkatkan literasi digital, dan memastikan penggunaan media digital yang bertanggung jawab dan etis.

Media gital yang merupakan media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan serta menerima informasi yang terdigitalisasi atau media yang informasinya ditransmisikan sebagai data digital. Peran media gital sangat penting sebagai sarana alat interaksi komunikasi global, hal tersebut pengaruh dari kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan canggih menghadapi era society 5.0.

Era Society 5.0 merupakan merupakan konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia yang berkolaborasi dengan sistem teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi dalam dunia maya dan dunia nyata. Jurnal pengembangan masyarakat lokal (Budaya Digital Dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0)

Perkembangan teknologi digital dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat sebuah bangsa dengan melahirkan masyarakat digital (*digital society*), dan sebagai penyeimbang dari kemajuan teknologi media digital.





Penyebaran informasi (amplifikasi) mencakup berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, audio, dan video melalui platform elektronik seperti internet, komputer, smartphone dan perangkat digital lainnya, dengan cepat dan luas tanpa batas ruang dan waktu yang menciptakan jaringan global yang menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia.

REVOLUSI MEDIA KE DIGITAL

Teknologi komunikasi dan informasi mengalami perkembangan kemajuan yang semakin pesat, hal tersebut mendorong perubahan dalam segala hal yang berpengaruh juga terhadap media. Untuk mengikuti perkembangan tersebut mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut. Sistem analog yang sudah bertahan akan tergantikan oleh sistem digital. Media-media analog atau konvensional yang bersifat masif harus digabungkan dengan teknologi yang bersifat interaktif, inilah yang kemudian dikenal sebagai konvergensi media yang membuat perubahan dalam penanganan, penyediaan dan pemrosesan seluruh bentuk informasi baik visual, audio, maupun data.

digital yang kemudian dapat dengan mudah diakses melalui smartphone. Beberapa surat kabar digital sudah menggunakan perkembangan teknologi ini. Popularitas yang tinggi menjadikan surat kabar digital mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan dan mendistribusi informasi sesuai dengan undang-undang.

Surat kabar digital lebih fleksibel karena pembaca memiliki kebebasan yang lebih luas dalam memilih topik berita, yang kemudian membuat pembaca dapat lebih mudah membaca berita-berita sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mudahnya pembaca dalam mengakses dan membaca berita melalui media digital secara *online*, maka semakin meningkat juga situs-situs portal berita di internet contohnya *detik.com*, *kompas.com*, *viva.co.id*, *antaranews.com*, *republika.co.id*, *pikiranrakyat.com*, *mediaindonesia.com*, dan lain sebagainya.

BEBERAPA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA GITAL.

Media digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sehari-hari dan mengubah cara berkomunikasi, mengakses informasi dan berinteraksi,



Konvergensi media ini juga berdampak pada bidang jurnalistik dimana jurnalis dituntut untuk mampu dengan cepat memproses informasi yang diperoleh untuk dikirimkan kepada khalayak. Perkembangan teknologi dan proses kerja jurnalistik membuat wartawan dapat terus menerus update informasi dengan cepat dengan temuan-temuan baru yang ada dilapangan.

Pada era konvergensi ini surat kabar digital merupakan salah satu media online yang banyak digunakan dalam pencarian informasi. Perkembangan teknologi internet sangat mempengaruhi perkembangan surat kabar

hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan dalam berkomunikasi. Kelebihan media digital, antara lain:

1. Memudahkan akses informasi yang cepat dan luas.

Kemampuan yang diunggulkan media digital dapat menyajikan secara instan dan mencakup area yang luas yang dapat memudahkan penggunaannya mengakses berita, artikel dan unggahan video maupun foto hanya dengan beberapa ketukan atau klik.



RAGAM RUBRIK

2. Interaktivitas.

Memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan kontennya melalui komentar, tanggapan dan berbagai bentuk umpan balik, dan pengguna dapat terlibat secara langsung dengan konten sesama pengguna.

3. Kemudahan berbagai informasi.

Pengguna dapat dengan mudah berbagai informasi dengan orang lain melalui platform media online dan media sosial. Hal ini memungkinkan penyebaran ide, tren dan informasi penting dan cepat.

4. Kemampuan kustomisasi.

Pengguna dapat menyesuaikan dengan preferensinya dengan mengatur algoritma berita atau mendapatkan rekomendasi konten yang sesuai dengan minat audiens.

Kekurangan media digital, antara lain:

1. Isu Privasi.

Penggunaan media digital sering kali melibatkan pertukaran informasi pribadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data pribadi, terutama jika data tersebut disalahgunakan atau diakses tanpa izin.

2. Penyebaran informasi palsu (*Hoax*) dan konten negatif.

Kecepatan dalam menyebarkan informasi digital juga memberikan celah bagi penyebaran berita palsu dan konten negatif yang dapat merugikan reputasi, menciptakan ketidakpastian dan bahkan dapat mempengaruhi keputusan publik.

3. Ketergantungan.

Ketergantungan pada media digital dapat menyebabkan kesehatan mental dan sosial. Penggunaan berlebihan dapat juga menimbulkan isolasi sosial, kecanduan dan gangguan tidur (pola istirahat).

Dalam memahami dan menilai kelebihan dan kekurangan penggunaan media digital, dapat mengoptimalkan penggunaannya untuk mendukung pertumbuhan maupun perkembangan informasi positif yang berdampak bagi masyarakat.

PENGERTIAN DAN CONTOH MEDIA DIGITAL.

Berikut ini penjelasan lengkap menurut *Law Insider* tentang pengertian media digital sekaligus contohnya.

- Media digital berarti metode dan *platform* produksi yang terkait langsung dengan pembuatan citra dan konten sinematik, khususnya yang menggunakan sarana digital, termasuk namun tidak terbatas pada kamera digital, peralatan suara digital, dan komputer, untuk disampaikan melalui film, rekaman video, *platform* permainan interaktif, atau media distribusi digital lainnya.

- Media digital berarti konten digital yang dapat dikirim melalui internet atau jaringan komputer dan termasuk konten yang diterima, disimpan, dikirim, diedit atau diproses.

- Media digital termasuk, misalnya, disket, pita magnetik, *hard disk drive* eksternal/dapat dilepas, *flash drive*, *compact disk*, dan *disk* video digital.

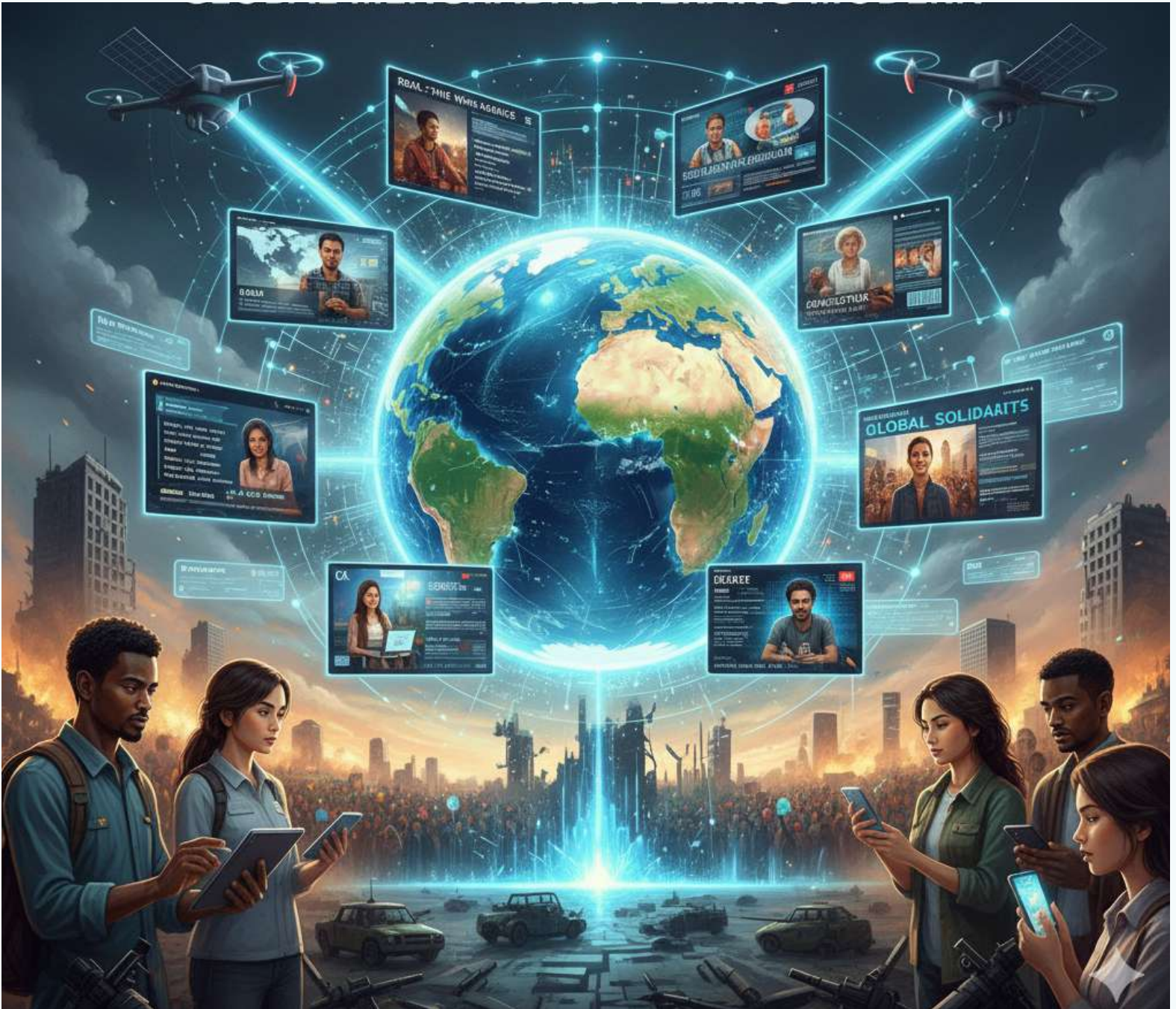
- Media digital, termasuk penerbitan dan penyiaran internet, permainan video, pengembangan *web*, dan teknologi hiburan.

- Media digital berarti media fisik, elektronik, yang digunakan untuk menyimpan informasi, termasuk, namun tidak terbatas pada: disket, pita magnetik, komputer desktop, laptop, *hard drive*, memori akses acak, memori hanya baca, cakram padat, peralatan jaringan, bentuk lain dari media optik dan magnetik, dan media elektronik lainnya yang dapat menyimpan informasi.

- Media digital berarti setiap informasi atau konten yang disiarkan termasuk teks, audio, video, grafik, TV web, TV *over the top* dan konten sejenis lainnya yang disediakan untuk dilihat melalui internet;


- Media digital berarti setiap perangkat penyimpanan magnetik atau elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada, *hard disk*, *disket floppy*, media cadangan, CD-Rom, DVD-Rom, *disk Zip*, *disk optik*, *buffer printer*, kartu pintar, kalkulator memori, dialer elektronik, *drive Bernoulli*, atau *notebook* elektronik.

Keberadaan peran media digital menghadapi era *society 5.0* dalam komunikasi global telah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pesan yang dapat membentuk opini publik atau suatu peristiwa sosial. Penggunaan media digital dalam sarana media *online* umum berupa *website* atau situs *online* resmi dan portal berita, sedangkan dalam bentuk *platform* media sosial seperti *blog*, *youtube*, *facebook*, *twitter*, *Instagram* maupun *tiktok* dan media sosial lainnya memiliki karakter yang berbeda. Media sosial merupakan teknologi berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi maupun terlibat secara langsung (*two-way interaction*) dengan beberapa pengguna lain dalam media sosial (Carr and Hayes 2015).



Penggunaan media *online* dan sosial memungkinkan sebuah pergerakan untuk dapat melakukan komunikasi dua arah secara langsung dengan masyarakat luas yang tersambung melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan penggunaanya dapat memperluas jaringan untuk mendukung suatu aktifitas pergerakan sosial. Media *online* tidak hanya untuk menyebarkan atau blasting dan mengamplifikasikan informasi maupun berita atau sarana kampanye hitam (*black campaign*) untuk mendapatkan dukungan dan berpartisipasi tetapi juga menggalang dukungan dari masyarakat global dalam mencapai tujuan aksi pergerakannya.

Keberadaan media *online* dan sosial tidak dapat dibatasi sekedar hanya sebagai sebuah tren yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi modern saat ini, tetapi sebagai sarana menyebarkan informasi adalah salah satu sumber informasi yang dapat dijangkau, efisien, tanpa batas ruang dan waktu serta dilakukan dengan mudah oleh masyarakat atau publik secara menyeluruh atau masif.



MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA MENURUT AJARAN ISLAM

Oleh : Fana Kartiko, S.Ag

Ketika kita berbicara tentang keluarga bahagia maka kita yakin semua pasti amat sangat mendambakan keluarga yang kita bina saat ini dapat menjadi keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu untuk dapat mewujudkannya maka seluruh anggota keluarga harus bekerja sama, khususnya bagi suami dan istri. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia menurut ajaran Islam :

PONDASI MENIKAH KARENA IBADAH

Hal yang paling pertama dan utama sebelum mewujudkan keluarga bahagia dalam Islam yakni niat melakukan pernikahan demi mengejar ridho Allah SWT. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 207, yang mempunyai arti, **"Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari rida Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba (-Nya)."**

Niat membentuk keluarga karena ibadah menjadi unsur yang sangat penting dalam Islam. Menerapkan hal ini pun dapat dilakukan sejak sebelum meresmikan hubungan

di pelaminan. Misalnya, dalam proses ta'aruf hingga berlanjut ke mimbar pernikahan. Dengan melakukan prosesnya secara islami, upaya dalam membentuk keluarga sesuai syariat Islam juga akan lebih mudah. Sebab Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi siapa pun mereka yang taat kepada-Nya.

MEMENUHI TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTRI

Untuk mewujudkan keluarga bahagia maka anggota keluarganya harus bahu-membahu, serta memenuhi masing-masing kewajiban.

Kewajiban suami : Dalam hubungan keluarga, suami dan istri juga harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Peran suami sebagai seorang pemimpin harus terpenuhi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:34, yang mempunyai arti, **"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."**



Suami yang ideal dalam konsep Islam yakni yang mampu menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, suami harus memenuhi tanggung jawab nafkah, mendidik, mengatur, serta membimbing keluarga dalam kebaikan sesuai syariat Islam.

Kewajiban istri : Sementara itu, sebagai seorang istri harus menjaga diri dan hartanya, serta melaksanakan kewajiban untuk taat kepada suami. Sebab meninggalkan ketaatan pada suami adalah dosa besar bagi wanita. Sebaliknya, istri yang taat kepada suami akan diganjar pahala yang besar pula.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, “Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan.” (HR. Ibnu Hibban). Dengan melaksanakan masing-masing kewajiban, tujuan mencapai keluarga yang harmonis akan lebih mudah.

SALING PERHATIAN DAN MENYAYANGI

Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud jika tidak adanya rasa kasih dan sayang antara sesama anggota keluarga. Sepasang suami dan istri harus saling mencurahkan perhatian kepada pasangan, misalnya saling mengungkapkan rasa sayang, saling memuji satu sama lain, sesekali memberikan hadiah, saling menawarkan bantuan, bersikap lembut, dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21, yang mempunyai arti,

“ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir “

MENGALAH, SALING BERSABAR

Bukan cuma itu, hal yang tak kalah penting dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia dalam Islam yakni dengan meredam emosi dan saling bersabar. Rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Ada masa di mana pasangan saling gontok-gontokan hingga berujung pertengkaran. Saat kondisi tersebut terjadi, suami dan istri harus sama-sama bersabar. Mengalah dalam pertengkaran di keluarga juga bukan hal buruk. Tak jarang, cara tersebut justru bisa dengan cepat meredam tensi yang meninggi di dalam keluarga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 200, yang mempunyai arti, **Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan**

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

BERSYUKUR DAN SALING MENJAGA IBADAH

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk bersyukur. Dalam kehidupan berkeluarga, rasa syukur kepada Allah SWT akan menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih nikmat. Saat keluarga dihadapkan pada konflik, rasa syukur membantu anggota keluarga untuk tetap kuat dan berada di jalan Allah SWT. Selain itu, sesama anggota keluarga juga harus saling menjaga ibadah, mengingatkan satu sama lain untuk berbuat baik. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ibrahim : 7, yang mempunyai arti, **“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”**

MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAM

Tidak semua manusia mendapat keimanannya untuk beragama Islam sejak kecil. Namun, keluarga memberi peran sangat besar dalam mengenalkan agama Islam di usia dini. Melalui lingkup keluarga, anak akan menyaksikan kebiasaan orang tua melakukan ibadah shalat, membaca al-qur’an, berpuasa, dan pengalaman nilai-nilai Islam lainnya dalam berkeluarga. Keluarga memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak melalui praktik di kehidupan sehari-hari. Tafsir al-Quran surat at-Tahrim ayat 6 menyebut, sikap tersebutlah yang dimaksud sebagai menjaga keluarga dari api neraka, yang mempunyai arti, **“ Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu“.**

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa kita dan juga keluarga kita harus mampu untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menghindari segala macam bentuk kemaksiatan agar kita dan keluarga kita dapat menghindari dari siksa api neraka.

Demikian materi singkat yang dapat disampaikan penulis dan kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu kami menyampaikan permohonan ma’af atas segala kekurangan, kekhilafan ataupun hal-hal yang kurang berkenan dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan dan kemampuan untuk dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dalam rumah tangga kita masing-masing. Amiin Yaa Robbal ‘Aalamiin.©

A large blue sign with white text is mounted on a grey concrete wall. The sign reads "CLUSTER YASMIN" in a bold, sans-serif font. The background of the sign is a solid blue color, and the text is white. The sign is positioned in the foreground, partially obscuring the view of the house and car behind it.

CLUSTER YASMIN



PERUMAHAN PRIBADI MELALUI DINAS DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PEMERINTAH TIGA JUTA RUMAH

Oleh: Letkol Laut (KH/W) Eliyah Musarovah, S.Pd., M.Pd., CHRMP., CBEI., CIQnR.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan atas kebutuhan ini telah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 40 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Terpenuhinya kebutuhan akan perumahan tidak hanya memberikan rasa aman bagi setiap individu, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri terhadap kemampuan ekonomi dalam pembinaan keluarga, serta mempersiapkan generasi mendatang untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik.

Bagi sebagian besar masyarakat, memiliki rumah baru sering kali masih menjadi wacana yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Dari tahun ke tahun, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah terus terjadi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, terutama yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Rendahnya daya beli serta terbatasnya akses terhadap sistem pembiayaan perumahan menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan kebutuhan hunian. Secara umum, perumahan (housing) dapat diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian, lengkap dengan prasarana dan sarana penunjangnya. Lingkungan hunian ini tidak hanya berperan sebagai tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat kerja dalam batas tertentu guna mendukung aktivitas kehidupan dan penghidupan penghuninya, sehingga fungsi permukiman dapat berjalan secara optimal dan berdaya guna.

Keterjangkauan masyarakat terhadap rumah harus diperhatikan dalam upaya penyediaan perumahan untuk semua kelompok masyarakat dengan keterjangkauan (*affordability*) terhadap

rumah merupakan kemampuan dan kemauan suatu rumah tangga untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk biaya perumahan, sehingga terdapat keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi antar rumah tangga, keuangan rumah tangga, dan rumah yang diinginkan secara teoritik menunjukkan bahwa tipe dan struktur ekonomi sebuah rumah tangga akan memengaruhi tipe dan jenis perumahan yang didiami, hal ini dikarenakan keterjangkauan terhadap perumahan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan keluarga, harga rumah yang ditawarkan, dan harga lainnya yang memengaruhi. Biasanya pengeluaran masyarakat untuk perumahan berkisar antara 15 sampai dengan 20 persen dari penghasilan, hampir sama dengan pengeluaran untuk kebutuhan pangan.

Dengan kepemilikan perumahan sebagai hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan oleh hukum internasional merupakan kerangka kerja yang kuat yang memperhitungkan kenyataan yang ada pada saat ini, dalam kerangka kerja hak asasi manusia memiliki dan hak atas perumahan bukan berarti bahwa pemerintah harus membangun rumah untuk setiap orang di Indonesia dan memberikannya kepada mereka secara cuma-cuma dengan pemberian potongan atau kredit bagi penyewa dengan menciptakan insentif dari pengembang swasta perumahan yang terjangkau.

Pemenuhan akan perumahan layak huni termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan bahwa negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Selain itu, penghargaan terhadap hak asasi manusia terkait dengan pemenuhan perumahan yang layak juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM). Pasal 40 Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak dengan kedua



RAGAM RUBRIK

ketentuan di atas menempatkan rumah sebagai suatu kebutuhan yang mutlak, sehingga masalah perumahan sangat penting untuk kesejahteraan, kelangsungan hidup dan kesehatan manusia Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menentukan kemungkinan dijatuhkan pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan yang sesuai dengan kriteria kelayakan dan mewujudkan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh penyelenggara perumahan bahwa program tiga juta rumah adalah untuk membantu golongan masyarakat yang memiliki akses terbatas pada pembiayaan perumahan, demi mendapatkan hunian yang layak, aman, dan nyaman.

Dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program pemerintah perihal kepemilikan tiga juta rumah pribadi telah dituangkan dalam Perkasal Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perumahan Pribadi Melalui Dinas (PPMD) TNI Angkatan Laut, melalui program pinjaman pemilikan rumah dengan dana Tabungan Disiplin atau PPR Tabplin merupakan fasilitas pinjaman yang bersumber dari dana Tabplin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan personel TNI AL beserta keluarganya yang sah, mendidik keluarga dan anak sebagai generasi penerus Bangsa. Dalam hal memiliki rumah pribadi melalui dinas personel TNI AL yang berminat diberikan kesempatan untuk memilih lokasi perumahan yang dikehendaki. Selain pembelian rumah bersertifikat juga dapat digunakan untuk pembangunan rumah di tanah sendiri dan renovasi rumah pribadi bersertifikat. Program PPMD TNI Angkatan Laut adalah salah satu kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Laut guna membantu personel TNI AL dalam mengatasi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keterbatasan lahan yang berdampak semakin mahal harga lahan begitupun dengan rumah;
- b. Peningkatan penghasilan tidak mampu mengejar kenaikan harga rumah;
- c. Jauhnya jarak tempat kerja dengan rumah sehingga berdampak pada biaya transportasi, alih guna lahan serta permasalahan ekonomi lainnya; dan
- d. Masih terbatasnya akses pembiayaan perumahan melalui perbangan khususnya bagi pekerja informal.

Perumahan Pribadi Melalui Dinas TNI Angkatan Laut

(PPMD) adalah bangunan rumah berikut tanahnya, yang diperuntukkan bagi personel TNI Angkatan Laut yang masih aktif dengan status kepemilikannya milik pribadi melalui program dari dinas TNI AL dengan fasilitas pinjaman yang bersumber dari dana Tabungan Disiplin (Tabplin) yang merupakan pinjaman pemilikan rumah dengan dana tabungan disiplin yang biasa disebut dengan PPR Tabplin yang merupakan pinjaman untuk program PPMD TNI AL dengan fasilitas pinjaman yang bersumber dari dana Tabplin. PPMD TNI AL terdiri dari:

- a. PPR Tabplin meliputi:
 - 1) Perumahan yang disediakan melalui kerjasama dengan pengembang;
 - 2) Pembangunan rumah di tanah sendiri bersertifikat;
 - 3) Pembelian rumah bersertifikat; dan
 - 4) Renovasi rumah pribadi bersertifikat atas nama debitur atau suami/istri
- b. Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah melalui bank oleh BP Tabplin

Sumber pendanaan PPMD TNI AL dengan menggunakan anggaran dari Tabplin dengan plafond sesuai strata sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Strata Tamtama dan PNS sederajat Rp 275.000.000
- b. Strata Bintara dan PNS sederajat Rp 300.000.000
- c. Strata Pama dan PNS sederajat Rp 350.000.000
- d. Strata Pamen dan PNS sederajat Rp 400.000.000

Bagi personel TNI AL yang ingin mendapatkan pendanaan PPMD TNI Angkatan Laut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masa kerja dinas paling singkat 1 (satu) tahun atau gaji sudah dipotong iuran Tabplin;
- b. Surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai cukup melalui Ka Akun/bendahara pengeluaran;



- c. Surat pengantar dari kotama/satker kepada Kadiswapersal;
 - d. Surat penunjukkan paling rendah 2 (dua) ahli waris dengan meterai cukup;
 - e. Surat persetujuan atasan;
 - f. Surat keterangan penghasilan dari Ka Akun/ bendahara pengeluaran;
 - g. Surat persetujuan suami/istri dengan meterai cukup bagi yang sudah menikah;
 - h. Fotokopi kartu tanda anggota TNI/PNS berjumlah 1 (satu) lembar;
 - i. Fotokopi kartu keluarga dinas bagi yang sudah berkeluarga dilegalisasi oleh pejabat personel berjumlah 1 (satu) lembar;
 - j. Fotokopi kartu keluarga kelurahan bagi yang sudah berkeluarga berjumlah (satu) lembar;
 - k. Fotokopi kartu tanda penduduk berjumlah 1(satu) lembar; dan
 - l. Fotokopi NPWP berjumlah 1 (satu) lembar.
- e. Debitur yang melakukan tindakan melanggar hukum berakibat diberhentikan tidak dengan hormat, debitur/ahli waris dapat melanjutkan angsuran atau menjual sertifikat yang menjadi agunan;
- f. suami istri yang merupakan personel TNI AL, maka keduanya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan PPMD Tabplin;
- g. perumahan yang disediakan melalui PPR Tabplin dan KPR yang dialihkan dari bank Tabplin maksimal jangka kredit yang diambil/dipilih tidak boleh melampaui masa kerja;
- h. sisa gaji tidak boleh kurang dari 1/3 (sepertiga) gaji; dan
- i. bagi personel TNI AL yang masa dinasnya kurang dari 5 (lima) tahun, masih diberi kesempatan untuk mendapatkan PPMD TNI AL dengan ketentuan sanggup melunasi angsuran bulan terakhir berdinis (pensiun).

Sedangkan ketentuan khusus PPMD TNI AL dari yang mendapatkan pendanaan adalah:

- a. Masih memiliki sisa masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan sanggup melunasi angsuran sebelum pensiun;
- b. Bagi personel TNI AL yang sudah mendapatkan fasilitas bantuan KPR melalui bank, masih diberi kesempatan mendapatkan fasilitas PPR dengan ketentuan kepemilikan rumah melalui pengembang dan KPR yang pernah diambil/diperoleh sebelumnya telah lunas;
- c. Personel TNI AL yang berdinis di UO TNI Angkatan Laut atau pernah menjadi peserta Tabplin aktif paling rendah 1 (satu) tahun diberikan kesempatan menjadi debitur untuk membeli, membangun dan merenovasi rumah melalui PPR Tabplin.
- d. Debitur yang meninggal dunia sebelum angsuran selesai maka sisa angsuran dilunasi oleh asuransi yang dikelola BP Tabplin;

Dari tahun 2023 s.d. 2025 ketersediaan kredit perumahan pribadi melalui dinas sudah terbangun sejumlah 11.007 unit rumah di seluruh Indonesia dari 18 pengembang yang telah melaksanakan PKS dengan TNI AL beserta tipe dan harga rumahnya.

Selain Program PPMD TNI Angkatan Laut tersebut diatas untuk membantu meringankan personel TNI AL dalam pembelian rumah pribadi bersertifikat, juga dapat mengajukan Bantuan Uang Muka KPR melalui Asabri untuk mewujudkan Program Pemerintah Tiga Juta Rumah.©



Haduhh, rumah makin gak layak



Harus gimana lagi ya, supaya dapat hunian yang layak...



Iya keluarga pasti semakin gak betah

Lohh ngapain bingung kan ada Program Tiga Juta Rumah..



Jadi bingung mikirin hunian yang layak untuk prajurit TNI AL kayak kita..

Coba sekarang langsung aja cek di Website TNI AL



Wah serius ini, dimana lihat infonya?

Coba saya cek dulu bang..





Wahh perumahan
sebagus ini pasti
mahal ya..
Gaji saya gak cukup
ini bang..



Tenang aja Pak
pasti murah dan
bisa pakai Tabplin

Sudah tertuang dalam
Perkasal Nomor 57 Tahun 2020
tanggal 30 Desember 2020
tentang Perumahan Pribadi
Melalui Dinas (PPMD)
TNI Angkatan Laut



Wahh kalo gitu saya
minat sekali

Kalo gitu bantu saya
cek unit perumahan
itu ya



Aman Pak,
berangkat sekarang



Nahh ini komplek
perumahanya

Langsung lengkapi
saja persyaratannya
dan bisa menempati



Saya dan keluarga
pasti nyaman tinggal
di perumahan yang
layak seperti ini

Terima kasih
banyak bang atas
infonya



Perumahan yang layak dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 40 Undang Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak



TUGAS TNI ANGKATAN LAUT

- 1. MELAKSANAKAN TUGAS TNI MATRA LAUT DI BIDANG PERTAHANAN.**
- 2. MENEGAKKAN HUKUM DAN MENJAGA KEAMANAN DI WILAYAH LAUT YURIDIKSI NASIONAL SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI.**
- 3. MELAKSANAKAN TUGAS DIPLOMASI ANGKATAN LAUT DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan Politik Luar Negeri yang ditetapkan Pemerintah.**
- 4. MELAKSANAKAN TUGAS TNI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEKUATAN MATRA LAUT.**
- 5. MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT.**